BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo secara umum telah melakukan dan menerapkan kualitas isi berita dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan prinsip objektivitas yang telah terpenuhi. Enam dimensi dari prinsip objektivitas tersebut adalah *factualness, accuracy, completeness, relevance, balance,* dan *neutrality.* Dari enam dimensi tersebut, kualitas isi berita mengenai kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo diteliti berdasarkan tujuh unit analisis, yaitu sifat fakta, akurasi penyajian, relevansi sumber berita, kelengkapan 5W dan 1H, nilai berita, tipe liputan, dan sensasionalisme.

Kekurangan Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo adalah pada unit analisis sifat fakta, Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dapat dikatakan buruk. Prinsip objektivitas menghendaki fakta sosiologis dalam pemberitaan. Pada kedua surat kabar tersebut, sifat fakta masing-masing adalah 57% atau 0,57 untuk Surat Kabar Kompas dan 60% atau 0,6 untuk Koran Tempo, maka dapat dikatakan memiliki dimensi *factualness* yang buruk. Fakta sosiologis lebih banyak ditemukan daripada fakta psikologis, namun jumlahnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Dimensi *accuracy* diukur melalui dua unit analisis, yaitu akurasi penyajian dan relevansi sumber berita. Akurasi penyajian dalam pemberitaan kasus

mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan dipenuhi Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya beberapa berita saja yang tidak memiliki akurasi penyajian pada kedua surat kabar tersebut, sedangkan sebagian besar berita memiliki akurasi penyajian. Unit analisis relevansi sumber berita dipenuhi Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dengan sangat baik. Wartawan mengumpulkan berita dan memintai keterangan dari sumber berita yang tepat, artinya sumber berita tersebut adalah orang yang mengalami peristiwa tersebut, saksi peristiwa, atau ahli yang menguasai permasalahan mengenai kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan.

Dilihat dari sisi kelengkapan berita atau *completeness*, Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo sudah menjalankan prinsip *compeleteness* dengan baik, ditandai dengan nilai kelengkapan 5W dan 1H yang tinggi. Kelengkapan 5W dan 1H penting untuk dipenuhi guna menunjang pemahaman pembaca yang utuh dan benar terhadap teks berita. Unit analisis nilai berita untuk melihat dimensi *relevance*, telah dijalankan Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai berita yang dijumpai dalam keseluruhan pemberitaan adalah nilai berita yang mengarah ke *significanc*e. Pemberitaan yang mengarah ke *significanc*e mempunyai nilai berita yang penting dan layak untuk diketahui banyak orang. Maka semakin penting dan layak sebuah berita untuk diketahui banyak orang, semakin relevan berita tersebut.

Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo juga telah melakukan liputan sesuai dengan standar *balance*, ditandai dengan tipe liputan yang banyak dipakai adalah tipe liputan dua sisi. Selain tipe liputan dua sisi, kedua surat kabar tersebut juga melakukan tipe liputan multi sisi, walaupun jumlahnya lebih sedikit dari tipe liputan dua sisi. Dalam penelitian ini, dimensi netralitas diukur berdasarkan unit analisis sensasionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo memiliki dimensi *neutrality* yang tinggi. Sensasionalisme berita pada kedua surat kabar tersebut sangat rendah. Berikut ini adalah hasil penelitian secara rinci:

1. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo lebih banyak menampilkan fakta sosiologis daripada fakta psikologis, namun keduanya berada pada kategori buruk. Pada Surat Kabar Harian Kompas, dari 37 berita yang diteliti, sebanyak 21 berita atau 57 % mengandung fakta sosiologis, dan sebanyak 16 berita atau 43 % mengandung fakta psikologis. Untuk Koran Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 30 berita atau 60 % mengandung fakta sosiologis, dan 20 berita atau 40 % mengandung fakta psikologis. Hasil mengenai fakta sosiologis dan fakta psikologis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
2. Akurasi penyajian telah terpenuhi dengan baik pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo. Dari 37 berita yang diteliti pada Surat Kabar Harian Kompas, sebanyak 34 berita atau 92 % memiliki akurasi penyajian. Sedangkan Koran Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 47 berita

atau 94 % memiliki akurasi penyajian. Akurasi penyajian sangat dibutuhkan dalam penulisan berita, agar pembaca dapat memahami dengan tepat mengenai peristiwa yang disajikan oleh wartawan melalui berita.

3. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dinyatakan memiliki relevansi sumber berita yang baik. Artinya, wartawan telah memilih narasumber yang tepat sebagai penunjang data yang diperoleh di lapangan. 87 berita yang diteliti pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo atau 100 % berita memiliki relevansi sumber berita.
4. Kelengkapan 5W dan 1H di masing-masing surat kabar, baik Surat Kabar Harian Kompas maupun Koran Tempo, dinilai baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo sebagian besar telah memenuhi unsur kelengkapan berita. 37 berita pada Surat Kabar Harian Kompas yang telah diteliti, sebanyak 35 berita atau 95 % dinyatakan lengkap. 2 item berita atau 5 % dinyatakan tidak lengkap karena tidak mengandung unsur *why*. Sedangkan Koran Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 45 berita atau 90 % dinyatakan memiliki kelengkapan 5W dan 1H. sebanyak 5 berita atau 10 % dikatakan tidak lengkap, karena dalam berita yang disajikan tidak menampilkan unsur *where, why,* dan *how*.
5. Nilai berita yang diangkat Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dalam pemberitaan mengenai kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan adalah mengarah ke *significance*. Keseluruhan berita yang

diteliti, yaitu sebanyak 87 item, terdiri dari 37 berita Surat Kabar Harian Kompas dan 50 item berita Koran Tempo, memiliki nilai berita yang mengarah ke *significance*. Nilai berita yang ditemukan adalah *timeliness* dan *significance*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan memiliki tingkat relevansi yang baik, karena peristiwa tersebut penting dan layak untuk diketahui masyarakat.

6. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo lebih banyak menggunakan tipe liputan dua sisi. Tipe liputan dua sisi menempati posisi teratas, yaitu sebanyak 14 berita atau 38 % di Surat Kabar Harian Kompas, kemudian disusul dengan tipe liputan multi sisi, dan kemudian tipe liputan satu sisi. Sedangkan pada Koran Tempo posisi teratas yaitu tipe liputan dua sisi, sebanyak 27 berita atau 54 % , disusul dengan tipe liputan satu sisi, kemudian tipe liputan multi sisi.
7. Sensasionalisme pada kedua Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dinyatakan rendah. Artinya bahwa netralitas dalam penulisan berita, pada kedua surat kabar tersebut dinyatakan tinggi dan berada pada kategori baik. Dari 37 berita yang diteliti pada Surat Kabar Harian Kompas mengenai kasus mafia pajak Gayus Halomoan P Tambunan, sebanyak 1 berita atau 3 % mengandung sensasionalisme, dan 36 berita atau 97 % dinyatakan tidak mengandung sensasionalisme. Pada Koran Tempo, dari 50 berita yang diteliti, sebanyak 1 berita atau 2 %

mengandung sensasionalisme, dan 49 berita atau 98 % tidak mengandung sensasionalisme.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas isi berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo, dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi hal-hal yang tampak, dan tidak memedulikan hal-hal yang tidak tampak. Oleh karena tidak mempedulikan yang tidak nampak, maka dalam penelitiaan dengan metode analisis isi harus benar-benar memperhatikan dimensi dan unit analisis sebagai acuan dalam penelitian. Dimensi dan unit analisis yang digunakan sebagai acuan harus digali secara mendalam.

Dalam membuat definisi operasional harus dikemukakan secara jelas mengenai batasan-batasan untuk setiap unit analisisnya, agar pengkoding lain selain peneliti bisa mendapatkan pengertian yang sama dengan yang diharapkan oleh peneliti. Selain melakukan penelitian, hendaknya melakukan pra penelitian, agar peneliti mengetahui apakah alat yang akan digunakan sebagai penelitian (*coding sheet*) sudah memenuhi ambang reliable.

LAMPIRAN 1

BERITA KASUS MAFIA PAJAK GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN

DI SURAT KABAR HARIAN KOMPAS

KOMPAS, SELASA, 2 NOVEMBER 2010

KASUS GAYUS TAMBUNAN

Dakwaan Tak Terkait Mafia

JAKARTA, KOMPAS — Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Gayus HP Tambunan terkait perkara pajak PT Surya Alam Tunggal dinilai terlalu dipaksakan dan tidak memiliki dasar pidana yang jelas. Perkara itu dinilai juga tidak ada kaitannya dengan perkara mafia pajak yang melibatkan Gayus.

"Perkara pajak PT SAT merupakan perkara yang absurd. Tidak ada tindak pidana yang dilakukan Gayus dalam perkara ini. Gayus tidak menerima uang sepeser pun dari wajib pajak. Perkara ini hanya dibuat-buat karena ada tekanan untuk mengungkap kasus mafia pajak," kata kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, seusai persidangan terdakwa Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (1/11). Majelis hakim diketuai Albertina Ho, sementara tim JPU dipimpin Uung Abdul Syakur.

Menurut Buyung, tidak tepat jika perkara PT SAT dipakai untuk membongkar kasus mafia pajak mengingat perkara tersebut tidak terkait dengan asal-usul uang Gayus senilai Rp 25 miliar yang pernah diblokir polisi dan diduga berasal dari wajib pajak.

Dalam persidangan kemarin, saksi Direktur Utama PT SAT Hindarto Gunawan mengatakan, pajak PPN yang dibayar PT SAT pada 2004 pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Bagian Timur dianggap berlebih. Hindarto pun membuat surat permohonan keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, yang kemudian didisposisikan kepada Gayus sebagai peneliti keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding. (FAJ)

KOMPAS, JUMAT, 19 NOVEMBER 2010

KASUS GAYUS

Korupsi Membudaya di Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Kasus suap yang diduga dilakukan Gayus HP Tambunan hingga tiga episode, mulai dari saat dia menangani kasus pajak, saat bebas dari jeratan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, hingga terakhir keluar dari rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menunjukkan bahwa suap atau korupsi sudah membudaya di kalangan birokrat dan penegak hukum. Reformasi birokrasi yang digulirkan lebih dari 10 tahun terakhir tidak mampu membendung budaya suap itu.

Demikian pokok pikiran yang disampaikan Ketua Forum Rektor Indonesia Chairil Effendy dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki saat dihubungi secara terpisah, Kamis (18/11).

"Gayus bisa melakukan itu karena suap menjadi pemandangan sehari-hari, mentradisi, dan mengakar kuat di birokrat dan aparat penegak hukum. Gayus paham betul hal itu dan memanfaatkannya tanpa ada ketakutan karena semua bisa dia bayar," kata Teten.

Menurut Chairil, perilaku suap yang diduga dilakukan Gayus hingga tiga episode itu sulit diterima akal sehat. Hal itu terjadi karena situasi di birokrasi dan aparat penegak hukum memungkinkan Gayus melakukan hal tersebut.

DK 0009 4320

"Aparat penegak hukum begitu lemah terhadap kultur sogok-menyogok. Apa yang dilakukan Gayus juga dilakukan yang lain dan dia hanya mencontoh saja," katanya.

Persoalan karakter penyelenggara negara yang terbentuk karena suap yang mentradisi dan membudaya itu, menurut Chairil, sangat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Tindakan suap dan korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sudah sampai pada taraf krisis sehingga perlu perbaikan secara menyeluruh.

Kasus suap di rutan Markas Komando Brimob, menurut Teten, semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan profesionalisme polisi. Untuk mengembalikan kepercayaan publik itu, Kepala Polri harus tegas mencopot, memecat, dan menindak polisi yang nakal. Tidak hanya polisi yang terkait dengan keluarnya Gayus dari rumah tahanan, tetapi juga polisi yang terkait pada kasus Gayus di episode pertama dan kedua. (WHY)

KOMPAS, SABTU, 20 NOVEMBER 2010

PERKARA GAYUS TAMBUNAN

Satgas: KPK Bisa Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi bisa turun tangan menangani kasus keluarnya bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang juga terdakwa kasus korupsi dan pemberian keterangan palsu yang diduga terkait mafia hukum, Gayus HP Tambunan, dari rumah tahanan. KPK bisa masuk dengan melakukan pendampingan atau supervisi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus itu.

"KPK bisa melakukan supervisi. Tetapi, ya atau tidak, tanya ke KPK," kata anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, setelah diskusi di Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Jumat (19/11).

Ia menegaskan, tak tertutup kemungkinan penanganan kasus Gayus dilakukan Polri dan KPK. Tindak pidana korupsi ditangani KPK, sementara pencucian uang oleh polisi.

Selain itu, Satgas merencanakan memeriksa Gayus dan orang-orang yang terlibat dalam perkara keluarnya Gayus dari Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi hasil investigasi yang dilakukan Satgas serta mengungkap yang dilakukan Gayus di Bali. Hasil investigasi akan dipublikasikan pekan depan.

Secara terpisah, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, Satgas masih mengolah informasi yang menyebutkan Gayus bepergian ke Bali. Namun, Satgas belum menemui Gayus. Satgas tetap fokus pada masalah mafia perpajakan, dan bukan melebar ke masalah yang lain.

Namun, Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, kasus Gayus sebaiknya tetap ditangani Polri. KPK masih disibukkan oleh penanganan perkara korupsi yang

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Satgas: KPK Bisa Turun Tangan

(Sambungan dari halaman 1)

banyak jumlahnya di negeri ini.

"KPK harus bekerja keras dalam pekerjaan lain yang berkaitan dengan korupsi. Kalau KPK masih punya waktu, silakan ambil alih dari kepolisian," ujar Marzuki. Namun, ia menambahkan, banyak pengaduan kasus korupsi yang kini masih harus ditangani KPK.

Perintah Presiden

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengevaluasi penanganan kasus dugaan mafia pajak yang terkait dengan Gayus. Polri tak dapat membatasi kasus atau terfokus pada kasus keluarnya Gayus dari Rutan Brimob.

Menurut Bambang, kasus dugaan mafia pajak, termasuk kasus Gayus keluar dari rutan, seharusnya menjadi pintu masuk untuk memberantas mafia hukum dan mafia pajak. "Tidak mungkin, Gayus bekerja sendiri. Dalam kasus mafia pajak, ada perusahaan besar dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga terlibat," katanya.

Karena itu, kata Bambang, Badan Reserse Kriminal Polri perlu membongkar dugaan kasus mafia pajak di balik kasus Gayus.

Johnson Panjaitan dari Indonesia Police Watch pun menilai kepolisian sulit diharapkan dapat membongkar kasus dugaan mafia pajak yang terkait dengan Gayus. Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono perlu memerintahkan Kepala Polri mengevaluasi penanganan dugaan mafia pajak dan melaporkan hasilnya.

Dari evaluasi itu, lanjut Johnson, Presiden perlu membentuk tim gabungan, baik dari KPK, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, maupun intelijen, untuk membongkar dugaan mafia pajak yang terkait dengan Gayus. Tim dapat dipimpin oleh KPK.

Menurut Johnson, ada indikasi beberapa kali Gayus keluar dari rutan. "Gayus ke mana jika keluar dari rutan? Apa keperluannya? Apa motifnya ke Bali," ujar Johnson.

Johnson menambahkan, yang memiliki masalah pajak dan meminta bantuan Gayus mencapai 147 perusahaan. Ini pun perlu diperiksa.

Ranah politik

Ketua DPR juga berharap kasus Gayus jangan dibawa ke ranah politik. Proses hukum harus ditegakkan dalam pengusutan kasus itu.

Sebaliknya, Hendardi dari Setara Institute mencemaskan penanganan kasus Gayus akan menambah bobrok penegakan hukum dan makin merugikan publik. Kekhawatiran ini muncul karena ia curiga, Gayus merupakan mainan baru pemerintah. Ini terlihat dari Satgas yang aktif menangani Gayus.

"Agar tidak menjadi bulan-bulanan politik, kasus Gayus sebaiknya ditangani oleh KPK," katanya. (NTA/HAR/FER/NWO)

KOMPAS, SENIN, 22 NOVEMBER 2010

PERKARA GAYUS

KPK Hanya Supervisi dan Berkoordinasi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung kurang antusias menangani kasus korupsi bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan. KPK hanya bisa berkoordinasi dan menyupervisi Kepolisian Negara RI dalam menangani kasus itu.

Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Minggu (21/11), mengatakan, "Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah koordinasi dan supervisi. Kecuali ada kasus baru lain yang bisa ditemukan atas penyalahgunaan wewenang oleh Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara."

Baca Juga
Perkara Gayus

Presiden Mesti Memandu Langsung
HAL 2

Setelah terbongkar keluar dari Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Polri, Polri menetapkan Gayus Tambunan sebagai tersangka dalam penyuapan sembilan petugas Rutan Brimob. Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Mabes Polri (*Kompas*, 20/11).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, lembaganya hanya akan mengambil kasus Gayus kalau Polri tidak mampu lagi menanganinya. "Kalau enggak mampu, kami ambil. Kalau mereka mampu menangani, ya silakan," katanya.

Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap mendesak agar kasus tersebut ditangani KPK. "Banyak indikasi menunjukkan polisi tidak serius menangani perkara ini. Sebaiknya ditangani KPK," kata peneliti ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Menurut Donal, keluarnya Gayus dari Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu bukti ketidakseriusan Polri dalam menangani kasus itu.

Alasan lain mengapa kasus Gayus harus ditangani KPK karena banyak keganjilan selama kasus tersebut ditangani Polri. Kejanggalan paling menonjol dimulai dengan adanya desain sistematis untuk mengerdilkan perkara ini. Donal mempertanyakan, mengapa Gayus justru dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara hanya Rp 570.952.000 dan bukan pada kasus utama, yakni kepemilikan rekening Rp 28 miliar dan deposito Rp 75 miliar.

Koordinator Divisi Hukum ICW Febri Diansyah mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memerintahkan Kepala Polri untuk bekerja sama dengan KPK.

Hal itu tersurat pada Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang KPK, bahwa dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. (AIK)

KOMPAS, SENIN, 22 NOVEMBER 2010

Presiden Mesti Memandu Langsung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mesti memandu langsung pengungkapan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan. Tanpa pengawalan Presiden, jaksa dan polisi akan mudah dikeroyok oleh para pemegang kepentingan.

"Campur tangan Presiden sangat penting karena kasus Gayus banyak dimensi politiknya. Jaksa Agung dan Kepala Polri bisa dikeroyok partai politik, DPR, dan pengusaha-pengusaha hitam pengemplang pajak yang ingin menyelamatkan diri," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai memberikan kuliah politik hukum kepada mahasiswa Pascasarjana Program Ilmu Hukum di Universitas Lampung, Sabtu (20/11).

Mahfud khawatir, kalau Presiden tidak campur tangan, pengungkapan kasus mafia pajak hanya akan berhenti di Gayus Tambunan seorang diri. "Jaksa Agung dan polisi akan sulit menerobos kepungan (konflik kepentingan)," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, ini.

Desakan agar Presiden Yudhoyono campur tangan dalam penanganan kasus Gayus juga dikemukakan Akbar Faizal, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Minggu, dalam diskusi di Doekoen Cafe, Jakarta, dengan tema "Destruksi Penegakan Hukum oleh Presiden SBY: Dari Kriminalisasi KPK hingga Gayus, Tak Ada yang Tuntas".

Akbar Faizal menggarisbawahi, dalam kasus Gayus, di mana seorang tahanan bisa 68 kali keluar-masuk seenaknya, ini berarti ada yang salah dalam penyelenggaraan oleh aparat negara. Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono sebagai pemimpin harus kuat dan kredibel.

"Misalnya Presiden mengultimatum jaksa, kasus ini harus selesai dalam waktu satu minggu atau Jaksa Agung dipecat," kata Akbar.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mendesak polisi untuk mengungkap pengemplang pajak. "Alangkah baiknya penyidikan dilakukan secara menyeluruh," kata Didi Irawadi.

(EDN/JON/TRA)

KOMPAS, SELASA, 23 NOVEMBER 2010

DUGAAN MAFIA PAJAK

KPK Minta Ikut Tangani Kasus Gayus

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menangani kasus dugaan mafia pajak Gayus HP Tambunan. Pimpinan KPK sudah meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk ikut menangani kasus itu.

DK 0009 4339

"Kami sudah minta pertemuan dengan Kapolri untuk mengoordinasikan masalah Gayus," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto di Jakarta, Senin (22/11).

Permintaan untuk bertemu Kapolri, kata Bibit, sudah dilayangkan KPK sejak pekan lalu. "Waktunya terserah Kapolri," kata Bibit.

Ia menegaskan, KPK siap menangani kasus Gayus. "Namun, kami koordinasikan dulu apa yang sudah dikerjakan Polri dan mana yang bisa dilanjutkan KPK. Itu akan kami koordinasikan. Kami, kan, selalu berkoordinasi dengan alat penegak hukum lain," katanya.

Bibit menambahkan, KPK telah memiliki banyak bahan terkait perkara Gayus. "Banyak

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

KPK Minta Ikut Tangani Kasus Gayus

(Sambungan dari halaman 1)

(bahan). Dari Anda (media) juga sudah ada," kata Bibit.

Sebelumnya Polri menyatakan, KPK tidak akan sanggup menangani perkara Gayus karena sudah menangani banyak kasus lain. Menanggapi hal itu, Bibit mengatakan, "Ya lihat saja nanti. Mampu atau tidak. Selama ini KPK mampu atau tidak?"

Pelimpahan pemeriksaan kasus Gayus kepada KPK, kata Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas di Bandung, bisa menjadi jalan terakhir untuk mengungkap kasus dugaan mafia hukum. Cara itu dilakukan apabila polisi tidak kunjung mencari titik terang terkait kasus itu. "Pelimpahan itu bisa dilakukan oleh Presiden kepada Komisi Pemberantasan Korupsi demi penegakan hukum," kata Busyro.

Busyro berpendapat, saat ini semua pihak masih menunggu langkah polisi menindaklanjuti kasus Gayus. Jika dalam jangka waktu yang dijanjikan Kapolri tidak juga menemukan titik terang, intervensi Presiden harus segera dilakukan. Menurut Busyro, pelimpahan pemeriksaan kepada KPK adalah jalan tertinggi dan terakhir. Ia berharap keterlibatan KPK bisa memberikan titik terang dalam penyelesaian kasus tersebut.

PN Jakarta Selatan memutuskan memindahkan Gayus dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ke Rutan Cipinang Kelas I, Jakarta Timur.

Ketua majelis hakim yang mengadili Gayus, Albertina Ho, mengatakan, pemindahan dilakukan karena Rutan Brimob kurang kondusif. Di tempat itu Gayus diduga menyuap penjaga rutan sehingga bisa bebas keluar rutan tanpa izin pengadilan.

Pemindahan Gayus dilakukan pada Senin malam. "Kejari Jaksel langsung melaksanakan penetapan majelis hakim untuk memindahkan Gayus," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Yusuf.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap mengatakan, Kejagung menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara suap dengan tersangka Gayus. Kejagung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Badan Reserse Kriminal Polri.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi di Pontianak mengatakan, pengumpulan data dan keterangan mengenai keluarnya Gayus dari Rutan Brimob dan pergi ke Bali sudah selesai. Ito menegaskan, hasil penyidikan itu hanya dipaparkan saat persidangan.

"Tim yang dibentuk Polri untuk mengklarifikasi isu-isu yang terkait dengan masalah penanganan keluarnya Saudara Gayus dan kepergiannya ke Bali hari ini (Senin) sudah menyelesaikan tugasnya," katanya. Ito menjelaskan, tim sudah meminta keterangan sejumlah pihak, antara lain sopir dan pemilik kendaraan yang disewa Gayus.

Terkait soal perpajakan yang seolah-olah tidak ditindaklanjuti oleh Polri, Ito mengemukakan, tim khusus yang dibentuk sebagai tim independen masih melakukan tugasnya. "Rencananya, Senin atau Selasa, tim akan menyampaikan paparan kepada Kapolri terkait apa yang sudah dilakukan. Jadi, penyidik tidak hanya berdasarkan pengakuan karena akan melanggar asas praduga tak bersalah," kata Ito.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan pengumpulan dan pengolahan data terkait kepergian Gayus ke Bali sudah mencapai 80 persen. "Data itu macam-macam, misalnya kepergian Gayus dengan siapa saja, itu salah satunya," katanya.

Namun, hingga kini belum tampak adanya indikasi pertemuan Gayus dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali. "Belum tampak, sampai sekarang (indikasinya) itu," kata Kuntoro.

Di Karangasem, Bali, kemarin, Aburizal menegaskan pihaknya harus berhati-hati menanggapi segala hal mengenai kepergian Gayus ke Bali yang dikaitkan dengan dirinya. "Ini intrik politik," ujarnya. Menurut dia, kasus Gayus ke Bali adalah serangan politik dengan tiga tujuan, yaitu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, institusi Polri, dan kepada dirinya.

(AHA/AYS/CHE/HAR/AIK/FAJ)

Lihat Juga Video "Kuasa Hukum Setuju Gayus ke KPK" di vod. kompas.com/gayuskpk

KOMPAS, RABU, 24 NOVEMBER 2010

SBY: Gayus Ditangani Polisi

KPK Bertemu Pimpinan Polri

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini kredibilitas Kepolisian Negara RI untuk menuntaskan perkara korupsi dengan terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Presiden memercayakan penanganan kasus itu kepada Polri hingga ke pengadilan.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (23/11). Ia menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menangani perkara Gayus. "Presiden tentu memercayakan sepenuhnya. Sistem sudah bekerja dan kepolisian akan menyelesaikan kasus ini secara baik, sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Menurut dia, Presiden yakin Polri tetap institusi yang kredibel. Kisah keluarnya Gayus dari Rumah Tahanan (Rutan) Brimob, Kelapa Dua, Depok, sebatas ulah oknum kepolisian.

Secara terpisah, Kastorius Sinaga, penasihat ahli Kepala Polri, pun mengatakan, Polri tidak akan menyerahkan penanganan dugaan kasus mafia pajak terkait Gayus. Polri mampu menangani kasus itu. Namun, Polri masih membutuhkan alat bukti.

Sebaliknya, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Selasa, mempersilakan KPK menangani kasus mafia hukum yang melibatkan Gayus. Selain Polri dan Kejaksaan Agung, KPK ditetapkan sebagai penegak hukum pula.

"Silakan saja KPK menanganinya," papar Kuntoro.

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono juga tak keberatan jika kasus Gayus diambil alih KPK. Namun, pengambilalihan hanya dilakukan untuk kasus yang belum ditangani Polri. "Jika lebih baik, silakan saja," katanya.

Darmono menjelaskan, pengambilalihan perkara oleh KPK, yang sedang ditangani Polri atau Kejaksaan, memang dimungkinkan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak sependapat jika kasus yang diambil alih KPK adalah kasus penyuapan Gayus kepada petugas Rutan Brimob. Kasus itu sudah ditangani secara benar oleh polisi.

Ia menyarankan, KPK menangani kasus suap kepada Gayus dari tiga perusahaan besar yang sampai saat ini belum disentuh polisi dan jaksa. "Lagi pula, datanya sudah ada," kata Mahfud.

Ia menambahkan, KPK tak perlu minta persetujuan Kepala Polri untuk menangani kasus suap pembayar pajak kepada Gayus. "Orang tidak perlu ribut. Langsung saja KPK ambil alih. Bisa kok," katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi S, pun menegaskan, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengambil alih kasus Gayus. Jika dicermati sejak awal hingga di persidangan, ada kesan kasus pajak tak diusut tuntas oleh Polri.

"Demi kepentingan bangsa, tak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengambil alih kasus Gayus itu," katanya.

KPK bertemu Polri

Di Mabes Polri, Selasa, pimpinan KPK bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Mereka sepakat membahas kasus Gayus dalam rapat teknis, untuk menentukan bagaimana solusi terbaik dalam penanganan kasus itu.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto seusai pertemuan itu menuturkan, dalam waktu dekat mereka akan melakukan rapat koordinasi teknis tentang masalah Gayus.

"Apakah solusinya diambil alih KPK, atau perkuat penyelidikan dan penyidikan Polri, atau yang belum ditangani (Polri) akan kami tangani, nanti akan dibahas lagi," kata Bibit.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menambahkan, kasus Gayus memang dibahas, tetapi belum sampai masalah teknis. Pertemuan itu juga membahas kerja sama KPK dan Polri ke depan.

Bibit mengakui, Polri akan melanjutkan penyelidikan atas dugaan kasus penyuapan terhadap Gayus yang diduga dilakukan perusahaan besar. Dalam menangani kasus penyuapan kepada petugas Rutan Brimob, Polri berkoordinasi dengan KPK.

Timur menambahkan, Polri akan meningkatkan kerja sama dengan KPK untuk menangani kasus yang berkaitan dengan korupsi. "Jika perlu, digelar dengan KPK. Saya kira, itu bagian dari kerja sama itu," katanya.

Menurut Timur, semua fakta persidangan yang terkait dengan kasus Gayus tetap ditindaklanjuti oleh kepolisian. "Kita bicara fakta persidangan itu, tentu ditindaklanjuti. Artinya, polisi sedang melakukan penyelidikan," katanya.

Timur menepis anggapan, Polri mandek dalam mengusut kasus dugaan penyuapan oleh perusahaan besar terhadap Gayus. "Saya kira tak ada kasus yang mandek. Jika informasi lengkap, kami akan cepat. Namun, kalau tak mau kerja sama, susah," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan dugaan kasus praktik mafia pajak terkait Gayus tetap ditangani Polri. "Kami komitmen selesaikan. Saya kira, itu bukan baru kami tindak lanjuti, tetapi kami sudah melangkah," lanjutnya.

Akan tetapi, Timur tidak dapat menargetkan kapan kasus dugaan mafia pajak itu bisa tertangani. "Semua tergantung dari kerja sama, termasuk yang akan memberi informasi," katanya.

Ia mengaku tidak ada tekanan politis dalam menangani dugaan kasus praktik mafia pajak.

Selasa, Milana Anggraeni (30), istri Gayus Tambunan (31), untuk pertama kali menjenguk suaminya di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Ia datang pukul 09.30, diantar sopirnya, dengan mobil Ford Everest hitam bernomor polisi B 96 BG. Ia keluar dari rutan pada pukul 12.50.

(DAY/ANA/WIN/NWO/WHY/AIK/FER/HAR)

KOMPAS, KAMIS, 25 NOVEMBER 2010

PERKARA GAYUS

KPK Tak Perlu Ragu

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga otonom yang bisa mengambil alih perkara yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kejaksaan. Kewenangan itu dijamin dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh karena itu, KPK tidak perlu ragu apabila ingin mengambil alih penanganan perkara korupsi, yang diduga terkait dengan mafia hukum dan mafia pajak, dengan terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan.

Demikian dikatakan pengamat hukum tata negara Irmanputra Sidin dan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Saldi Isra, Rabu (23/11) di Jakarta. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki pun mengatakan, KPK tak harus mendengarkan dan terpengaruh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjelaskan, Presiden meyakini kredibilitas Polri dalam menangani perkara Gayus (*Kompas*, 24/11).

Teten, bersama Koalisi Sipil, Rabu, mempertanyakan pernyataan Presiden itu. Kasus Gayus diharapkan menjadi kunci pembuka mafia hukum. Itu terlalu besar jika hanya ditangani Polri. Sikap Koalisi Sipil disampaikan saat bertemu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta. Koalisi mendorong KPK menangani kasus Gayus itu.

"Tidak perlu takut. Kalau mau ambil alih, KPK ambil alih saja," kata Irmanputra.

Saldi menambahkan, tidak ada hubungan antara Presiden dan KPK dalam hal pengambilalihan kasus, dari kepolisian atau kejaksaan. KPK tetap bisa mengambil alih kasus Gayus meski Presiden berpendapat kasus itu sebaiknya tetap ditangani Polri.

Jangan matikan Polri

Secara terpisah, Rachland Nashidik, Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, menilai Presiden tetap memercayai polisi dalam penanganan kasus Gayus sebaiknya dibaca dari sisi realisme politik, yakni Presiden tidak mungkin menyatakan tak memercayai aparatnya sendiri. Namun, Presiden tidak pernah memerintahkan Polri mempertahankan penanganan kasus Gayus.

Rachland menyatakan, Jubir Kepresidenan sebenarnya bermaksud menyampaikan ulang, Presiden sebagai otoritas politik tak pernah mengizinkan dirinya mencampuri urusan hukum. Dengan kata lain, Presiden meyakini proses hukum harus tunduk pada perintah UU, termasuk dalam penanganan kasus Gayus.

Irman pun menilai, tepat jika Presiden tetap memercayai Polri untuk menangani kasus Gayus. Presiden justru keliru jika memerintahkan penyerahan kasus Gayus ke KPK. Hal itu sama saja mendelegitimasi polisi. Padahal, kepolisian berada di bawahnya.

Bagi Irman, menyerahkan kasus Gayus ke KPK sama dengan mematikan institusi Polri. "Jika dianggap Polri belum optimal, tugas Presiden untuk mengoptimalkannya. Bukan meminta sebuah kasus ke KPK," ujarnya.

Namun, Todung Mulya Lubis dari TII menegaskan, kasus Gayus adalah puncak gunung es, dan terlalu besar untuk ditangani polisi.

Juru Bicara Satgas Denny Indrayana mengatakan, dari awal sejak menemukan kasus Gayus, sebenarnya sudah berkoordinasi dengan KPK. Polri pun sudah berkoordinasi dengan KPK.

(ANA/DAY/AIK/OIN/FER/WHY)

KOMPAS, KAMIS, 25 NOVEMBER 2010

KEPERGIAN GAYUS

Satuan Tugas Temui Penyidik Polri

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bertemu dengan penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (24/11). Satgas ingin menggali informasi mengenai dugaan kasus penyuapan oleh terdakwa perkara korupsi dan pemberian keterangan palsu terkait mafia hukum, Gayus HP Tambunan, kepada penjaga rumah tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Satgas juga ingin mengetahui kaitan kasus itu dengan dugaan kasus mafia perpajakan. Demikian diungkapkan Sekretaris Satgas Denny Indrayana seusai bertemu tim penyidik di Bareskrim Polri. Denny didampingi anggota Satgas, Mas Achmad Santosa.

"Kami bertemu dengan Provost dan penyidik Bareskrim Polri yang menangani sembilan tersangka. Pada dasarnya, Satgas mengumpulkan data dan informasi. Kami lebih melengkapi data yang dimiliki Satgas dan membandingkan dengan data yang dimiliki kepolisian," kata Denny.

Menurut Denny, dugaan kasus penyuapan oleh Gayus terhadap penjaga rutan dan kepergian Gayus ke Bali dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus secara keseluruhan. "Data itu tak hanya terkait kasus keluar dari rutan, tetapi juga bagaimana dapat dihubungkan dengan kasus sebelumnya. Tujuan utamanya, membongkar dan menuntaskan praktik mafia pajak yang terkait Gayus Tambunan," ujarnya.

Denny menambahkan, banyak informasi yang diperoleh dalam pertemuan dengan penyidik. Namun, Denny belum ingin menjelaskan informasi apa yang telah diperoleh.

Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengakui Satgas bertemu dengan penyidik. Satgas pada dasarnya ingin mencari informasi lebih jauh mengenai dugaan penyuapan oleh Gayus terhadap penjaga rutan Brimob.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta Kepala Polri memeriksa anggota Satgas karena diduga menggiring soal suap pajak dalam perkara Gayus ke perusahaan Grup Bakrie. Ia berjanji mempersoalkan dugaan itu saat Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Polri pada 29 Oktober 2010. (FER/NWO)

KOMPAS, SABTU, 27 NOVEMBER 2010

MAFIA PAJAK

Gelar Perkara Perlu Libatkan Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI bersama instansi terkait akan melakukan gelar perkara dugaan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan. Dalam gelar perkara itu diharapkan pihak Ditjen Pajak proaktif memberikan informasi dan masukan terkait dugaan kasus mafia pajak kepada aparat penegak hukum.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi di Jakarta, Jumat (26/11). "Gelar perkara juga melibatkan pihak Ditjen Pajak, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Ito.

Ito menjelaskan, dugaan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan terdakwa Gayus sebenarnya sudah masuk ke ranah manipulasi pajak. Oleh karena itu, Polri tidak dapat masuk lebih jauh untuk menyelidiki atau menyidik dugaan kasus tersebut.

Dalam gelar perkara, lanjut Ito, Polri, KPK, kejaksaan, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan memetakan penanganan dugaan kasus mafia pajak yang terkait Gayus Tambunan selama ini.

"Kita akan sampaikan, apa yang sudah kita lakukan, apa hambatannya, dan apa yang perlu dilakukan," kata Ito. Dari pemetaan itu diharapkan dapat diketahui dugaan kasus apa yang dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain, seperti KPK atau kejaksaan.

Selama ini, menurut Ito, Polri memang baru berfokus pada penanganan dugaan kasus mafia hukum, seperti dugaan penyuapan terhadap oknum-oknum penegak hukum. Untuk penanganan dugaan kasus mafia pajak tidak mudah.

Penasihat Ahli Kepala Polri Kastorius Sinaga mengatakan, Polri memang agak sulit menangani dugaan kasus manipulasi pajak atau mafia pajak.

Ia menambahkan, kasus Gayus Tambunan sangat kompleks karena tidak hanya terkait dengan dugaan kasus penyuapan, tetapi juga manipulasi pajak.

(FER)

KOMPAS, SABTU, 27 NOVEMBER 2010

PERKARA GAYUS TAMBUNAN

Satgas Koordinasi dengan KPK

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengoordinasikan penanganan perkara mafia pajak terkait mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Jumat (26/11). Itu dilakukan menyusul rencana gelar perkara penanganan perkara Gayus yang akan melibatkan penegak hukum, termasuk KPK.

"Selasa depan akan ada gelar perkara Gayus di Badan Reserse Kriminal Polri. Yang diundang adalah KPK, Satgas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kejaksaan Agung," kata juru bicara Satgas, Denny Indrayana.

Oleh karena itu, papar Denny, Satgas perlu berdiskusi dan bertukar informasi dengan KPK agar gelar perkara nanti lebih mendalam. "Agar perkara ini bisa ditangani lebih baik dan bisa tuntas," katanya lagi.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, dari awal KPK menyatakan siap ikut menangani perkara Gayus. "Semoga hari Selasa ada titik terang, siapa menangani apa. Tentu, berdasarkan alat bukti," ujarnya.

Bibit menegaskan, bagi KPK, siapa pun yang bersalah dalam perkara ini akan ditindak tegas.

Rekening Gayus

Menurut Denny, salah satu kunci mengungkap kasus itu adalah mengetahui asal uang Gayus. "Itu memang harus dituntaskan supaya tidak kemudian digeneralisasi semua yang wajib pajak memberikan uang," ungkapnya.

Diakui Denny, ada 149 perkara pajak yang ditangani Gayus. "Dan yang sering disebut adalah perusahaan Grup Bakrie," katanya.

Denny menambahkan, setidaknya ada beberapa hal yang mengaitkan perkara Gayus dengan Grup Bakrie yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Pertama, informasi munculnya Grup Bakrie disampaikan Gayus saat bertemu Satgas di Singapura. "Pertama kali Gayus bicara, ada uang mengalir dari Grup Bakrie kepada dia," paparnya.

Momen kedua, Gayus mengatakan di depan penyidik Polri yang menemui dia di Singapura. "Dia mengatakan, bagaimana kalau yang Grup Bakrie saya angkat. Di hadapan polisi itu tak ada Satgas, boleh cek lagi videonya," kata Denny.

Indikasi ketiga, kata Denny, pada saat diperiksa polisi, Gayus mengatakan lagi aliran dana itu. Kemudian, yang keempat, dalam sidang, Gayus juga mengungkapkan siapa yang memberi dana kepadanya, dan disampaikan termasuk dari Grup Bakrie.

(AIK)

KOMPAS, MINGGU, 28 NOVEMBER 2010

PERKARA GAYUS TAMBUNAN

Mara: Pernyataan Juru Bicara Satgas Tendensius

JAKARTA, KOMPAS — Juru bicara Aburizal Bakrie, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa menilai pernyataan Juru Bicara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana tendensius dan terkesan memiliki agenda mempolitisasi permasalahan hukum.

"Baik juga kalau polisi memeriksa Satgas karena dalam berbagai pernyataannya, Gayus Tambunan pun menyebutkan bahwa Satgaslah yang menggiring supaya masalah ini dikaitkan dengan Bakrie," kata Lalu Mara, Sabtu di Jakarta, menanggapi berita *Kompas*, Sabtu (27/11), halaman 4 dengan judul "Perkara Gayus Tambunan: Satgas Koordinasi dengan KPK".

Berita tersebut, menurut Mara, kurang adil karena pihak Bakrie tidak diberi kesempatan walaupun disebut berulang kali.

"Bahkan, kami menilai Satgas telah menuduh seolah-olah semua perusahaan Bakrie bermasalah soal pajak, padahal itu kan hanya beberapa perusahaan yang memiliki sengketa pajak. Sengketa pajak itu pun hal biasa," kata Lalu Mara.

Dalam berita itu disebutkan, menurut Denny, salah satu kunci mengungkap kasus itu adalah mengetahui asal uang Gayus. Di bagian lain, Denny mengakui, ada 149 perkara pajak yang ditangani Gayus. "Dan yang sering disebut adalah perusahaan Grup Bakrie," katanya.

Denny menambahkan, setidaknya ada beberapa hal yang mengaitkan perkara Gayus dengan Grup Bakrie yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Hormati hukum

Menurut Lalu Mara, proses hukum harus dihormati. "Denny kan orang hukum, pasti tahu bagaimana proses hukum itu sendiri harus berjalan dan dijalankan sesuai aturan dan perundang-undangan. Yang terjadi, Denny dan Satgas telah mengadili perusahaan Bakrie melalui media massa," katanya.

Padahal, menurut Lalu Mara, perusahaan tersebut adalah perusahaan publik. Laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor independen dan selalu diumumkan secara transparan melalui media massa.

Ia menambahkan, arus kas perusahaan publik jelas, untuk apa dan siapa serta kapan, itu semua jelas. (DIS)

KOMPAS, RABU, 1 DESEMBER 2010

KORUPSI

KPK Akan Ambil Alih Kasus Gayus

SURABAYA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengambil alih kasus Gayus HP Tambunan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Saat ini KPK masih menunggu hasil koordinasi dengan Polri, Direktorat Jenderal Pajak, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Mereka berupaya memetakan penanganan dugaan kasus mafia pajak terkait Gayus.

"Kami belum mengetahui apakah ada unsur korupsi atau tidak. Kalau memang ada, baru bisa kami ambil alih," ujar Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah seusai "Seminar Pemberantasan Korupsi" di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/11).

Chandra mengingatkan bahwa kasus yang melibatkan Gayus sangat kompleks. Hingga kini belum dipastikan arah tindakan pidana Gayus, apalagi gelar perkara yang semula direncanakan digelar di Mabes Polri ditunda. "Kami fokus ke tindak pidana korupsi sesuai wewenang KPK, itu saja," tutur Chandra yang didampingi Deputi Bidang Pencegahan KPK Guntur Kusmeiyano.

Chandra menolak menjelaskan lebih jauh sikap KPK sebelum memastikan dugaan kasus yang melibatkan Gayus. Menurut Guntur, bagaimanapun, kalau posisi kasus sudah jelas dan menunjukkan tindak pidana korupsi, sikap KPK jelas. "Sesuai undang-undang, kami bisa mengambil alih kasus," katanya.

Terlebih mengacu pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki kewenangan supervisi. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu KPK bisa mengambil alih kasus.

Dalam Pasal 9 disebutkan, pengambilalihan penyidikan dan penuntutan bisa dilakukan KPK, antara lain, apabila laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. "Kami bertindak sesuai undang-undang saja," ucap Chandra.

Sejauh ini Polri baru memfokuskan penanganan dugaan kasus mafia hukum, seperti dugaan penyuapan terhadap oknum penegak hukum. Penanganan dugaan kasus mafia pajak tidak mudah (*Kompas*, 27/11).

Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo belum bisa memastikan akan memanggil anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus Gayus.

Timur Pradopo, yang ditemui di sela-sela pembukaan Perkemahan Wira Karya 2010 di Seulawah, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, Selasa, mengatakan, pihaknya tidak bisa begitu saja memanggil dan memeriksa semua anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

"Kami butuh bukti dan fakta. Tidak bisa berdasarkan omong-omong saja," tuturnya.

Sabtu lalu, juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, meminta polisi memeriksa anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum karena mengaitkan dengan Grup Bakrie.

(BEE/MHD)

KOMPAS, SENIN, 6 DESEMBER 2010

Jangan Cuma Gratifikasi

Satgas Mendesak Kasus Gayus Dituntaskan dalam Koridor Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Polisi dinilai gagal menangani perkara Gayus HP Tambunan jika terus berkutat sebatas masalah gratifikasi. Sikap polisi tersebut menimbulkan spekulasi sekaligus kecurigaan tentang adanya upaya melindungi penyuap Gayus. Karena, pasal gratifikasi cenderung hanya menjerat penyelenggara yang menerima uang.

Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Didi Irawadi Syamsudin, Minggu (5/12), sikap polisi yang menangani sebatas gratifikasi itu menimbulkan spekulasi sekaligus kecurigaan tentang adanya upaya melindungi penyuap Gayus. "Pasal tentang gratifikasi rentan disiasati," ujar Didi.

Koordinator Divisi Hukum dan Pemantauan Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah juga mengkhawatirkan pernyataan Polri itu. "Pasal itu diduga digunakan untuk melindungi pemberi dana atau penyuap," katanya. Seharusnya, kata Febri, Gayus dijerat pasal penyuapan agar pemberi dan penerima bisa dipidana.

Didi mengatakan, sejak awal penanganan kasus Gayus memang tidak jelas. Ia mencontohkan tentang baru tertanganinya satu kasus PT SAT dengan kerugian negara senilai Rp 570,9 juta, seperti terungkap dalam dakwaan perkara pidana Nomor 1195/Pid/B/2010/PN.JKT.Sel. Sementara kasus utama, yaitu aliran dana senilai Rp 28 miliar dan *safe deposit box* senilai Rp 75 miliar, tidak disentuh.

Secara terpisah, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto dalam siaran pers, Sabtu (4/12), menyatakan, Satgas mendesak perkara Gayus dituntaskan dalam koridor hukum. Asal-usul uang Gayus juga harus dilacak sehingga tidak menimbulkan politisasi yang bisa menghilangkan jejak praktik mafia hukum.

Satgas juga membantah tuduhan sejumlah kalangan bahwa upaya mereka untuk menuntaskan kasus Gayus bernuansa politik. "Kami membantah tuduhan sebagai alat politik untuk menjatuhkan partai politik tertentu, orkestrator di balik kasus Gayus, termasuk menggiringnya kepada keterlibatan beberapa perusahaan milik Grup Bakrie," katanya.

Menurut Kuntoro, Satgas sejak awal tidak pernah berinisiatif mengungkapkan kepada publik tentang perusahaan wajib pajak yang diduga terkait kasus Gayus. Penyebutan beberapa perusahaan semata-mata disampaikan Satgas di bawah sumpah persidangan. Kuntoro mengatakan, justru Gayus yang menyatakan perusahaan Bakrie ketika bertemu Satgas di Singapura.

Menanggapi siaran pers Satgas, juru bicara keluarga Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, mengharapkan, Satgas tidak selalu mengaitkan kasus Gayus dengan Grup Bakrie karena ada ratusan perusahaan bernaung dalam Grup Bakrie. "Selain itu, secara struktural, Aburizal Bakrie tidak berada dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan," ujarnya. Ia menjelaskan, bila yang dimaksud Satgas adalah Bumi Resources, seperti disebut Gayus, perusahaan itu adalah perusahaan terbuka. (ANA/AIK/BUR)

KOMPAS, RABU, 8 DESEMBER 2010

PERKARA MAFIA PAJAK

PKB Usul Pansus Gayus

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mengusut dugaan kasus pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus Tambunan.

"Kami usul adanya panitia khusus agar kasus Gayus dapat terungkap tuntas dan tidak ditutup kasus lain. Dengan demikian, tidak ada beban negara dan mereka yang merasa didiskreditkan dapat menyampaikan sikapnya," kata Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar, Selasa (7/12), di Jakarta.

Marwan berencana, usul pembentukan pansus ini dapat diajukan ke Badan Musyawarah DPR sebelum dimulainya masa reses pada 18 Desember 2010.

Meski demikian, Marwan mengakui usulan itu belum dibicarakan di Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono atau Setgab.

Setgab yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKB menguasai 423 dari 560 kursi di DPR atau 75,5 persen.

Romahurmuziy, Sekretaris Fraksi PPP di DPR menilai usulan PKB itu tidak ada kaitannya dan tidak perlu dibicarakan di Setgab. "Jangan sampai Setgab malah disusupi mafia pajak karena membicarakan masalah itu," ujar Romahurmuziy.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, berharap, jika jadi terbentuk, pansus yang diusulkan PKB itu harus dapat membongkar berbagai modus kebocoran pajak dan kemudian memperbaikinya.

Secara terpisah, Kejaksaan Agung mengembalikan empat berkas perkara yang terkait kasus suap Gayus HP Tambunan di Rumah Tahanan Markas Korps Brigade Mobil Kelapa Dua Depok ke penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Kejaksaan meminta penyidik Bareskrim melengkapi berkas berdasarkan petunjuk yang diberikan Kejaksaan. "Empat berkas perkara dinyatakan belum lengkap sehingga dikembalikan ke penyidik Bareskrim Polri pada 6 Desember 2010," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap kemarin. (FAJ/NWO)

KOMPAS, KAMIS, 9 DESEMBER 2010

SIDANG PAJAK

Gayus Tetap Sebut Sumber Uang

JAKARTA, KOMPAS — Kendati berkali-kali dibantah kelompok Bakrie, terdakwa korupsi yang terkait mafia pajak dan mafia hukum, Gayus HP Tambunan, tetap mengaku menerima uang 3,5 juta dollar AS dari tiga perusahaan dalam kelompok Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal Tbk, PT Arutmin Tbk, dan PT Bumi Resources Tbk. Uang itu sebagai imbalan atas jasa Gayus membantu mengurus administrasi pajak ketiga perusahaan itu.

Demikian terungkap dalam sidang Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/12). Uang itu menjadi masalah ketika 2,8 juta dollar di antaranya, yang tersimpan di Bank Panin dan Bank BCA, diblokir Badan Reserse Kriminal Polri pada April 2009 karena terindikasi tindak pidana pencucian uang dan dicurigai hasil korupsi.

Di depan majelis hakim yang diketuai Albertina Ho, Gayus menceritakan, uang 3,5 juta dollar AS (setara Rp 35 miliar) itu sebagai imbalan dari tiga pekerjaan, yaitu mengeluarkan surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal Tbk yang tertahan. Ia pun mendapat 500.000 dollar AS (Rp 5 miliar. Kedua, Gayus membantu menyiapkan administrasi dan konsultasi kepada PT Bumi Resources Tbk yang akan menghadapi sidang banding pajak tahun 2005. Gayus mengaku mendapat 1 juta dollar AS (Rp 10 miliar). Ketiga, Gayus diminta Alif Kuncoro untuk meninjau pembetulan pajak yang dibuat PT KPC dan PT Arutmin tahun 2006. "Saya dapat 2 juta dollar AS," katanya.

Lalu Mara Satriawangsa, juru bicara keluarga Aburizal Bakrie, membantah pengakuan Gayus. "Sejak awal tidak ada satu pun bukti konkret hubungan Gayus dengan berbagai pihak yang disebutnya. Siapa pun yang menuduh harus bisa membuktikan," ujarnya. (FAJ)

KOMPAS, KAMIS, 9 DESEMBER 2010

Polri Tetap Tangani Kasus

Gelar Perkara Gayus Tambunan Mengecewakan

JAKARTA, KOMPAS — Penyidik Kepolisian Negara RI tetap menangani dugaan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan. Namun, Polri akan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain dan instansi lain untuk mengungkap dugaan kasus mafia pajak itu.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan seusai pertemuan gelar perkara koordinatif dengan instansi penegak hukum terkait penanganan dugaan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan terdakwa perkara korupsi Gayus Tambunan di Markas Besar Polri di Jakarta, Rabu (8/12).

Hadir dalam pertemuan itu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung M Amari, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja.

"Secara keseluruhan hasil rapat, kita sinergikan semua aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Gayus ini," kata Iskandar.

Menjawab pertanyaan wartawan, Iskandar menyatakan, pengambilalihan penanganan kasus tidak ada. "Bukan penyerahan, tetapi sinergi KPK, polisi, PPATK, BPKP, dari aparat terkait sesuai tugas masing-masing," katanya.

Denny mengungkapkan, dalam pertemuan itu, pihak Kejaksaan, KPK, PPATK, BPKP, ataupun Satgas menyampaikan masukan-masukan. Oleh karena itu, kata Denny, upaya bersama menuntaskan kasus tersebut telah disepakati dalam pertemuan itu. Ia menegaskan, KPK tidak mengambil alih penanganan kasus, tetapi kerja sama.

Akal-akalan

Gelar perkara ini kemarin mendapat berbagai kecaman. "Gelar perkara ini hanya akal-akalan," kata Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar di Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang, Polri sudah jelas gagal mengungkap kasus ini. Apalagi, terakhir, Polri juga menyatakan akan menjerat Gayus hanya dengan perkara gratifikasi, bukan penyuapan sehingga dinilai menutup peluang pengungkapan pihak penyuap. "Anehnya gelar perkara tetap menyatakan Polri yang akan tangani perkara ini. Saya duga ada kekuatan politik melindungi perusahaan-perusahaan besar yang diduga menyuap Gayus," kata Bambang.

Bambang kecewa dengan sikap Satgas Pemberantasan Korupsi yang dinilai tidak serius mendesak perkara ini diambil alih atau sebagian diserahkan ke KPK.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto sebenarnya berharap dengan gelar perkara ini, KPK bisa tahu seberapa jauh penanganan kasus itu. "Kemudian dikaitkan dengan ekspektasi masyarakat, mana yang bisa dikembangkan oleh KPK," kata Bibit Samad Rianto. (FER/AIK/WHY)

Penanganan Kasus Gayus Tambunan

Lembaga	Aksi
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum	• Meminta keterangan Gayus atas laporan Komjen Susno Duadji (19/3/2010) • Dua kali bertemu Gayus untuk mengungkapkan kasusnya (23-24/3/2010) • Bersama penyidik Polri membawa Gayus dari Singapura ke Indonesia (31/3/2010) • Bertemu penyidik Polri guna menggali informasi dugaan penyuapan oleh Gayus kepada penjaga Rutan Brimob (24/11/2010) • Berkoordinasi dengan KPK dalam penanganan perkara mafia pajak Gayus (26/11/2010)
Polri	• Memasukkan Gayus dalam daftar pencarian orang (25/3/2010) • Meminta Imigrasi untuk mencekal Gayus (26/3/2010) • Menemukan aset Gayus senilai hingga Rp 74 miliar yang disimpan dalam "safe deposit box" bank swasta di Jakarta.
Kejaksaan Agung	• Membentuk tim untuk melakukan eksaminasi atau penelitian ulang terhadap perkara Gayus (23/3/2010) • Berkas perkara Gayus HP Tambunan dinyatakan lengkap atau P21(14/6/2010). • Tim Pemeriksa Kejagung menemukan kebocoran rencana tuntutan (29/10/2010)
KPK	• Menyatakan siap menangani kasus dugaan mafia pajak Gayus (22/11/2010) • Mengusulkan gelar perkara tetap dilakukan (29/11/2010)
PPATK	• Menelusuri rekening Gayus, menemukan total uang senilai Rp 28 miliar (27/3/2010) • Rapat dengan Komisi III DPR membahas aliran dana Gayus Tambunan dan rekening yang mencurigakan (18/5/2010)

Sumber: Litbang Kompas

BESTARI

KOMPAS, JUMAT, 10 DESEMBER 2010

PERKARA PAJAK

Kejaksaan Tindak Lanjuti Kesaksian Gayus

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung menindaklanjuti kesaksian terdakwa korupsi Gayus HP Tambunan di persidangan yang menyebut dua mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum diduga menerima uang saat menangani perkara Gayus tahun 2009. Jaksa Agung Basrief Arief telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Jaksa Agung mengeluarkan surat perintah untuk menindaklanjuti pengakuan Gayus Tambunan yang diucapkan di depan persidangan guna mengecek kebenaran informasi tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap, Kamis (9/12) di Jakarta.

Saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, Gayus mengatakan, Haposan Hutagalung—pengacara yang mendampingi Gayus saat berperkara pada tahun 2009—meminta uang kepada Gayus untuk diberikan kepada Jaksa Agung Muda (JAM) Pidum. Gayus Tambunan lalu mengatakan, "Kan, sudah ada 500.000 dollar AS." Dijawab oleh Haposan, " Itu kan buat Ritonga, JAM Pidum lama. JAM Pidum baru kan belum." JAM Pidum yang menggantikan Abdul Hakim Ritonga adalah Kemal Sofyan.

Sebelumnya juga terungkap di sidang Gayus, para hakim, para jaksa, para polisi, dan tim pengacara akan mendapatkan masing-masing Rp 5 miliar sebagai jasa membantu membuka blokir rekening Gayus senilai Rp 28 miliar dan membebaskan Gayus saat diadili di PN Tangerang.

Namun, Haposan Hutagalung telah membantah di sidang bahwa dirinya tidak pernah memberikan uang kepada polisi, jaksa, dan hakim. Ia juga mengaku tidak menerima uang dari Gayus selain imbalan pengacara.

JAM Pengawasan Marwan Effendi mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya meminta keterangan Gayus Tambunan yang di sidang mengatakan telah memberikan uang kepada Haposan. Berikutnya, Marwan akan memeriksa Haposan. "Kami juga akan meminta keterangan Cirus Sinaga karena tidak mungkin Haposan langsung menyerahkan uang kepada Jaksa Agung Muda," kata Marwan. Jaksa Cirus Sinaga kini telah menjadi tersangka kasus pemalsuan surat rencana tuntutan perkara Gayus di PN Tangerang.

Marwan memperkirakan, pemeriksaan akan berjalan sulit karena Haposan pasti membantah keterangan Gayus. Namun, Marwan akan mencoba mencari bukti lain. "Kita bisa lihat siapa dulu yang menunjuk Cirus sebagai jaksa peneliti perkara Gayus," ujar Marwan. (FAJ)

KOMPAS, RABU, 15 DESEMBER 2010

PERKARA PAJAK

Komisi III Panggil Gayus

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman berencana memanggil mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus Tambunan untuk dimintai keterangan di Komisi III DPR. Langkah ini dilakukan jika Komisi Pemberantasan Korupsi belum juga mengambil alih kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus.

Namun, Benny tidak memberi batas waktu yang jelas bagi KPK untuk mengambil alih kasus mafia pajak itu. "Dalam satu-dua minggu ini, saya akan membicarakan masalah pemanggilan Gayus ini dengan teman-teman Komisi III," ujar Benny K Harman, politikus Partai Demokrat, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12).

Menurut Benny, pemanggilan Gayus dimaksudkan sebagai dorongan bagi KPK agar segera mengambil alih kasus mafia pajak itu dari kepolisian. Hal itu karena sebelumnya DPR telah merekomendasikan KPK untuk mengambil alih kasus itu. Pemanggilan oleh Komisi III DPR juga dimaksudkan agar publik mengambil bagian dalam pengawasan penuntasan kasus itu.

Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan, usulan pemanggilan Gayus belum pernah dibicarakan di komisinya. Meski demikian, Bambang menyatakan tidak menolak jika Gayus diundang ke Komisi III DPR untuk dimintai keterangan. Komisi III DPR berkepentingan membongkar kasus Gayus hingga tuntas.

Namun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menolak rencana komisinya memanggil Gayus. "Kasus ini sedang ditangani aparat penegak hukum. Jika ingin mendorong penuntasan kasus ini, Komisi III DPR seharusnya memanggil dan kemudian meminta Kepala Polri agar lebih serius mengusutnya. KPK juga perlu diminta lebih serius melakukan supervisi," kata Trimedya. (NWO)

KOMPAS, SELASA, 4 JANUARI 2011

Gayus Serang Penyidik

Para Petinggi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pajak Belum Tersentuh

JAKARTA, KOMPAS — Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, terdakwa korupsi pajak, suap, dan pemberi keterangan palsu, menilai tim penyidik independen yang memeriksa perkara dirinya tidak kesatria, tidak independen, dan kerap mengingkari janji.

Pasalnya, penyidik independen tidak mengusut tuntas kasus mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak dan mafia kasus di kepolisian dan kejaksaan yang melibatkan petinggi institusi tersebut. Padahal, menurut Gayus, dirinya telah membeberkan seluruh informasi mengenai perkara-perkara tersebut.

Demikian dikatakan Gayus saat membacakan pembelaan atau pleidoi pribadi setebal 18 halaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/1). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Albertina Ho dengan hakim anggota Tahsin dan Syaifoni. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Gayus hukuman penjara 20 tahun. Menurut jaksa, Gayus terbukti menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak yang diajukan PT Surya Alam Tunggal, terbukti menyuap polisi dan hakim, serta memberikan keterangan yang tidak benar soal kepemilikan uang Rp 28 miliar di rekeningnya.

Dalam pleidoinya, Gayus juga mengakui bahwa pemeriksaan tim independen sarat rekayasa. Bahkan, ia juga terlibat dalam rekayasa pembuatan sejumlah berita acara pemeriksaan, seperti dalam perkara pajak PT Surya Alam Tunggal dan penyuapan kepada hakim Muhtadi Asnun, yang membebaskannya saat berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang. "Saya menyesal telah mengikuti alur cerita yang diminta polisi dengan janji-janji muluk," kata Gayus.

Gayus mengatakan, langkahnya mengikuti alur penyidik dan memberikan informasi seluas-luasnya hanya bertujuan agar penyidik independen memiliki gambaran yang jelas sehingga bisa mengusut tuntas perkara, termasuk menyeret ke pengadilan para pejabat yang terlibat.

Namun, ia menyayangkan penyidik independen dan jaksa penuntut umum hanya menyeret orang kecil yang sebenarnya tidak punya wewenang, contohnya adalah dirinya, M Arafat Enanie, Sri Sumartini, dan Alif Kuncoro.

Bahkan, dalam beberapa kasus, kata Gayus, dirinya dijadikan tersangka atas perkara hasil rekayasa penyidik dan dirinya sendiri. Hasil rekayasa yang semula dibuat untuk menjerat para petinggi ternyata hanya akal-akalan untuk menjerat Gayus.

"Banyak kasus telah saya ceritakan kepada tim independen terkait dugaan keterlibatan pejabat-pejabat di Ditjen Pajak, termasuk juga dugaan permainan wajib pajak yang kemungkinan merugikan negara triliunan rupiah. Namun, tidak ada yang diangkat sama sekali," kata Gayus.

Gayus mencontohkan, kasus PT Surya Alam Tunggal sebenarnya hanya kasus yang dibuat-buat. Perkara itu dibuat sebagai pintu masuk bagi penyidik untuk memeriksa pejabat pajak nakal dan menyeret mereka ke pengadilan. Mengikuti skenario penyidik, Gayus pun menyeret atasannya, yakni Bambang Heru selaku Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak.

"Namun, apa yang terjadi, bukannya Bambang Heru yang ditangkap, malah saya dan Humala Napitupulu yang didakwa. Mungkin karena Humala orang kecil dan tidak ada *back up* serta dana melimpah, sementara Bambang Heru sebaliknya," ujar mantan pegawai pajak ini.

Gayus juga mempertanyakan mengapa pejabat Mabes Polri seperti Edmond Ilyas, Raja Erizman, Pambudi Pamungkas, dan juga Mardiyani tidak diproses lebih lanjut perkaranya. Padahal, peran mereka sangat terang benderang. Menurut Gayus, Edmond Ilyas yang berperan mengubah status Roberto Santonius dari tersangka menjadi saksi. Pambudi Pamungkas adalah pihak yang memberi izin pemeriksaan Gayus di luar Mabes Polri.

Kejaksaan Agung, kata Gayus, juga tidak memproses Cirus Sinaga, Fadil Regan, Poltak Manulang, dan Kemal Sofyan. "Padahal, peran mereka juga terang benderang," kata Gayus.

Dalam pleidoi yang dibacakannya, Gayus merasa tidak bersalah. Penasihat hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, saat membacakan pleidoi mengatakan, terjadi manipulasi hukum dengan hanya membatasi dakwaan kepada Gayus dan polisi tingkat bawah, sedangkan petinggi Polri tidak tersentuh. (FAJ)

KOMPAS, MINGGU, 9 JANUARI 2011

MAFIA HUKUM

Adnan Buyung: Gayus Tak Sendirian

JAKARTA, KOMPAS — Gayus HP Tambunan, mantan pegawai pajak yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi dan pemberian keterangan palsu, diminta membeberkan kepergiannya ke luar negeri. Gayus harus mengungkapkan di luar negeri ia bertemu siapa saja, termasuk kemungkinan untuk mengamankan asetnya, kalau benar-benar berniat membuka praktik mafia hukum dan mafia pajak di negeri ini.

Permintaan itu dikatakan Adnan Buyung Nasution, penasihat hukum Gayus, kepada *Kompas* di Jakarta, Sabtu (8/1). "Saya yakin Gayus tak sendirian. Ia bisa pergi ke mana-mana pasti ada yang membantu," katanya.

Seperti diberitakan, Gayus secara informal kepada penyidik Kepolisian Negara RI (Polri) mengaku pergi ke Makau, Singapura, dan Malaysia. Paspor yang dia pakai diduga dipalsukan. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Gayus mengaku bahwa Imigrasi Jakarta Timur tidak terlibat dalam pembuatan paspor atas nama Sony Laksono dengan foto mirip Gayus itu (*Kompas*, 7-8/1).

MYE

Adnan Buyung Nasution

Adnan Buyung mengakui, Gayus belum menceritakan kepadanya soal kepergiannya ke luar negeri September lalu. Sewaktu kedapatan bepergian ke Bali, November lalu, Gayus juga tak terbuka kepada penasihat hukumnya. Gayus tercatat 68 kali keluar dari selnya saat dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurut Adnan Buyung, lebih baik Gayus terbuka kalau berniat membongkar praktik mafia hukum dan mafia perpajakan. Apalagi, dalam kasusnya, ada saksi yang diduga terkait dengan perusahaan pemberi dana kepada Gayus, yang sampai kini belum ditangkap. Perwira tinggi Polri yang diduga mengetahui dan terlibat kasus dugaan korupsi dan penyelewengan pajak oleh Gayus juga belum terjamah hukum.

Adnan Buyung menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas untuk mendorong penuntasan kasus Gayus. Karena itu, ia akan meminta pengadilan memberikan penetapan agar kasus Gayus, terkait dengan mafia hukum dan mafia pajak, dibuka. Apalagi, kejaksaan dan kepolisian tidak bisa diharapkan lagi untuk menuntaskan kasus itu.

KPK ambil alih

Adnan Buyung juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengambil alih penanganan kasus Gayus. Namun, dia mendengar, KPK enggan mengambil alih kasus Gayus karena tak enak hati kepada Polri.

"KPK harus berani mengambil

(Bersambung ke hal 11 kol 1-3)

Adnan Buyung: Gayus Tak Sendirian

(Sambungan dari halaman 1)

alih kasus Gayus. Periksa petinggi Polri yang disebut-sebut terlibat kasus itu," katanya.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menilai, berlarut-larutnya penanganan kasus Gayus mengindikasikan ketidakmampuan Polri dan kejaksaan dalam menuntaskan perkara itu. Munculnya kasus baru, yakni Gayus diduga pergi ke luar negeri, makin menguatkan desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus Gayus.

Apalagi, Polri belum mengungkapkan secara gamblang apa motif kepergian Gayus dan siapa saja yang dia temui saat keluar dari Rutan Brimob. "Kasus ini sudah berlarut-larut. Tak hanya jalan di tempat, tetapi juga muncul babak baru, seperti kisah komik yang tiada habisnya," katanya.

Menurut Trimedya, perkembangan proses hukum kasus Gayus hingga saat ini belum menyentuh auktor intelektualis sesungguhnya dari mafia hukum dan mafia pajak. Gayus hanyalah aktor lapangan. Proses hukum atas oknum penegak hukum di kepolisian baru menyentuh tingkat penyidik dan di kejaksaan baru menyentuh jaksa penuntut umum.

"KPK harus mengambil alih. Pintu masuknya dari pengakuan Gayus bahwa ia mendapatkan harta kekayaan dari sejumlah perusahaan. Itu yang belum diusut kepolisian," katanya.

Penuntasan kasus Gayus di tangan KPK, menurut dia, juga penting agar kasus itu tidak cenderung dipolitisasi.

Dalam pengusutan kasus kepergian Gayus ke Bali, Polri mematok waktu 10 hari untuk penuntasannya. Namun, dalam dugaan kepergian Gayus ke luar negeri, polisi tak berani mematok target waktu untuk penuntasannya. "Tak ada target waktu, tetapi secepatnya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta.

Menurut Boy, Sabtu, Gayus segera menjalani pemeriksaan *pro justitia* atau diambil keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. (WHY/TRA)

KOMPAS, SELASA, 11 JANUARI 2011

KASUS GAYUS

Hakim Siap Dorong Penuntasan Dugaan Mafia Perpajakan

JAKARTA, KOMPAS — Majelis hakim yang mengadili terdakwa korupsi dan pemberi keterangan palsu, Gayus HP Tambunan, siap mengeluarkan penetapan kepada penyidik untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus mafia pajak dan mafia hukum.

"Itu (penetapan) nanti dimasukkan dalam salinan putusan hakim," ujar ketua majelis hakim Albertina Ho seusai memimpin sidang perkara Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/1). Agenda sidang kemarin adalah pembacaan duplik atau tanggapan dari penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum (JPU). Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan atau vonis hakim pada Rabu (19/1). Sebelumnya, JPU menuntut Gayus hukuman penjara 20 tahun.

Selama mengadili Gayus, hakim Albertina pernah mengeluarkan penetapan hakim, yakni saat meminta jaksa memindahkan tahanan Gayus dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ke Rutan Cipinang. Penetapan dikeluarkan untuk mencegah Gayus bebas keluar tahanan seperti halnya di Rutan Brimob.

Penetapan majelis hakim itu merupakan permintaan penasihat hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, di muka persidangan.

Seusai persidangan, Adnan Buyung menjelaskan, penetapan hakim sangat diperlukan agar kasus mafia pajak dan mafia hukum dapat benar-benar tuntas, termasuk bisa menyingkap keterlibatan perusahaan-perusahaan wajib pajak serta para petinggi di kepolisian, kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Pajak. (FAJ)

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Terdakwa kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan berdiskusi dengan kuasa hukumnya, Adnan Buyung Nasution, seusai mendengarkan duplik yang dibacakan kuasa hukumnya di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/1).

KOMPAS, SELASA, 11 JANUARI 2011

KPK Telusuri Asal Uang Gayus

Ito Sumardi: Ada Pihak yang Memodali Gayus Tambunan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri kasus dugaan mafia hukum dan pajak terkait mantan pegawai pajak, Gayus HP Tambunan. KPK akan mencari celah perkara yang belum ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencari perusahaan yang diduga memberikan uang kepada Gayus.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK M Jasin, Senin (10/1) di Jakarta, seusai bertemu Wakil Jaksa Agung Australia Roger Wilkins. Tim KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Polri, dan Kejaksaan Agung serta sudah menerima data aliran dana dari sejumlah perusahaan ke Gayus. Perusahaan itu diduga diberi bantuan dalam urusan pajak.

Namun, Jasin tak menjelaskan perkembangan yang diperolehnya. "Jangan dululah, nanti mental lagi," kata dia.

Secara terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi membenarkan ada pihak yang ikut memodali Gayus Tambunan selama di Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. "Itu baru pengakuan dia, tetapi kita kan tak boleh beropini dulu dan harus menelusurinya," jelasnya.

Menurut Ito, Polri akan menelusuri pengakuan Gayus itu agar menjadi fakta hukum yang bisa digunakan. Polri juga menelusuri pengakuan Gayus terkait kemungkinan siapa saja yang ditemuinya di luar rutan.

"Jika menyelamatkan asetnya, kami belum bisa memastikan. Itu semua juga masih akan didalami dan diperiksa Polri," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam menambahkan, Polri tidak mendapatkan tekanan politis dalam mengusut kasus terkait Gayus. Namun, Polri membutuhkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk penuntasannya.

Menurut Anton, Polri sebenarnya sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk memeriksa dokumen pajak perusahaan yang diduga memberikan dana kepada Gayus, bulan lalu. Namun, surat itu belum dibalas.

Dalam persidangan Gayus menuturkan memperoleh imbalan dana, antara lain, dari PT Kaltim Prima Coal Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin.

Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus tetap enggan menanggapi seputar dugaan kepergiannya ke luar negeri. Gayus berjanji menanggapi semuanya seusai pembacaan putusan perkaranya, pekan depan.

"Saya akan cerita banyak setelah putusan," ujar Gayus. Dia juga mengatakan tidak mau terseret permainan pihak tertentu yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari pembelaan dirinya.

Polri, Senin, memeriksa istri Gayus, Milana Anggraini, sebagai saksi dugaan kepergian Gayus keluar negeri. Milana diperiksa sebagai saksi.

Goncangkan negara

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengungkapkan, mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri pernah mengungkapkan, jika dugaan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus diungkapkan, hal itu bisa menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Namun, DPR mendorong penegak hukum untuk tetap mengusut kasus itu.

Di Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, kasus Gayus dengan berbagai keleluasaannya memperlihatkan uang masih sedemikian berjaya dalam sistem hukum di Indonesia. Kondisi ini memiliki implikasi serius karena mengancam dasar mental dan pikiran rakyat. Rakyat bisa percaya, uang adalah segala-galanya dalam penegakan hukum.

(NWO/WHY/PIN/FAJ/AIK/HAR/FER)

KOMPAS, KAMIS, 13 JANUARI 2011

DPR Ingin Ungkapkan Dalangnya

KPK Fokus pada Dana Gayus

JAKARTA, KOMPAS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Panja dibentuk bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk membantu mengungkap dalang di balik aksi mantan pegawai pajak, Gayus HP Tambunan.

Kesepakatan pembentukan panitia kerja (panja) diambil dalam rapat internal Komisi III DPR, Rabu (12/1). Ketua Komisi III Benny K Harman menjelaskan, panja bertugas mengawasi pengusutan kasus mafia pajak yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Panja dibentuk bukan untuk mengintervensi proses pengungkapan jaringan mafia pajak, dengan kasus Gayus sebagai pintu masuk.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fachri Hamzah, menambahkan, panja dibentuk untuk menjernihkan proses pengusutan mafia pajak. Pasalnya, saat ini ada indikasi pembelokan pengusutan hanya bermuara pada kasus Gayus. "Sekarang ini efek dramanya terlalu dibesar-besarkan," katanya.

Fachri menduga Gayus tidak sendirian dalam menjalankan aksinya. Seharusnya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Pajak tidak hanya mendorong pengusutan kasus Gayus saja. Satgas seharusnya juga bisa mengungkap sumber uang Gayus serta ke mana saja dana itu mengalir.

Ia menduga ada "orang besar" yang melindungi kebijakan yang pernah diambil Gayus. "Cara yang paling baik untuk menelusuri pejabat mana (yang melindungi) ya dilihat aliran dananya ke mana. Yang harus dicari itu *big fish*-nya, bukan hanya Gayus," imbuh Fachri.

Menurut Benny, panja beranggotakan seluruh perwakilan partai politik di DPR. Panja akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Tugas pertama panja adalah menyusun rencana kerja yang akan disahkan pada pekan depan.

Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, fraksinya sebenarnya mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Gayus dan tidak hanya panja. Panja dibentuk oleh komisi, sedangkan pansus bersifat lintas komisi.

Dengan adanya pansus, lanjut Bambang, ada kemungkinan lebih besar untuk membongkar hingga tuntas kasus Gayus, termasuk dugaan adanya pihak yang bermain di balik kasus itu.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Denny Kailimang juga berharap DPR membentuk pansus untuk kasus Gayus. Ini karena sudah banyak institusi yang terlibat dalam dalam kasus itu. "Pansus tersebut selanjutnya harus memanggil semua instansi yang terkait kasus Gayus, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk kemudian direkomendasikan ke KPK," kata Denny.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, lembaganya fokus pada asal dan aliran dana ke Gayus Tambunan. KPK juga berencana memanggil wajib pajak yang terindikasi menyuap Gayus.

"Kita mulai dari dananya dulu," kata Busyro di Kantor KPK, Rabu.

Busyro menegaskan, KPK bersikap proaktif untuk mengungkap skandal pajak terkait Gayus Tambunan. "Kami lakukan bukan karena desakan masyarakat, tapi bagian tugas. Kami juga aktif ke Polri dan penegak hukum lain untuk kumpulkan informasi," jelas dia.

Busyro memastikan KPK akan memanggil wajib pajak yang terindikasi menyuap Gayus. "Pasti memanggil yang terindikasi, terkait langsung atau tidak langsung dengan hasil telaah. Bukti-bukti yang nanti masuk, aliran-aliran dana dari wajib pajak ke Gayus," kata dia. (NWO/NTA/AIK)

KOMPAS, JUMAT, 14 JANUARI 2011

KPK Akan Usut Kasus Gayus

Presiden Tak Bisa Didesak-desak

JAKARTA, KOMPAS — Rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutuskan memanggil Gayus HP Tambunan. Keseriusan KPK mengusut perkara yang terkait dengan mantan pegawai pajak itu diharapkan dapat membongkar kasus mafia pajak dan mafia hukum di seputar Gayus.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Kamis (13/1) di Jakarta, memastikan akan memanggil Gayus. "Oh, jelas itu. Itu keputusan rapim (rapat pimpinan) KPK," katanya.

KPK akan menjadwalkan pemanggilan Gayus. "Kita sekarang menunggu hasil telaah deputi lidik (penyelidikan)," ujarnya.

Walaupun belum ada pelimpahan resmi perkara ini dari Polri, Busyro menjamin KPK serius mengusut kasus ini. "Ada perkara yang bisa kami periksa tanpa diambil alih," kata Busyro.

Sejumlah kalangan, termasuk penasihat hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, meminta KPK mengambil alih penanganan kasus Gayus dari Polri. Polisi dan Kejaksaan dinilai tidak bisa menangani, apalagi setelah sejumlah anggota Polri dan jaksa diduga terlibat dalam kasus itu. Gayus pun dilaporkan 68 kali keluar dari Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurut Busyro, KPK hampir setiap hari melakukan gelar perkara terkait kasus Gayus. Pimpinan KPK juga sudah meminta data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana ke Gayus dan pihak yang diduga terlibat.

Busyro menegaskan, KPK fokus pada aliran dana Gayus. "Semua perusahaan akan diperiksa, tidak terbatas pada perusahaan tertentu saja. Kami tidak bisa dan tak akan mau untuk diarahkan ke perusahaan tertentu sehingga nanti dipolitisir. Itu bertentangan dengan prinsip keadilan untuk semua," paparnya.

Selain itu, mantan atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak juga akan diperiksa, sejauh mana keterlibatannya. "Kasus ini sebenarnya ada dimensi strukturalnya. Ini yang sedang kami telisik juga. Ini memang rumit," kata Busyro.

Seusai bertemu pimpinan KPK, Adnan Buyung mengaku berharap banyak kepada KPK. "Kita bersyukur KPK mengambil alih. Semoga bisa meluruskan penyidikan terhadap kasus Gayus ini," katanya.

Menurut Adnan Buyung, banyak celah yang belum terbuka dalam perkara ini. "Gayus sendiri tidak puas. Dalam pleidoinya, dia mengungkapkan banyak hal, berbagai masalah korupsi, masalah hukum, dan mafia pajak kepada Satgas (Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum), tetapi belum semua diangkat," tuturnya.

Adnan Buyung mendukung KPK memeriksa seluruh perusahaan yang diduga memberikan uang kepada Gayus. "Bukan hanya perusahaan Bakrie. Perusahaan yang sudah dibuka Gayus, kan, banyak. Ada 144 perusahaan," ungkapnya.

Adnan Buyung, dalam diskusi di The Ary Suta Center, Jakarta, juga mengakui, "Kita sudah mentok di polisi. Semua bahan yang diberikan Gayus kepada polisi dan Satgas tidak ada yang ditindaklanjuti. Padahal, Gayus berkomitmen membongkar mafia pajak dan mafia hukum yang besar-besar."

Adnan Buyung mengakui, kini ada kasus perpajakan terkait Gayus yang tengah diadili, yakni dari PT SAT. Namun, perkara itu kecil karena nominalnya hanya Rp 500 juta. Kasus dugaan mafia hukum yang ditangani juga kecil-kecilan, yakni terkait Komisaris Arafat dan Ajun Komisaris Sri Sumartini. Padahal, Gayus sudah mengakui sejumlah perusahaan besar yang diduga terkait dengan kasusnya.

Adnan Buyung juga tak yakin dengan panitia kerja yang dibentuk DPR untuk menindaklanjuti kasus terkait Gayus. Pembentukan panitia kerja itu hanya untuk konsumsi publik.

Sebaliknya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai, saat ini ada kecenderungan penanganan kasus Gayus diarahkan melalui pendekatan politik (*political approach*) yang justru menimbulkan multi-intervensi. Hal ini memang bertujuan mengaburkan peran "ikan kakap" di belakang Gayus.

Menurut Indriyanto, selama kasus Gayus masih dibayang-bayangi faktor politis, bisa dipastikan tak akan terungkap seluruhnya. "Karena itu, penuntasan kasus Gayus seharusnya dilakukan kembali dengan pendekatan legal dengan membuka tabir lingkaran dalam Gayus dan lingkaran luar, yakni yang memberi dana kepada Gayus," ujarnya.

Tak bisa didesak-desak

Di Jakarta, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa didesak-desak untuk mencampuri penanganan perkara Gayus. Pasalnya, Presiden tak ingin melanggar hukum dan konstitusi, yang bukan domainnya, serta tidak dibenarkan itu.

Untuk mengungkap kasus Gayus, Presiden tak hanya menginstruksikan Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, tetapi juga menugasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar untuk ikut serta menuntaskan kasus itu. Bahkan, Presiden meminta Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto untuk mendukung pemeriksaan dan penyidikan yang dijalankan penegak hukum serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Tunjukkan cara apa lagi yang mesti dilakukan Presiden untuk mengungkap tuntas kasus Gayus, yang tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kalau ada usulan, tentu Presiden Yudhoyono akan mempertimbangkan langkah itu bagi pengungkapan kasus Gayus," kata Julian. Sebelumnya, sejumlah kalangan, termasuk mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, meminta Presiden turun tangan menuntaskan kasus Gayus (*Kompas*, 13/1).

Menurut Julian, instruksi Presiden kepada penegak hukum sudah tegas disampaikan, terutama terkait dengan kasus Gayus.

Secara terpisah, Kuntoro Mangkusubroto menambahkan, Polri mengajak KPK dan PPATK bekerja sama menuntaskan kasus Gayus Tambunan.

(AIK/ANA/FAJ/EDN/HAR)

KOMPAS, SABTU, 15 JANUARI 2011

MAFIA HUKUM

Presiden Akan Pimpin Rapat Bahas Gayus

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/1), akan memimpin rapat terbatas untuk menuntaskan perkara dugaan mafia pajak terkait dengan Gayus HP Tambunan dan kasus hukum lain. Rapat akan melibatkan semua pihak yang menangani kasus Gayus. Dari rapat itu, diharapkan ada kerja sama terpadu mengungkapkan kasus Gayus.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai rapat terbatas bersama Presiden Yudhoyono di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (14/1). Dalam keterangan persnya, Djoko didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kepala Kepolisian Negara RI (Polri) Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Rapat mendadak itu termasuk membahas kasus Gayus serta isu strategis dan hal lain yang mendesak ditangani. Presiden baru tiba dari kunjungan kerja di Jawa Timur.

Menurut Djoko, rapat terbatas Senin itu hanya salah satu dari sekian banyak rapat yang berkali-kali dipimpin Presiden untuk membahas pengungkapan perkara yang jadi perhatian publik, seperti kasus Gayus dan kasus Bank Century. "Tidak benar Presiden dan pemerintah tidak memberikan perhatian pada kasus yang jadi sorotan publik itu. Presiden berkali-kali mengadakan rapat dan memerintahkan Kepala Polri dan Jaksa Agung untuk membuat terang kasus tadi," katanya. Rapat bidang polhukam adakalanya tertutup.

DK 0009 4639

Djoko menyebutkan, dalam rapat Jumat, Kepala Polri melaporkan yang dilakukan jajarannya untuk menangani kasus Gayus, termasuk perkembangan kasus itu ke arah perpajakan. "Dalam penanganan kasus, pemerintah tak akan tebang pilih. Namun, menelusuri kasus pajak itu tidak mudah karena memerlukan ahli forensik perpajakan," katanya lagi.

Terkait soal desakan agar Presiden mengintervensi aparat hukum untuk penuntasan perkara Gayus, Djoko mengakui, salah satu "intervensi" dari Presiden adalah memanggil pejabat hukum yang diminta untuk menuntaskan masalahnya. "Itu adalah salah satu intervensi beliau. Dalam hukum tidak boleh Presiden memerintahkan Kepala Polri atau Jaksa Agung menangkap si A atau si B, tetapi untuk pengusutan lebih cepat, lebih terang, dan lebih baik. Itulah yang selalu dilaksanakan Presiden," katanya.

Djoko menuturkan, "Jika ada yang mengatakan Presiden tidak mengintervensi hukum, itu karena tidak melihat apa yang dilakukan sehari-hari oleh Presiden dan kami semua." "Intervensi" dari Presiden terhadap kasus hukum senantiasa dilakukan.

Koalisi kecewa

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Jakarta mengutarakan, perkembangan kasus Gayus semakin absurd. Tidak adanya perkembangan signifikan atas penanganan kasus itu telah merusak kredibilitas pemerintahan. Untuk itu, diperlukan tindakan luar biasa untuk mengubah keadaan.

"Sebagai anggota koalisi, PAN kecewa atas perkembangan penanganan kasus Gayus yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Padahal, makin banyak persoalan terungkap, seperti kepergian Gayus ke luar negeri," kata Bara.

Bara mengatakan, publik semakin kecewa atas perkembangan penanganan kasus Gayus yang dilakukan Polri. Walaupun banyak bukti yang diungkap Gayus di pengadilan, Polri terlihat tidak berminat untuk membongkar skandal besar itu.

KPK periksa Gayus

Di Palembang, Jumat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memastikan Gayus akan diperiksa oleh KPK, Minggu depan. "Gayus harus diberi hak memberikan penjelasan secara utuh kepada KPK. Biar Gayus membuka apa adanya," katanya.

Menurut Busyro, KPK berwenang mengambil alih kasus Gayus. Namun, KPK terus berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan.

Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta menambahkan, KPK berkomitmen mengusut dugaan kasus mafia pajak dan mafia hukum di balik perkara Gayus. Pekan depan, KPK akan menemui Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk mendapatkan informasi tambahan.

Secara terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi di Jakarta menilai, penanganan kasus wajib pajak yang diduga menyuap Gayus adalah domain Polri. Ia mempertanyakan langkah KPK jika masuk ke wilayah itu.

Jaksa Agung Basrief Arief juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk bersama polisi dan KPK menuntaskan kasus Gayus hingga pengadilan.

(HAR/AIK/FER/WAD/ANA/FAJ/TRA)

KOMPAS, MINGGU, 16 JANUARI 2011

KASUS GAYUS

151 Berkas Wajib Pajak Diserahkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan menyerahkan tiga kardus besar berisi 151 berkas dokumen wajib pajak yang diminta Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyidikan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Tambunan.

Itu dikatakan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya di Jakarta, Sabtu (15/1). Sebelumnya Kapolri meminta dokumen dari 149 wajib pajak, kemudian Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) meminta tambahan lima lagi.

"Namun, tiga dari lima itu sudah ada dalam daftar 149 wajib pajak sehingga hanya ada tambahan dokumen dua wajib pajak. Total dokumen yang kami serahkan 151 berkas," tutur Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya di sela-sela jeda istirahat rapat antara pejabat Kemkeu dan Bareskrim Polri di Markas Besar Polri.

Menurut Indra, surat permintaan data terkait wajib pajak yang berhubungan dengan Gayus dikirim Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo ke Kemkeu pada 22 Desember 2010. Surat itu baru bisa dibaca Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 23 Desember 2010 dan langsung ditindaklanjuti dengan perintah persiapan data kepada Inspektorat Jenderal Biro Bantuan Hukum dan Pengadilan Pajak.

"Namun, penghimpunan data itu terpotong hari libur 24 dan 25 Desember 2010. Ditambah kesibukan menyelesaikan masalah anggaran, penyerahan data dilakukan saat ini. Tentunya kesibukan Menteri Keuangan tak hanya masalah ini saja," tuturnya.

Tanggung jawab Polri

Menurut Indra, semua data yang diserahkan kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri, termasuk kerahasiaan wajib pajak. Kemkeu berpegang pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memungkinkan penyerahan dokumen wajib pajak jika diperlukan untuk memperlancar penyidikan hukum.

DK 0009 4658

"Data bisa diserahkan jika memang diperlukan dalam proses penyidikan dan ada izin dari Menteri Keuangan. Kami sama sekali tak menghalangi permintaan data itu. Kami mendukung semua langkah ke arah pengungkapan kasus tersebut," ujarnya.

Ketika ditanya tentang jenis wajib pajak yang datanya diserahkan kepada Polri, Indra tidak bersedia menjelaskan. Sebab, wajib pajak yang diserahkan bisa saja data wajib pajak orang pribadi (individu) atau wajib pajak badan (perusahaan). "Sekarang yang penting Polri dapat melanjutkan penyidikan," katanya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemkeu Yudi Pramadi mengatakan, setelah data diserahkan kepada Polri, semua data itu sangat terbuka untuk diolah Polri. "Kami menyerahkan data itu sesuai dengan permintaan Polri. Datanya mau diapakan, terserah Polri," katanya.

Penyerahan data kepada Polri itu mendahului langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menyatakan secara terbuka akan meminta data kepada Kemkeu. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan serius mengusut kasus mafia pajak ini dengan fokus pada aliran dana dari wajib pajak ke Gayus. Busyro mengatakan, KPK akan mengusut keterlibatan atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak. KPK pun menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, pekan depan.

Karena itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, KPK tidak taktis, bahkan lamban, dalam menangani kasus Gayus. "Ketika menyatakan tangani kasus Gayus, seharusnya KPK bisa lebih taktis berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk segera mendapatkan data dari Kemkeu," katanya.

"Langkah polisi yang bergerak cepat begitu mengetahui rencana KPK patut dipertanyakan. Apalagi sebelumnya polisi terkesan tidak mau menyentuh atasan Gayus. Dikhawatirkan hal ini akan menyulitkan KPK mendapatkan semua dokumen yang dibutuhkan," kata Emerson.

Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK tidak khawatir dengan pergerakan cepat polisi meminta data kepada Kemkeu. KPK bisa meminta data yang diambil polisi dari Kemkeu jika memang dibutuhkan.

Terkait penyerahan dokumen wajib pajak sejumlah perusahaan besar itu, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mendesak Polri agar mendalami tata cara dan prosedur serta kewenangan keberatan pemeriksaan penyidikan serta siapa yang melaksanakan dan menandatangani hasil pekerjaan itu.

"Sebelum keputusan permohonan wajib pajak diputuskan, ada paparan yang dihadiri kepala yang menandatangani keputusan dan Dirjen Pajak. Saya tidak yakin apa yang dilakukan Gayus atas perusahaan-perusahaan itu. Dirjen tidak tahu," katanya.

Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, di Medan, mengatakan, KPK masih memetakan kasus Gayus agar tidak tumpang tindih dengan instansi penegak hukum lain. Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengimbau agar antarinstansi penegak hukum tidak saling menegasikan atau melemahkan. Polri, Kejaksaan, dan KPK harus bersinergi mengungkap kasus Gayus.

(OIN/AIK/FAJ/SIE/MHF/HAR)

KOMPAS, SENIN, 17 JANUARI 2011

KASUS GAYUS

Kementerian Keuangan Siap Bantu KPK

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan siap menerima permintaan data wajib pajak dari pihak mana pun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus apa pun, termasuk pada penyidikan terkait mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Data akan diberikan sepanjang permintaan yang disampaikan itu memenuhi aturan hukum.

"Hingga saat ini saya belum menerima perintah apa pun untuk menyerahkan data ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), seperti kemarin (saat menyampaikan 151 berkas dokumen kasus pajak kepada Badan Reserse dan Kriminal/Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia)," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Yudi Pramadi di Jakarta, Minggu (16/1).

Menurut Yudi, Kementerian Keuangan sangat mendukung proses ke arah penyelesaian hukum yang melibatkan mantan pegawai pajak, Gayus Tambunan.

Atas dasar itu, permintaan data wajib pajak akan dilayani asalkan tidak melanggar Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal tersebut memungkinkan adanya penyerahan dokumen wajib pajak jika diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan hukum. Syaratnya, harus ada izin Menteri Keuangan.

Bukan disita

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyerahkan tiga kardus besar data yang berisi 151 berkas dokumen wajib pajak yang diminta Polri terkait penyidikan kasus makelar pajak oleh Gayus Tambunan.

Dokumen yang diminta lebih banyak dari angka sebelumnya, yakni 149 berkas, karena ada tambahan lima nama wajib pajak dari Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim (*Kompas*, 16/1/2011).

"Jadi bukan penyitaan data oleh Polri seperti yang disebutkan beberapa media. Namun, justru kami yang menyerahkan dan mengantarkannya ke Bareskrim Polri seluruh data itu," tutur Yudi. (OIN)

KOMPAS, SELASA, 18 JANUARI 2011

KASUS GAYUS

Instruksi Presiden Tidak Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS — Dua belas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mempercepat penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang melibatkan bekas pegawai pajak Gayus HP Tambunan, dinilai masih bersifat umum dan tidak luar biasa. Penanganan kasus Gayus tidak akan maksimal tanpa ada perbaikan dalam koordinasi kewenangan dari penegak hukum yang selama ini menangani kasus itu.

Penegasan itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Senin (17/1).

Ia mengatakan, instruksi khusus Presiden tentang kasus Gayus bersifat umum dan tidak ada yang luar biasa karena mekanisme ini sudah dilakukan penegak hukum. Sebelumnya, seusai Sidang Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin, Presiden Yudhoyono mengeluarkan 12 instruksi untuk mempercepat penuntasan kasus terkait Gayus Tambunan.

Menurut Indriyanto, ada kesan koordinasi dan kerja sama di antara penegak hukum sifatnya instan setelah Presiden campur tangan kasus Gayus. Masih ada kesan egosentris kewenangan di antara Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tanpa memperbaiki psikologis egosentris itu, penanganan kasus Gayus tidak akan maksimal," ujarnya.

Lihat Juga Video "Presiden Akan Turun Tangan Dalam Kasus Gayus" di vod.kompas.com/turuntangan

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, pesimistis, 12 instruksi presiden tentang penegakan hukum tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, pengawasan pelaksanaan instruksi itu dilimpahkan kepada Wakil Presiden Boediono dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

"Presiden telah berulang kali mengeluarkan instruksi serupa, tetapi pelaksanaannya tak pernah efektif. Sebelumnya, Presiden menginstruksikan kasus Gayus harus bisa dituntaskan 60 hari. Sampai hari ini masalahnya justru makin rumit," ujarnya.

Menurut Bambang, jika mau instruksi itu terlaksana, Presiden yang memimpin pengawasannya sendiri. Apalagi, tidak ada batas waktu dan sanksi bagi pejabat teknis yang tidak melaksanakan instruksi itu.

Kedua belas instruksi presiden itu antara lain meminta sinergi di antara penegak hukum harus ditingkatkan, dengan melibatkan PPATK dan Satuan Tugas. "KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong untuk melakukan langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri," katanya.

Presiden menyebutkan, 149 perusahaan yang disebut-sebut Gayus bisa saja ada kaitannya dengan masalah pajak. Jika hasil penyelidikan ada bukti permulaan cukup, tentu perlu dilakukan pemeriksaan. (WHY/HAR/FAJ/AIK/FER/NWO)

KOMPAS, RABU, 19 JANUARI 2011

MAFIA PAJAK

Efektivitas Penunjukan Boediono Diragukan

JAKARTA, KOMPAS — Mantan anggota Dewan Penasihat Presiden, Adnan Buyung Nasution, Selasa (18/1) di Jakarta menegaskan, 12 instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk percepatan penuntasan kasus mafia pajak dan mafia hukum terkait Gayus HP Tambunan itu terlambat. Ia meragukan pula efektivitas penunjukan Wakil Presiden Boediono untuk mengoordinasikan dan mengawasi penuntasan kasus Gayus.

Boediono dan juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto yang akan membantunya, kata Adnan Buyung, cenderung kompromistis. Padahal, dibutuhkan sosok *fighter* yang berani menghadapi semua itu.

Namun, Adnan Buyung mengakui, instruksi Presiden itu tetap perlu dikeluarkan daripada tidak ada sama sekali. Ia juga mengingatkan agar instruksi itu bukan retorika belaka, seperti instruksi Presiden mengenai percepatan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan tahun 2004.

Ia juga menegaskan, instruksi Presiden soal audit kinerja, termasuk mencopot semua pejabat yang terlibat, harus jelas ukurannya. Artinya, jika dalam tempo seminggu, sesuai batas waktu yang diberikan Presiden, tak ada tindak lanjutnya, pemimpin lembaga itu harus diberhentikan.

Adnan Buyung juga mempertanyakan, jika dalam tempo seminggu, misalnya, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tak menindak Raja Erizman, pejabat yang membuka blokir rekening Gayus, atau Jaksa Agung Basrief Arief tak menindak jaksa Cirus Sinaga yang mengarahkan dakwaan sehingga Gayus terbebas dari tuntutan, mau diapakan mereka. "Kalau saya, akan saya

Efektivitas Penunjukan

(Sambungan dari halaman 1)

berhentikan keduanya kalau tak menindak pejabat sebagaimana instruksi Presiden," katanya.

Pengamat politik J Kristiadi menilai, pendelegasian penyelesaian kasus Gayus kepada Wakil Presiden (Wapres) adalah keputusan berat. Sebelum mendapat tugas itu, Boediono sudah mendapat tugas dari Presiden untuk menangani sejumlah urusan, antara lain terkait dengan Papua dan pengentasan warga miskin.

"Beban Boediono sangat berat. Menangani urusan ekonomi dan kemiskinan saja sudah sangat berat, apalagi ditambah dengan tugas terkait dengan kasus Gayus," ujarnya, Selasa di Jakarta.

Kasus Gayus, kata Kristiadi, adalah kasus yang luar biasa pelik dan berat. Kasus ini diduga melibatkan kekuatan politik dan dana di belakang Gayus. Karena itu, sulit rasanya bagi Boediono untuk menanganinya. Apalagi Boediono tidak memiliki latar belakang politik. "Situasi makin pelik karena Pak Boediono juga diduga tersangkut masalah Bank Century," ucapnya.

Pembagian tugas seharusnya dilakukan secara tegas antara presiden dan wapres, seperti dilakukan saat M Jusuf Kalla menjadi wapres. Boediono sebaiknya mendapatkan tugas untuk menangani perekonomian.

Bukan hal aneh

Secara terpisah, Selasa, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat di Jakarta menyatakan, penunjukan Wapres oleh Presiden untuk ikut mengoordinasi dan mengawasi penuntasan kasus Gayus adalah hal wajar. Itu bukan hal aneh dan baru. Selama ini banyak tugas yang diinstruksikan kepada Wapres untuk ikut membantu koordinasi dan pengawasannya. "Wapres selama ini memang difungsikan untuk ikut membantu mengoordinasikan dan mengawasi program serta kebijakan pemerintah. Wapres bukan sebagai ketua tim pelaksanaan instruksi Presiden yang menetapkan 12 langkah penanganan secara tuntas kasus Gayus," katanya.

Kuntoro mengakui, ada kelambatan penanganan kasus Gayus sehingga harus dituntaskan. "Ada instruksi Presiden agar bisa diselesaikan," ujarnya.

(FER/ATO/HAR/BDM)

KOMPAS, KAMIS, 20 JANUARI 2011

Putusan Hakim Mengejutkan

Gayus Tambunan Dituntut 20 Tahun, Divonis Tujuh Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Putusan terhadap Gayus HP Tambunan, selama tujuh tahun penjara, yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Selatan, Rabu (19/1), mengejutkan berbagai kalangan. Vonis itu, selain jauh dari tuntutan jaksa selama 20 tahun penjara, juga dinilai tak sesuai rasa keadilan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Kepresidenan, Rabu, belum memberikan tanggapan terhadap vonis Gayus itu. Namun, Presiden terkejut dengan keterangan Gayus berkaitan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, vonis atas Gayus, selain mengejutkan, juga ironis jika dibandingkan dengan tingginya harapan publik terhadap penuntasan kasus ini. Putusan itu menunjukkan kasus Gayus masih jauh dari selesai.

"Hukuman itu juga semakin membuktikan Gayus memiliki kekuatan di luar dirinya," katanya. Pramono (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) juga melihat Gayus sedang memainkan peran yang tahu keinginan publik sehingga selalu ada hal baru yang dia sampaikan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai, vonis terhadap Gayus tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan. Meski demikian, vonis itu tetap harus dihormati.

Putusan terhadap Gayus juga mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Vonis itu ditulis kantor berita asing Reuters dengan judul "Akhir Cerita Petugas Pajak Indonesia yang Korup dan Pengguna Rambut Palsu". Judul berita di kantor berita AP adalah "Petugas Pajak Indonesia yang Korup Mendapat Hukuman Tujuh Tahun Penjara". Dalam beritanya, AP menulis, vonis itu membuat marah banyak orang di Indonesia, negara yang tengah berusaha mengubah citranya sebagai negeri paling korup.

Kantor berita AFP membuat berita berjudul "Petugas Pajak Indonesia Dihukum Penjara dalam Kasus Suap Besar". AFP menuliskan, yang dilakukan Gayus membuat negeri korup itu terkejut. Tak ketinggalan, diceritakan pula Gayus yang bisa 68 kali meninggalkan Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok; kehadirannya di Bali; membeli paspor palsu; serta pergi ke Makau dan Singapura.

DK 0009 4677

Tujuh tahun penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang dipimpin Albertina Ho, menghukum mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan selama tujuh tahun penjara. Gayus dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjadi pegawai pajak, menyuap polisi dan hakim, serta memberikan keterangan palsu dalam proses penyidikan.

Saat putusan dibacakan, ruang pengadilan penuh sesak. Majelis mengatakan, Gayus terbukti menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) sehingga merugikan negara Rp 570,92 juta. Ia juga terbukti turut serta memberikan uang kepada polisi senilai total 10.000 dollar Amerika Serikat (AS), memberikan uang kepada hakim sebesar 40.000 dollar AS saat beperkara di PN Tangerang, dan memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai Rp 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan Gayus itu sesuai tuntutan jaksa, yang meminta terdakwa dihukum 20 tahun penjara pada 22 Desember 2010. Namun, majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Gayus.

Dalam tuntutannya, jaksa antara lain mencantumkan sejumlah hal yang memberatkan Gayus, yakni tidak menyesali perbuatannya, kembali melakukan tindak pidana, dan tidak ada hal yang meringankannya.

Namun, Albertina Ho mengatakan, pertimbangan putusan hakim dibatasi hanya pada fakta persidangan. Hakim tidak mempertimbangkan tindak pidana lain yang dilakukan Gayus, seperti dugaan penyuapan kepada petugas Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, sehingga bisa keluar dari penjara dan dugaan pemalsuan paspor. Majelis hakim juga memasukkan hal yang meringankan, antara lain terdakwa berterus terang, masih muda, memiliki anak-anak yang perlu dibimbing, dan belum pernah dihukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap mengatakan, Kejaksaan akan melakukan banding terhadap putusan itu. "Kalau vonis hakim kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa, Kejaksaan akan melakukan upaya banding," katanya.

Tudingan Gayus

Seusai sidang, Gayus menyatakan apresiasinya pada putusan majelis hakim. "Tak seperti jaksa penuntut umum yang menuntut tinggi sehingga menimbulkan kesan saya penjahat nomor satu di Indonesia," katanya.

Gayus juga menumpahkan kekesalannya kepada anggota Satgas, seperti Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein. Ia menuding Satgas telah memanfaatkan kasusnya untuk kepentingan politik, terutama terkait soal asal usul uangnya yang berasal dari PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resources yang sebagian sahamnya dimiliki keluarga Aburizal Bakrie.

Gayus menyatakan, Satgas mengembuskan isu yang tidak benar, seperti ia bertemu Aburizal Bakrie di Bali dan seringnya ia pergi ke luar negeri. Satgas juga dituding tak serius membongkar mafia pajak dan mafia hukum.

Ia pun mengatakan, John Jerome Grice, warga negara asing yang diduga sebagai aktor di balik pembuatan paspor palsunya atas nama Sony Laksono, adalah agen Badan Pusat Intelijen AS (CIA). Tak hanya itu, Gayus juga menyebutkan, segala aksi John diketahui dan direstui anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. "Berdasarkan cerita John Grice kepada saya, ia adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui seorang anggota Satgas," ujar Gayus.

Pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, juga mengatakan, perkara Gayus telah dipolitisasi. Itu karena wajib pajak yang diekspos hanyalah tiga perusahaan yang dimiliki keluarga Aburizal Bakrie. Padahal, ada 44 perusahaan yang keberatan pajaknya ditangani langsung oleh Gayus.

Adnan Buyung juga menuding adanya rekayasa untuk membentuk opini bahwa Gayus adalah penjahat kakap sehingga mengaburkan peran mafia hukum dan mafia pajak yang sesungguhnya.

hukumnya, Adnan Buyung, yang menyatakan Satgas berada di balik kepergian Gayus ke Singapura. Bantahan, yang siaran persnya dibagikan kepada pers di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta, Rabu malam, dibacakan anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, yang didampingi Denny Indrayana, Wakil Jaksa Agung Dharmono, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Ketua Satgas dan Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, serta anggota Satgas lainnya, Herman Effendi, berhalangan hadir. Kuntoro di AS dan Herman sakit.

"Satgas membantah keras semua tuduhan Gayus yang tidak berdasarkan fakta dan mengaburkan mafia pajak serta peradilan yang dilakukannya dengan pihak lain," kata Mas Achmad.

Terkait tuduhan Gayus yang menyebutkan Satgas menyuruhnya ke Singapura, ujar Mas Achmad, juga tidak benar.

"Satgas tidak tahu-menahu Gayus kabur ke Singapura. Dari pesan BlackBerry (BB) terlihat jelas di mana keberadaan Gayus," katanya seraya mengingatkan untuk membagikan transkrip BB yang dimiliki Denny.

Menurut Mas Achmad, soal tuduhan Gayus, bahwa ia tidak mengungkapkan asal muasal dana Rp 50 miliar yang berada di *safe deposit box* dan sebaliknya yang menyebutkan dana itu berasal dari Bakrie Group adalah Satgas, juga sangat bertentangan dengan data dan fakta yang selama ini muncul dengan sangat jelas di hadapan publik.

"Adalah Gayus dan kuasa hukumnya, Adnan Buyung Nasution, yang dalam berbagai kesempatan, termasuk di pengadilan, menyebut nama tiga perusahaan, yaitu Kaltim Prima Coal, Arutmin, dan Bumi Resources, perusahaan yang telah menyuap dirinya," ujar Mas Achmad seraya menunjukkan rekaman video percakapan Gayus dengan Badan Reserse Kriminal Polri.

Mengenai tuduhan kepada Satgas bahwa Adnan Buyung ditunjuk sebagai kuasa hukum Gayus, informasi itu juga tidak akurat. "Benar satu hal yang menjadi perhatian Satgas, Gayus perlu didampingi advokat berintegritas yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi agar mafia hukum terungkap tuntas. Karena itu, dalam pertemuan ketiga dengan Gayus, Satgas menyarankan beberapa opsi, salah satunya menyampaikan opsi kuasa hukum Adnan Buyung, Bambang Widjojanto, Alex Lay, dan Taufik Basari. Gayus sendiri yang memutuskan didampingi Adnan Buyung," ucap Mas Achmad.

Mas Achmad juga menyangkal adanya agen CIA yang direstui anggota Satgas. Ia menyebutkan, hal itu sama sekali tidak benar. "Satgas sama sekali tak tahu-menahu soal CIA. Gayus harus membuktikan informasi yang diterimanya itu," katanya.

Tentang apakah Satgas bakal menggugat balik Gayus, Darmono menyatakan tidak.

"Untuk apa? Perintah Presiden supaya itu diklarifikasi saja," katanya.

(FAJ/NIT/AIK/FER/NWO/ATO/HAR)

Satgas menolak

Sebaliknya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menepis semua tuduhan Gayus dan kuasa

KOMPAS, KAMIS, 20 JANUARI 2011

KPK Akan Bantu

Dikhawatirkan Terjadi Rivalitas Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kementerian Keuangan berusaha membantu Kepolisian Negara RI dalam menuntaskan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Kepolisian akan menyinergikan penanganan kasus Gayus dengan instansi-instansi tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Rabu (19/1). "Semua pihak berusaha membantu polisi, PPATK, Kementerian Keuangan, KPK. Bagaimana polisi bisa menyelesaikan penanganan-penanganan kasus, khususnya berkaitan dengan Gayus, yang berkaitan dengan perpajakan. Saya kira itu semangatnya," kata Timur.

Timur menjelaskan, jika ada kekurangan dalam pemeriksaan oleh auditor independen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau KPK terkait kasus mafia pajak, akan dilakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk dilengkapi. Dokumen-dokumen terkait pajak diperlukan untuk melengkapi keterangan saksi atau siapa saja sehingga keterangan saksi dapat menjadi fakta hukum.

"Kami kerja sama dengan KPK, PPATK, untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang berkaitan dengan keterangan saksi. Kami dibantu dua petugas PPATK dan tiga dari KPK untuk melakukan penyelidikan," kata Timur.

Pengajar Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, menilai, KPK tidak tegas memutuskan mengambil alih kasus mafia pajak yang diduga melibatkan Gayus. Tanpa ketegasan itu, dikhawatirkan terjadi rivalitas para penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus Gayus. Penyelesaiannya pun menjadi tidak terfokus dan menjadi lama.

"KPK tidak tegas mengatakan mengambil alih kasus Gayus. Jangan biarkan penanganan kasus menggantung. Kalau KPK mengambil alih, pihak kepolisian harus menyerahkan. KPK saat ini hanya menangani kasus yang belum ditangani polisi. Itu, kan, tidak tegas dan jelas," kata Saldi.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum sepenuhnya mendukung KPK untuk menuntaskan kasus mafia pajak dan mafia hukum yang diduga melibatkan Gayus.

"KPK hanya didorong menangani sisa-sisa kasus yang tidak atau belum ditangani kepolisian," tuturnya.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, instruksi Presiden itu tidak berdampak apa pun terhadap upaya lembaga tersebut untuk mengusut perkara ini. Menurut dia, sebelum ada instruksi, KPK sudah berinisiatif bekerja sama dengan instansi tersebut.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, Partai Golkar merencanakan mengambil langkah hukum terhadap Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Sekretaris Satgas Denny Indrayana. Berdasarkan keterangan Gayus, Denny diduga telah mengarahkan Gayus pada upaya pencemaran nama baik Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. (AIK/FER)

Mereka yang Terseret Kasus Gayus

Ajun Komisaris Sri Sumartini
Penyidik Bareskrim, didakwa menerima suap
Tuntutan : 2 tahun
Vonis : 2 tahun

Komisaris Arafat Enanie
Penyidik Bareskrim, didakwa menerima suap
Tuntutan : 4 tahun
Vonis : 5 tahun

Muhtadi Asnun
Hakim, didakwa menerima suap
Tuntutan : 3,5 tahun
Vonis : 2 tahun

Alif Kuncoro
Konsultan Pajak, didakwa menyuap penyidik Polri
Tuntutan : 2,5 tahun
Vonis : 1,5 tahun

Andi Kosasih
Pengusaha, didakwa menyuap penyidik dan membuat kontrak fiktif dengan Gayus.
Tuntutan : 10 tahun
Vonis : 6 tahun

Lambertus Palang Ama
Pengacara. Didakwa membuat kontrak fiktif antara Gayus dan Andi Kosasih.
Tuntutan : 5 tahun
Vonis : 3 tahun

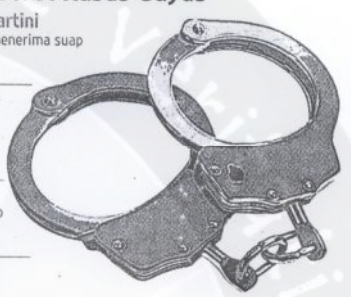

Gayus HP Tambunan
Didakwa menyalahgunakan wewenang, menyuap polisi dan hakim, serta memberi kesaksian palsu
Tuntutan : 20 tahun
Vonis : 7 tahun

Haposan Hutagalung
Pengacara Gayus, didakwa menyuap penyidik dan membuat kontrak fiktif Andi Kosasih dan Gayus.
Tuntutan : 15 tahun
Vonis : 7 tahun

Sumber: Litbang Kompas

BESTARI

KOMPAS, SELASA, 25 JANUARI 2011

Hak Angket Mafia Pajak

Sejumlah Partai Anggota Setgab Memberikan Dukungan

JAKARTA, KOMPAS — Kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan, mendorong sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus tersebut. Usulan itu diperkirakan berjalan mulus karena hampir semua fraksi menyetujuinya.

Hingga Senin (24/1), 30 anggota DPR dari semua fraksi yang berjumlah sembilan menandatangani dukungan penggunaan hak angket kasus mafia pajak. Oleh karena sudah di atas ketentuan, yaitu minimal diusulkan 25 anggota DPR, usulan penggunaan hak angket itu kemarin diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golkar) di ruang kerjanya.

"Dengan hak angket, (DPR) fokus ke penyelidikan, berapa potensi pajak dan wajib pajak kita yang telah membayarnya dengan benar. Rasio pajak kita hanya sekitar 11 persen, padahal China dan India sudah sekitar 17 persen. Dengan pansus hak angket, diharapkan pendapatan negara akan lebih besar," kata Sutjipto, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, yang menjadi salah satu inisiator hak angket.

Ahmad Yani, inisiator lain dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menambahkan, potensi pajak yang hilang setiap tahun akibat praktik seperti mafia pajak diperkirakan Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun.

"Ini hak angket?" tanya Priyo yang mengaku kaget. Ia melanjutkan, "Saya terima usulan ini sebagai bagian dari tekad untuk perbaikan bersama."

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menuturkan, fraksinya masih berharap pada panitia kerja (panja) mafia pajak dan mafia hukum di Komisi III DPR untuk menyelesaikan kasus mafia pajak. "Beberapa hal harus dipikirkan jika ingin memakai hak angket untuk kasus ini," tutur Saan.

DK 0009 4725

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Saan, akan minta penjelasan Sutjipto terkait langkahnya menjadi inisiator hak angket kasus mafia pajak.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, fraksinya mendukung penuh penggunaan hak angket kasus mafia pajak. "Supaya semua yang diutarakan Gayus dan Satgas menjadi jelas dan terang benderang," tutur Setya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menuturkan, fraksinya mendukung penggunaan hak angket kasus mafia pajak selama hal itu menjadi kesepakatan bersama. Penggunaan hak angket diharapkan dapat mendorong penegakan hukum kasus Gayus dan reformasi birokrasi.

"Kami membebaskan seluruh anggota fraksi untuk mendukung hak angket mafia pajak," ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno. Namun, penggunaan hak angket perlu dijaga agar tidak berhenti pada hiruk-pikuk, tetapi sampai penyelesaian tuntas.

Dukungan terhadap penggunaan hak angket itu juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Sarifuddin Sudding. (NWO)

Sejumlah Hak Angket DPR

Periode 2004-2009

- **Kasus: Penjualan tanker Pertamina (7 Juni 2005)**
  Pengusul: 23 anggota DPR dari delapan fraksi
  Hasil akhir: Panitia Angket menilai penjualan dua tanker berindikasi korupsi. Pemerintah diminta mencari celah menyelamatkan dua tanker dan merekomendasikan pengusutan keterlibatan Laksamana Sukardi dalam penjualan tanker.
- **Kasus: Kenaikan harga BBM (24 Juni 2008)**
  Pengusul: 117 anggota DPR dari delapan fraksi
  Hasil akhir: Panitia Angket merekomendasikan negosiasi ulang kontrak Blok Tangguh dan Cepu, serta meninjau ulang keberadaan BP Migas-BPH Migas
- **Kasus: Penyelenggaraan ibadah haji (17 Februari 2009)**
  Pengusul: 122 anggota DPR dari tujuh fraksi
  Hasil akhir: Panitia Angket merekomendasikan penyesuaian struktur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan memberikan tindakan tegas kepada Menteri Agama.
- **Kasus: Pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih (27 April 2009)**
  Pengusul: 22 anggota DPR dari enam fraksi
  Hasil akhir: Panitia Angket merekomendasikan pemberhentian anggota KPU.

Periode 2009-2014

- **Kasus: Pengucuran dana talangan Bank Century (12 November 2009)**
  Pengusul: 139 anggota DPR dari delapan fraksi
  Hasil akhir: DPR memutuskan opsi C, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya diduga ada penyimpangan sehingga diserahkan ke proses hukum. Kesimpulan DPR diperoleh melalui "voting" (pemungutan suara).

Sumber: Litbang Kompas

GUNAWAN

KOMPAS, RABU, 26 JANUARI 2011

KPK Akhirnya Selidiki Gayus

Aburizal Bakrie Usulkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan menaikkan status perkara Gayus HP Tambunan menjadi penyelidikan. Hal itu dilakukan sebagai komitmen keseriusan lembaga ini untuk mengungkap perkara mafia pajak dan mafia hukum di belakang Gayus.

"Rapim (rapat pimpinan) telah mengambil keputusan (kasus Gayus Tambunan) ini sampai tahap penyelidikan," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (25/1).

Menurut Busyro, KPK berupaya menyelesaikan perkara Gayus, mantan pegawai pajak, sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Busyro dalam setahun ini. "Kami sepakat kasus lama akan diusahakan diselesaikan dalam tahun 2011. Kasus Gayus ini relatif baru. Semakin cepat kami tangani akan bebaskan kami dan institusi ini dari beban yang tidak perlu," katanya.

Dalam menangani kasus ini, kata Busyro, KPK fokus pada pemeriksaan asal uang yang masuk ke Gayus dan aliran dana dari Gayus ke pihak lain. Gayus tidak bisa dan tidak mungkin bermain sendiri. Pasti ada pihak terkait dalam kasus ini.

Oleh karena itu, kata Busyro, KPK berprinsip kasus ini tidak hanya berhenti pada Gayus. "Namun, pihak lain, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan siapa pun, yang terbukti terlibat bisa diseret," katanya.

Ditanya apakah KPK juga akan memanggil dua perwira tinggi polisi, Brigadir Jenderal (Pol) Raja Erizman dan Brigadir Jenderal (Pol) Edmon Ilyas, yang disebut terseret kasus Gayus, dengan tegas Busyro menjawab, "Ya, siapa pun. Jadi, termasuk dua jenderal atau pejabat lain di Ditjen Pajak."

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menambahkan, selain menangani kasus Gayus, KPK juga akan membenahi sistem di perpajakan. Tanpa penataan sistem, kasus seperti Gayus akan terjadi lagi.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin, Senin di Jakarta, mengakui kompleksnya kasus Gayus dan banyaknya data yang disembunyikan. "Ruwet karena ada data yang disembunyikan," katanya. Ditanya siapa yang menyembunyikan data itu, Jasin menjawab, "Tentunya para pelaku." Namun, ia tidak memerinci pelaku itu.

Terkait dengan pemeriksaan kasus Gayus oleh KPK, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta, Selasa, mengatakan, KPK tetap dapat melanjutkan proses penyelidikan tersendiri. "KPK pun sudah melihat apa yang dilakukan Polri. KPK bisa fokus pada penyelidikan kasus yang belum diselidiki Polri," tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Selasa, tetap mendorong KPK mengambil alih penanganan kasus Gayus. Polisi atau jaksa juga bisa menerapkan pembuktian terbalik dalam kasus Gayus sebab mekanisme itu sudah diakomodasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni terpidana korupsi harus menjelaskan asal-usul hartanya.

Teliti dokumen pajak

Pada Selasa penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak, dan penyidik KPK mengadakan rapat koordinasi untuk meneliti dokumen pajak terkait perusahaan yang berurusan dengan Gayus. Penelitian diperlukan bagi penyidik Polri untuk bahan analisis dalam proses penyelidikan.

Boy Rafli menjelaskan, PPNS Ditjen Pajak memiliki pemahaman mengenai dokumen pajak dari 44 perusahaan yang berurusan dengan Gayus. Dalam meneliti dokumen pajak itu, penyidik Polri juga meneliti dengan skala prioritas.

"Contohnya, dari 44 perusahaan, penyidik melihat dokumen yang paling dapat dicurigai," katanya. Penyidik juga akan melihat apakah ada indikasi penyimpangan dan tindak pidana terkait antara Gayus dan wajib pajak.

Boy menambahkan bahwa Polri, Selasa, menggelar sidang kode etik dan profesi terhadap Ajun Komisaris Sri Sumartini yang telah divonis dalam perkara terkait Gayus Tambunan. Sidang kode etik berlangsung tertutup.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat menilai, Polri cenderung bersikap tertutup karena tidak menggelar sidang kode etik dan profesi terhadap petugas kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus mafia hukum dan mafia pajak secara terbuka. Polri sebaiknya juga tidak menghambat pengusutan (*obstruction of justice*) terhadap dugaan kasus mafia pajak dan mafia hukum oleh KPK serta menggelar sidang kode etik dan profesi untuk Raja Erizman dan Edmon Ilyas.

Sebaliknya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar memastikan, ia sepenuhnya menjalankan Instruksi Presiden No 1/2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum Penyimpangan Pajak terkait dengan Gayus. "Tak cuma menindak dan menyerahkan aparat Ditjen Imigrasi yang terlibat dalam penerbitan paspor palsu untuk Gayus pada Polri untuk diperiksa, tetapi juga mencegah jangan sampai kasus itu terulang.

Menurut Patrialis, Selasa, sudah 35 pegawai imigrasi ditindak terkait dengan kasus Gayus.

Kejaksaan untuk ketiga kalinya mengembalikan berkas perkara gratifikasi dan pencucian uang senilai Rp 28 miliar dengan tersangka Gayus ke penyidik Polri. Kasus itu disidik sejak Juli 2010.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap, berkas itu dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

Evaluasi Satgas

Di Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Selasa mengatakan, sebaiknya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dievaluasi. "Karena itu hak prerogatif Presiden, usulan lain pergantian orang dalam Satgas, jika memang mereka terbukti melakukan kegiatan di luar tugas. Selayaknya Satgas memberikan laporan kepada Presiden, bukan memberi pernyataan kepada masyarakat dan memolitisasi," katanya.

Dalam acara Orientasi Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Aburizal saat menjawab pertanyaan seorang peserta menuturkan, "Dikatakan saya memberikan penyuapan kepada Gayus. Perusahaan saya adalah perusahaan publik dan keluarga saya hanya memiliki yang minoritas, 3 persen, tetapi karena politik diketengahkan seolah-olah itu milik keluarga saya."

(PIN/AIK/FER/HAR/SIE/FAJ/ANA)

KOMPAS, KAMIS, 27 JANUARI 2011

Demokrat Cabut Usulan Hak Angket

Kepala Bareskrim Polri dan Dirjen Pajak Gelar Rapat Koordinasi

JAKARTA KOMPAS — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengembalikan usulan pembentukan Panitia Khusus Angket DPR untuk Perpajakan kepada para inisiatornya. Usulan tersebut belum memenuhi syarat administrasi setelah tujuh anggota Fraksi Partai Demokrat menarik dukungannya terhadap penggunaan hak tersebut.

"Kami minta kepada para inisiator untuk melengkapi jumlah pengusul jika hak angket ini mau dilanjutkan," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, Rabu (26/1) di Jakarta. Tata Tertib DPR mensyaratkan, usulan hak angket setidaknya diajukan oleh 25 anggota.

Saat diajukan kepada pimpinan DPR pada Senin lalu, hak angket perpajakan itu diusulkan 30 anggota DPR yang berasal dari sembilan fraksi di DPR. Namun, tujuh dari delapan pengusul yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat kemarin mencabut usulannya. Akibatnya, hanya ada 23 anggota DPR yang masih tercatat sebagai pengusul. Usulan pun tak memenuhi syarat administrasi.

Tujuh orang dari Fraksi Partai Demokrat yang menarik usulannya adalah Harry Witjaksono, Didi Irawadi Syamsudin, Pieter Zulkifli, Achsanul Qosasi, Gede Pasek Suardika, Himmatul Alyah Setiawaty, dan Dhiana Anwar. Satu anggota Fraksi Partai Demokrat DPR yang merupakan inisiator hak angket itu, Sutjipto, tidak termasuk dalam daftar yang menarik usulan.

"Kami juga akan meminta Sutjipto untuk menarik usulannya. Beliau belum tercatat menarik usulan karena kami belum ketemu," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa. Dia menambahkan, pencabutan usulan oleh tujuh orang itu atas permintaan fraksi.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat, kasus perpajakan yang antara lain melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan, cukup dituntaskan oleh Panitia Kerja Mafia Hukum dan Mafia Pajak di Komisi III DPR.

Sutjipto mengaku sudah menjelaskan kepada fraksinya maksud pengusulan hak angket, yaitu membantu pemerintah membereskan masalah pajak. "Namun, jika fraksi punya pendapat lain, saya ikut saja," tutur Sutjipto.

Ahmad Yani, salah satu inisiator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meyakini, usulan hak angket akan terus berjalan meski Partai Demokrat menarik dukungan. "Tidak sulit untuk menambah jumlah pengusul," tutur Yani.

Bambang Soesatyo, inisiator lain dari Fraksi Partai Golkar, menduga, langkah Fraksi Partai Demokrat yang menarik dukungan karena mereka sudah tahu siapa mafia pajak yang selama ini menjadi masalah. "Mafia ini selalu dekat dengan kekuasaan," kata Bambang.

Secara terpisah, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi, seusai melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, mengatakan, penyidik kepolisian, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak dapat memeriksa secara langsung dokumen pajak 151 perusahaan yang disebut-sebut berhubungan dengan Gayus Tambunan. Dokumen pajak perusahaan-perusahaan itu sebagai wajib pajak merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat keluar dari Direktorat Jenderal Pajak.

Fuad Rahmany mengatakan, Ditjen Pajak akan transparan membantu aparat penegak hukum melakukan penelitian dokumen pajak. "Menyangkut kerahasiaan wajib pajak, kami akan jaga," katanya.

Ito menambahkan, berkas pemeriksaan dugaan kasus gratifikasi dan pencucian uang terkait kepemilikan uang Gayus sebesar Rp 28 miliar—yang sisa dan disita sebesar Rp 10,4 miliar—termasuk harta Gayus senilai Rp 74 miliar, sudah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung. (NWO/FER)

KOMPAS, KAMIS, 27 JANU

MAFIA PERPAJAKAN

Kementerian Keuangan Belum Berikan Data

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diminta berkomitmen untuk turut menuntaskan dugaan mafia pajak di balik kasus mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Hal itu karena sampai Rabu (26/1) Ditjen Pajak belum menyerahkan data yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi perihal wajib pajak yang perkaranya ditangani Gayus.

Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu, mengakui, KPK belum menerima data yang diminta dari Ditjen Pajak. "Katanya masih dipersiapkan," ujarnya.

Johan menambahkan, mungkin data yang diminta KPK soal wajib pajak yang ditangani Gayus baru akan diserahkan pekan ini.

Sebelumnya, KPK meminta data dari Ditjen Pajak dan akan menemui Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Namun, Polri bergerak lebih cepat dan lebih dulu mendapatkan data soal perusahaan yang diduga terkait Gayus.

Ketua KPK Busyro Muqoddas berulang kali menyatakan, komisi itu akan fokus pada aliran dana dari dan ke Gayus Tambunan. KPK akan memeriksa wajib pajak, termasuk perusahaan yang diduga memberi suap kepada Gayus untuk memenangkan kasus di Pengadilan Pajak.

Busyro juga menegaskan akan mengusut dugaan keterlibatan atasan atau rekan Gayus di Ditjen Pajak dalam kasus itu.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, Ditjen Pajak sebaiknya menunjukkan komitmen pemberantasan mafia pajak dengan segera menyerahkan data yang diminta KPK. "Jika mereka aktif membantu hal ini akan menepis tudingan melindungi mafia pajak," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, beberapa data terkait kasus Gayus diduga telah disembunyikan sehingga menyulitkan pengusutan perkara yang saat ini sudah sampai ke tahap penyelidikan.

Jasin juga menyesalkan sikap Ditjen Pajak yang mengabaikan sejumlah rekomendasi KPK untuk memperbaiki sistem perpajakan. "Ditjen Pajak sudah (dikaji) saat dirjen pajak dijabat Pak Darmin Nasution. Namun, belum melaksanakan rekomendasi KPK," kata Jasin lagi.

Wapres akan undang

Secara terpisah, Wakil Presiden Boediono menyambut baik langkah KPK yang menyelidiki kasus terkait Gayus Tambunan. Wapres juga akan mengundang Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk hadir dalam rapat koordinasi bersama penegak hukum lain di Istana Wapres.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, menyatakan, pertemuan bersama penegak hukum dengan KPK bisa kapan saja. "Hal ini tergantung kebutuhan kita nanti, bilamana ada yang memang ingin disinergikan bersama antara Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, serta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Tentu KPK akan diundang," ujar Yopie.

Menurut dia, meski pelaporan aparat penegak hukum dan kementerian terkait kasus Gayus dilakukan dua mingguan, pertemuan bersama dapat kapan saja. Apalagi KPK sekarang meningkatkan status penanganan kasus Gayus pada tahap penyelidikan.

Dengan adanya KPK, ujar Yopie, Wapres, yang dimintai bantuan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawasi dan mengoordinasi aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus Gayus, dapat menjalankan sinergi dengan baik.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto mempersilakan KPK turun tangan dalam penuntasan kasus Gayus. "Ya, silakan. Korupsi kan ranah KPK juga," ungkapnya.

Di Surabaya, Jawa Timur, Jaksa Agung Basrief Arief memastikan penanganan kasus Gayus di Kejaksaan belum melibatkan KPK. Kasus jaksa Cirus Sinaga, yang disangka terlibat kasus Gayus, masih ditangani kepolisian.

Di Jakarta, Rabu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki mengingatkan, keputusan KPK untuk menangani kasus Gayus akan menuai tekanan politik yang besar dari pihak yang diduga terkait dengan mafia hukum dan mafia pajak. Bahkan, tak menutup kemungkinan, KPK juga bakal mendapatkan hambatan teknis dari oknum institusi pemerintah ataupun penegak hukum yang diduga terlibat dalam kasus Gayus itu. Namun, KPK tetap harus melangkah maju.

(FAJ/BEE/HAR/WHY/AIK/FER)

KOMPAS, SABTU, 29 JANUARI 2011

MAFIA PAJAK

Mantan Direktur Keberatan dan Banding Pajak Ditahan

JAKARTA, KOMPAS — Setelah melakukan pemeriksaan sejak Jumat (28/1) siang, penyidik Kepolisian Negara RI akhirnya menahan tersangka mantan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bambang Heru Ismiarso. Bambang Heru dijerat dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus proses keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta. "Bambang Heru Ismiarso, mantan Direktur Keberatan dan Banding yang diperiksa sebagai tersangka, ditahan," kata Boy, Jumat.

Saat ditanya apakah penyidik mengarahkan penyidikan terhadap Bambang Heru dalam dugaan kasus mafia pajak terkait 149 perusahaan yang disebut-sebut berurusan dengan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Boy mengatakan, penyidik akan bekerja secara proporsional dan terukur.

"Itu kami lihat babak berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada tim penyidik gabungan untuk menemukan fakta hukum yang layak menjadi alat bukti. Kita patut menunggu karena banyak hal yang harus dipelajari," kata Boy.

DK 0009 4753

Terkait dengan pemeriksaan Bambang Heru dalam kasus PT Surya Alam Tunggal (PT SAT), Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengingatkan, Polri jangan sampai terjebak pada penanganan kasus yang kecil. "Kasus PT SAT merupakan kasus yang kecil," kata Febri.

Sebaliknya, lanjut Febri, pihak kepolisian perlu mengusut dugaan tindak pidana yang lebih besar, yaitu terkait dengan dugaan kasus mafia pajak yang terkait dengan 149 perusahaan yang berurusan dengan Gayus HP Tambunan. "Polisi memang sudah sulit diharapkan dapat mengusut. Namun, polisi perlu lebih maksimal dan berbagi tugas dengan KPK," ujarnya.

Kasus-kasus Penggelapan Pajak

Gayus HP Tambunan	
(Pegawai Golongan III A di Ditjen Pajak, Jakarta)	Dituntut 20 tahun penjara (22/12/2010)
Bahasyim Assiffie	
(Mantan Pejabat Eselon II Ditjen Pajak, Jakarta)	Status terdakwa, ditahan (9/4/2010)
Suhartanto	
(Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Rungkut, Surabaya)	Status tersangka, ditahan (18/4/2010)
Maruli Pandapotan Manurung	
(Mantan Kepala Seksi Keberatan Banding Ditjen Pajak, Atasan Gayus HP Tambunan)	Status tersangka (21/6/2010)
Humala Napitupulu	
(Pegawai Ditjen Pajak)	Status terdakwa (8/12/2010)

Sumber: Litbang Kompas — BESTARI

Hal sama dikatakan Johnson Panjaitan, kuasa hukum salah satu petugas pajak, Humala Napitupulu, dalam dugaan kasus pajak terkait dengan PT SAT. Dikatakan, Polri terlalu mereduksi pemeriksaan terhadap Bambang Heru dengan mengaitkan pada kasus PT SAT. "Bambang Heru perlu diperiksa dalam dugaan kasus mafia pajak terkait dengan 149 perusahaan," katanya.

Johnson menjelaskan, dalam kasus PT SAT sebenarnya tidak ada unsur pidana. Alasannya, pengajuan keberatan pajak PT SAT sudah disetujui Direktorat Jenderal Pajak. Atas dasar itu, PT SAT menerima pengembalian kewajiban pajak yang telah disetor, termasuk bunga sebesar Rp Rp 570 juta. (FER)

LAMPIRAN 2

BERITA KASUS MAFIA PAJAK GAYUS HALOMOAN P TAMBUNAN

DI KORAN TEMPO

KORAN TEMPO
SELASA, 2 NOVEMBER 2010

Pembocor Rencana Tuntutan Gayus Diperiksa

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI akan memeriksa sejumlah saksi yang diduga punya kaitan dengan bocornya rencana tuntutan Gayus Halomoan Tambunan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan, surat panggilan akan dikirim pekan ini.

Kepolisian akan memeriksa 10 saksi yang telah diajukan Kejaksaan Agung, dan beberapa saksi tambahan. Pihaknya juga akan mendalami dugaan suap terhadap jaksa Cirus Sinaga. "Kita mulai dari pemalsuan dulu, nanti kita lihat apa motifnya (pemalsuan)," ujarnya.

Akhir pekan lalu, Kepolisian menerima berkas pengaduan kasus bocornya rencana tuntutan dari Kejaksaan Agung. Dalam laporan tercantum antara lain nama ketua tim jaksa peneliti Cirus Sinaga, dan mantan pengacara Gayus, Haposan Hutagalung, sebagai terlapor. Keduanya dicurigai membocorkan dan mengatur rencana tuntutan terhadap Gayus pada 2009.

Pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, mengaku tidak percaya pada penyidikan yang dilakukan polisi terhadap Cirus dan Haposan. Kecurigaan ini bersumber dari kesamaan penyidik yang memeriksa Cirus dan Haposan.

"Kasus ini tidak bakal terbongkar," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Ia menyarankan agar dibentuk tim independen yang memeriksa kedua tersangka itu.

Muhtadi Asnun, hakim yang menangani kasus Gayus pada 2009, mengaku tak tahu bocornya rencana tuntutan. Namun proses penuntutan sempat tertunda tiga kali."Saya tidak tahu, itu urusan mereka (jaksa)," ujarnya.

Kemarin Gayus kembali menegaskan bahwa ia memiliki bukti bocornya rencana tuntutan itu. "Nanti saya akan menyerahkan bukti Haposan minta uang terkait rencana tuntutan," katanya. Namun ia enggan menjelaskan jenis bukti yang dimiliki.

Dalam sidang dengan terdakwa Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, hakim Albertina Ho menegur jaksa Rhein Singal karena tak berhasil menghadirkan saksi Muhtadi Asnun. Ia adalah hakim yang menangani perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang, Banteng. Jaksa juga diminta menghadirkan saksi Alif Kuncoro dan Imam Cahyo Maliki.

● FEBRIYAN | CORNILA DESYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 18 NOVEMBER 2010

KPK Siap Ambil Alih Kasus dari Polisi

"Polisi jangan berlagak pilon."

PRASETYO UTOMO (ANTARA)

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap menjelaskan soal lima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas kasus yang diterima jaksa dari polisi dalam kasus keluarnya Gayus H. Tambunan dari Rutan Brimob di Jakarta, Selasa lalu.

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto, mengatakan tengah mempertimbangkan kemungkinan mengambil alih penanganan kasus tersangka mafia pajak Gayus H. Tambunan dari kepolisian.

"Kalau mereka mampu menangani kasus Gayus, ya, silakan. Kalau tidak mampu, kami ambil," kata Bibit di kantornya kemarin.

Namun Kepolisian Republik Indonesia menanggapi dingin tantangan KPK itu. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani mengatakan, polisi tetap akan menyelesaikan kasus Gayus. "Apa pun kami lakukan dengan prosedur hukum," kata Yusuf di Lapangan Bhayangkari, Markas Besar Polri, kemarin.

Saat ini Polri masih berutang dua perkara yang melibatkan Gayus. Utang pertama adalah kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus. Dalam kasus itu Gayus menyebutkan sejumlah perusahaan yang ia bantu dalam urusan pajak. Utang kedua adalah kasus keluarnya dia dari Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, bahkan sampai menonton tenis di Nusa Dua, Bali.

Badan Reserse Kriminal Polri telah menangani kasus mafia pajak sejak Maret lalu. Perkara Gayus sebagai terdakwa penyuap aparat sedang disidangkan di pengadilan. Adapun perkara Gayus sebagai penerima suap dari puluhan perusahaan belum dilimpahkan.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan polisi kesulitan membongkar kasus mafia pajak yang melibatkan banyak perusahaan besar itu. Penyidik belum mengantongi bukti penyuapan dari wajib pajak kepada Gayus. "Kalau mafia pajak kan harus dibuktikan, tidak cukup hanya dengan katanya," ujar Ito kemarin.

Pengacara Gayus, Pia Akbar Nasution, menyesalkan klaim kepolisian yang seolah-olah tak menemukan bukti aliran dana ke rekening Gayus yang totalnya lebih dari Rp 100 miliar. "Polisi jangan berlagak pilon soal itu," kata Pia melalui telepon kemarin.

Jika serius membongkar mafia pajak, menurut Pia, polisi seharusnya menelusuri dugaan suap itu, antara lain melalui Direktorat Jenderal Pajak. "Ada sistem komputer kan di sana untuk mengecek itu," kata Pia.

Apalagi, menurut Pia, dalam pemeriksaan awal oleh penyidik Bareskrim Polri, Gayus sudah membocorkan nama-nama perusahaan penyetor duit ke rekeningnya. "Semuanya dia ungkap, termasuk yang ia dapatkan dari perusahaan-perusahaan Bakrie," kata Pia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta kepolisian serius mengusut kasus pelesiran Gayus ke Nusa Dua. Djoko pun telah meminta Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menuntaskan kasus pelesiran Gayus pada bulan pertamanya menjabat.

"Ini langkah pertama yang harus Kapolri kerjakan, agar tidak mencoreng kepolisian," kata Djoko sebelum rapat koordinasi terbatas di kantor Presiden, Selasa lalu. "Dengan perhatian media massa dan publik yang begini besar, saya kira kepolisian tak akan main-main," ujar Djoko.

● BUNGA MANGGIASIH | FEBRIYAN | CORNILA DESYANA

KORAN TEMPO
SELASA, 23 NOVEMBER 2010

Pintu Terbuka bagi KPK untuk Tangani Gayus

"Kalau tak mampu, kami lemparkan bendera putih."

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali didesak agar mengambil alih penanganan kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan. Menurut pengamat dan praktisi hukum, juga politikus, pintu terbuka lebar bagi komisi antikorupsi itu untuk menangani kasus mantan pegawai pajak yang memiliki kekayaan puluhan miliar itu.

"KPK sudah sangat layak mengambil alih kasus Gayus. Jangan saling tunggu, ambil langsung kasusnya," kata ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Edy O.S. Hiariej, semalam. Namun, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., sebaiknya KPK mengambil alih kasus yang belum ditangani polisi. "Kalau soal pelesiran Gayus ke Bali dan kasus PT SAP (Surya Alam Tunggal), biarkan polisi yang menangani," katanya.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan, untuk kepentingan yang lebih besar, tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tak mengambil alih kasus Gayus. Apalagi sejak awal polisi terkesan enggan mengusut tuntas para pengemplang besar pajak berkaitan dengan kasus Gayus.

"Mungkin karena ada kesungkanan kepada beberapa oknum petinggi mereka yang diduga kuat terlibat," kata Didi. Berdasarkan hal itu, ia melanjutkan, "Sesungguhnya pintu telah terbuka sangat lebar bagi KPK untuk mengusut kasus Gayus."

Menurut Hiariej, sesuai dengan undang-undang, KPK telah memenuhi tiga kriteria untuk menangani suatu kasus, termasuk Gayus. Ketiganya adalah, perkara itu melibatkan penegak hukum, nilai korupsinya di atas Rp 1 miliar, dan menyita perhatian publik yang besar. Dengan dipenuhinya kriteria-kriteria itu, kata dia, "Seharusnya KPK tak perlu lagi menunda untuk mengambil alih kasus Gayus."

Didi menambahkan, rakyat sudah lelah dan bosan melihat segala proses di kepolisian yang belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengusutan terhadap para pengemplang besar di belakang kasus Gayus. "Artinya, di sini jelas bahwa inti persoalan besarnya sama sekali belum tersentuh, yaitu terbongkarnya megaskandal triliunan mafia pajak," ujarnya.

Berkaitan dengan kasus Gayus, pimpinan KPK berencana bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Menurut Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK, surat permohonan sudah dikirim pekan lalu. Namun, kapan pertemuan bakal dijadwalkan, ia belum tahu.

Dari hasil pertemuan itulah KPK baru bisa mengetahui bagian mana dari kasus Gayus yang bisa mereka tangani. "Kami siap saja mengambil alih, tapi kami koordinasikan dulu apa yang sudah dikerjakan Polri dan kasus mana yang bisa ditindaklanjuti," ujar Bibit.

Hingga kemarin, Kepolisian Republik Indonesia menyatakan masih mampu menangani kasus mafia pajak Gayus, termasuk yang melibatkan sejumlah perusahaan besar. "Kalau memang tidak mampu, kami akan buat surat. Kami lemparkan bendera putih," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Marwoto Soeto.

● RIRIN AGUSTIA | AMIRULLAH | ISWA SAVITRI | AMIRULLAH | FEBRIYAN | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
SELASA, 23 NOVEMBER 2010

GAYUS SETUJU KPK AMBIL ALIH

JAKARTA — Tersangka mafia pajak, Gayus H. Tambunan, menyatakan tak keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasusnya dari kepolisian. "Enggak masalah," ujarnya di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Desakan agar KPK mengambil alih kasus Gayus terus berdatangan dari berbagai pihak. Tak hanya dari pengamat hukum dan mantan polisi, tapi juga dari kalangan politikus. Namun, hingga kemarin, pimpinan KPK belum memutuskan sikap soal pengambilalihan penanganan kasus tersebut.

Menurut pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, sebaiknya kasus Gayus dioper dari kepolisian ke komisi antikorupsi. "Daripada serba tanggung begini, lebih baik diserahkan ke KPK," kata Buyung, yang kemarin mendampingi kliennya di persidangan.

Buyung mengakui, semula ia percaya bahwa Tim Independen Kepolisian RI akan membongkar tuntas kasus ini. Ternyata perkara mafia peradilan dan pajak yang berkaitan dengan Gayus malah dikerdilkan. "Saya jadi kehilangan kepercayaan," katanya.

Ia berharap, siapa pun yang menangani Gayus harus mengambil prioritas membongkar sumber dan aliran duit Rp 25 miliar milik Gayus. Sebab, mantan pegawai pajak golongan III-A itu penghasilan resminya cuma Rp 9-12 juta sebulan.

Menurut Buyung, duit miliaran itu diduga berasal dari sejumlah perusahaan wajib pajak yang ditangani Gayus, termasuk tiga perusahaan Grup Bakrie. Atas dugaan itu, pihak Grup Bakrie membantah tudingan telah menyuap Gayus. Namun, menurut Buyung, "Uang kan enggak jatuh dari langit."

● ISMA SAVITRI | CORNILA DESYANA | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
RABU, 24 NOVEMBER 2010

KPK Urung Ambil Alih Kasus Gayus

Presiden masih percaya kepada polisi.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilakan Kepolisian Republik Indonesia menyelesaikan pengusutan kasus suap pajak yang diterima Gayus H. Tambunan. "Silakan jalan terus, kita akan sama-sama," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, setelah bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo di Markas Besar Polri kemarin.

Menurut Bibit, dalam pertemuan selama dua jam itu disepakati bahwa Polri akan meneruskan pengusutan semua kasus yang melilit Gayus, termasuk aliran dana Rp 100 miliar lebih dari sejumlah perusahaan ke rekening Gayus. Adapun KPK akan mengambil posisi sebagai pengawas atas pengusutan kasus tersebut.

"Secara rutin, kami akan koordinasi," kata Bibit, yang didampingi Wakil Ketua KPK lainnya, Chandra M. Hamzah dan M. Jasin. "Untuk kasus Gayus, akan ada pembicaraan secara teknis."

Sejauh ini polisi baru melimpahkan berkas kasus Gayus sebagai penyuap aparat hukum ke pengadilan. Kemarin Polri juga melimpahkan berkas kasus bebasnya Gayus keluyuran dari tahanan kepada kejaksaan. Adapun tindak lanjut atas pengakuan Gayus bahwa dirinya menerima duit dari puluhan perusahaan bermasalah belum jelas kemajuannya.

Karena lambannya pengusutan oleh Polri, sejumlah kalangan meminta KPK mengambil alih pengusutan atas aliran duit dari puluhan perusahaan tersebut. Baru-baru ini, Bibit Samad pun menyatakan bahwa KPK siap mengambil alih bila polisi tidak mampu membongkar kasus tersebut.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo kemarin mengatakan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan pengusutan kasus kongkalikong puluhan perusahaan dengan pegawai pajak itu. Timur juga menolak anggapan bahwa pengusutan kasus mafia pajak oleh polisi mandek. "Saya kira tidak ada yang mandek," kata dia.

Ihwal lambannya pengusutan dugaan penyuapan oleh sejumlah perusahaan, Timur malah menyalahkan Gayus. "Kembali pada pemberi informasi. Kalau lengkap, saya kira cepat. Tapi, kalau tak mau kerja sama, susah kan," kata Timur.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kemarin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memimpin langsung upaya membongkar kasus mafia pajak. "Tidak ada cara lain, harus ada *big bang*, ledakan dahsyat," kata Din di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurut Din, penegakan hukum terkesan amburadul, sehingga perlu langkah konkret dari pemimpin negeri ini. "Presiden harus turun tangan, melakukan gerakan secara serius," ujar Din.

Namun juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Yudhoyono tak akan menginstruksikan agar kasus mafia pajak ditangani KPK. Presiden masih mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian. "Presiden percaya sepenuhnya bahwa sistem sudah bekerja," kata Julian. ● FEBRIYAN | MUNAWWAROH | EKO ARI WIBOWO | CORNILA DESYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 25 NOVEMBER 2010

Koalisi Sipil Sesalkan Sikap Presiden Soal Gayus

KPK masih berpeluang mengambil alih kasus.

JAKARTA — Para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan kecewa terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memilih membiarkan kasus Gayus H. Tambunan ditangani kepolisian ketimbang mengalihkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemarin perwakilan Koalisi mengadukan kekecewaan mereka kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Bergabung dalam koalisi itu antara lain Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Dalam surat terbuka untuk Presiden yang salinannya dibagikan kepada wartawan, Koalisi menyatakan kekecewaan yang mendalam dan kegerahan terhadap praktek mafia hukum yang makin marak. Koalisi pun menilai penegakan hukum memburuk dan komitmen pemerintahan dalam memberantas korupsi kian lemah.

Mewakili Koalisi, pengacara senior Todung Mulya Lubis mengatakan kasus mafia hukum dengan terdakwa Gayus terlalu besar untuk ditangani Kepolisian Republik Indonesia. "Kasus ini terlalu serius untuk ditangani kepolisian," kata Todung seusai pertemuan kemarin.

Menanggapi desakan berbagai pihak agar KPK mengambil alih kasus Gayus, juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, dua hari lalu mengatakan Presiden tidak akan menginstruksikan kepada polisi untuk menyerahkan kasus tersebut. Menurut Julian, Presiden masih percaya bahwa sistem di kepolisian sudah bekerja dengan baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi pun akhirnya mempersilakan Polri menangani kasus Gayus, termasuk pengusutan aliran dana lebih dari Rp 100 miliar ke rekening Gayus. KPK, yang sempat menyatakan siap mengambil alih kasus tersebut, memilih hanya mengawasi pengusutan oleh polisi.

Menurut Todung, Koalisi khawatir ada upaya menutupi keterlibatan aktor besar di balik kasus mafia pajak Gayus. Indikasinya terlihat dari dakwaan jaksa yang hanya menyebutkan keterlibatan perusahaan kecil, yakni PT Surya Alam Tunggal. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar sama sekali tidak disebut-sebut. Padahal, kepada penyidik dan hakim, Gayus misalnya pernah mengaku menerima uang sekitar Rp 30 miliar dari tiga anak perusahaan Grup Bakrie, meski itu telah dibantah pihak Bakrie. "Ini adalah '*cover-up*'. Itu tidak bisa dibiarkan," ujar Todung.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan KPK harus mengawasi penanganan kasus Gayus oleh polisi secara intensif. "Jangan hanya satu kali koordinasi," kata Achmad.

Kalaupun memilih peran supervisi, menurut Achmad, KPK masih berpeluang mengambil alih kasus Gayus. "Itu dimungkinkan oleh undang-undang," ujar Achmad.

Namun, menurut Achmad, pengambilalihan kasus tidak semudah yang tersurat dalam undang-undang. Apalagi hubungan KPK dengan Polri pernah terganggu ketika polisi menjadikan dua pimpinan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan. "Itu menimbulkan trauma psikologis," kata Achmad.

● MAHARDIKA SATRIA HADI | CORNILA DESYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 25 NOVEMBER 2010

ADNAN BUYUNG:

PRESIDEN KURANG BERTANGGUNG JAWAB

"Presiden harus bertanya ke kepolisian sudah sampai mana kemajuannya (kasus Gayus)."

JAKARTA — Pengacara Gayus Halomoan Tambunan, Adnan Buyung Nasution, mengkritik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanganan kasus mafia pajak. "Presiden kurang bertanggung jawab dan memahami kasus ini. Dia harus meluruskan jika kepolisian tidak benar," ujar Buyung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

"Dalam sumpahnya pun, Presiden harus menegakkan hukum dan keadilan," kata dia.

Buyung kembali menegaskan, kasus mafia pajak ini harus diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau ada perkara yang bengkok, dipermainkan, KPK diberi wewenang mengambil alih," kata dia.

Jika kepolisian merasa mampu menangani kasus ini, Buyung menyarankan agar kepolisian menunjukkannya kepada publik. "Jangan bilang ada kasus sedang diberkas tapi enggak tahu sampai kapan berkasnya selesai," tuturnya.

Buyung juga mengimbau agar Presiden memberi tenggat bagi kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. "Presiden harus bertanya ke kepolisian sudah sampai mana kemajuannya (kasus Gayus), berapa lama lagi? Harus ada *planning*, dong," ujar Buyung.

Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, belum dapat dimintai konfirmasi soal tudingan Buyung. Namun, sebelumnya, Julian mengatakan Presiden masih mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian. "Presiden percaya sepenuhnya bahwa sistem sudah bekerja," kata Julian, Selasa lalu.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengatakan KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan kasus Gayus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Ia juga meluruskan pemberitaan yang menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono berpandangan agar kasus ini hanya ditangani kepolisian. "Saya sudah berkoordinasi dengan juru bicara kepresidenan. Pada dasarnya yang dimaksud adalah penanganan kasus utamanya, yang terkait dengan suap tahanan yang sekarang sedang berjalan," kata dia.

Para calon pemimpin KPK yang bakal dipilih DPR hari ini menyambut baik usulan agar kasus Gayus ditangani komisi antikorupsi itu. Menurut Busyro Muqoddas, KPK berwenang mengambil alih kasus Gayus dari kepolisian dan kejaksaan. "Dan itu legal," kata dia dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK di gedung DPR kemarin.

Calon pemimpin KPK lainnya, Bambang Widjojanto, juga setuju kasus suap pajak Gayus ditangani KPK. "Saya tak melihat alasan KPK tak bisa mengambil alih kasus ini," kata Bambang dalam uji kepatutan di Komisi Hukum DPR tadi malam.

● FEBRIYAN | ISMA SAVITRI | ANTON SEPTIAN | MAHARDIKA SATRIA HADI | SAPTO Y

KORAN TEMPO
JUMAT, 26 NOVEMBER 2010

Polri Siap Gelar Kasus Gayus di Depan KPK

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI siap membeberkan perkembangan penanganan kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Bareskrim berencana melakukan gelar perkara dengan mengundang semua pihak yang terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum.

"Bareskrim Polri akan mengundang Satgas Anti-Mafia Hukum, KPK, Kejaksaan Agung, Penasihat Ahli Kapolri, dan Staf Ahli Kapolri Bidang Pidana," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan kepada *Tempo* kemarin.

Iskandar menambahkan, gelar perkara ini akan dilaksanakan pekan depan. "Pak Ito (Komisaris Jenderal Ito Sumardi) bilang pekan depan, belum tahu waktu pastinya," ujarnya.

Menurut dia, gelar perkara akan dilakukan untuk semua kasus yang menyangkut mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A itu. "Baik yang mafia hukum, mafia pajak, maupun yang penyuapan kepada petugas rumah tahanan."

Pemaparan kasus ini dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kemampuan Polri dalam mengungkap perkara ini. "Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Polri, hasilnya sejauh mana, hambatannya seperti apa."

Polisi juga mengharapkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam gelar perkara itu. "Akan ada diskusi, ada masukan-masukan dari semua pihak, sehingga akan terlihat langkah-langkah ke depan seperti apa yang harus dilakukan," ujar Iskandar.

Soal kemungkinan pelimpahan kasus ini ke KPK seusai gelar perkara, Iskandar belum dapat menjawabnya. "Kita lihat saja pekan depan."

Meski Gayus sudah berkali-kali mengungkapkan siapa penyuapnya dalam sidang, polisi berkukuh mengaku tak memiliki cukup bukti untuk menjerat mereka yang disebut-sebut itu. "Jadi uang itu belum tahu asal-usulnya bagaimana. Dari siapa," kata Iskandar. Ia mengatakan kunci pengungkapan kasus ini berada di tangan Gayus. ● FEBRIYAN

KORAN TEMPO

SABTU, 27 NOVEMBER 2010

Polisi Sita Rumah dan Mobil Gayus

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menyita mobil dan rumah mewah milik tersangka mafia pajak Gayus H. Tambunan yang berlokasi di perumahan Gading Park View, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, penyitaan itu berkaitan dengan penanganan kasus mafia pajak Gayus yang kini tengah disidik polisi.

"Penyitaan dilakukan sejak sebulan lalu," ujar Iskandar kemarin. Meski dilakukan penyitaan, istri dan anak Gayus tetap diperbolehkan tinggal di sana. Sebab, hanya surat-suratnya yang disita.

Selain menyita mobil dan rumah, sebelumnya polisi sudah menyita harta milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A itu yang jumlahnya mencapai Rp 74 miliar. Harta berupa uang dolar Amerika Serikat dan beberapa emas batangan ini disita dari *safe deposit box* milik Gayus. "Sudah dilakukan penyitaan resmi, sekarang dititipkan di Bank Mandiri," ujar Iskandar.

Pekan depan, kata Iskandar, ketiga barang bukti itu akan digunakan dalam gelar perkara kasus Gayus antara Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. "Nanti akan dibeberkan," katanya.

Polisi menyidik Gayus berkaitan dengan mafia pajak lantaran ia diduga menerima uang dari sejumlah perusahaan wajib pajak yang pernah ditanganinya.

Meski menjadi tersangka dan menghuni tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Gayus sempat membikin ulah. Tiga pekan lalu, ia kedapatan menonton pertandingan tenis di Bali. Diduga, aksinya itu berjalan mulus lantaran ia menyuap sejumlah polisi yang berjaga di sana dengan uang ratusan juta rupiah.

Supaya Gayus tak bisa lagi menyuap, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengusulkan agar Gayus dimiskinkan. "Negara melakukan penyitaan atas seluruh kekayaan atas nama Gayus," katanya dua pekan lalu. Ia berharap tindakan itu menjadi momentum perbaikan bagi pemberantasan korupsi. "Biar orang lain kapok," kata Mahfud.

● FEBRIYAN | AMIRULLAH | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
SABTU, 27 NOVEMBER 2010

KPK Telusuri Atasan Gayus

> "Di atas Gayus itu siapa, apakah Gayus bermain sendiri?"

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru terpilih, Busyro Muqoddas, menyatakan penyidik komisi antikorupsi akan menelusuri atasan tersangka mafia pajak Gayus H. Tambunan. Tindakan itu dilakukan karena Gayus tak mungkin melakukan aksinya sendirian.

"Di atas Gayus itu siapa, apakah Gayus bermain sendiri?" kata Busyro di kantornya kemarin. Menurut dia, struktur pemerintahan di negeri ini, pegawai bawahan tak akan mengambil tindakan penting tanpa setahu dan seizin atasannya. "Dan di atas (Gayus) ini menarik untuk ditelusuri," katanya.

Gayus adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A dengan penghasilan Rp 9-12 juta sebulan. Namun ia memiliki rekening puluhan miliar rupiah, yang diduga berasal dari setoran perusahaan wajib pajak yang ditanganinya. Tiga di antaranya, menurut pengakuan Gayus, adalah perusahaan milik Grup Bakrie. Namun Nirwan Bakrie, yang mewakili keluarga Bakrie, membantah ucapan Gayus tersebut. Kini kasus ini masih ditangani Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

Untuk membongkar jejaring mafia pajak di belakang Gayus, kalangan pegiat antikorupsi, pengamat, praktisi hukum, dan politikus mendesak agar KPK mengambil alih penanganan kasus itu. Namun, hingga kemarin, lembaga itu masih menunggu langkah kepolisian.

"Dari dulu, KPK siap. Kalau Polri siap membagi kasus, itu bagus," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto kemarin. Menurut dia, kejelasan KPK menangani bagian mana dari kasus Gayus akan terjawab pada Selasa depan setelah menggelar perkara dengan Bareskrim Mabes Polri. Setelah pertemuan itu, kata Bibit, "Akan jelas siapa menangani apa."

Dalam kasus ini, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bertemu dengan KPK kemarin. Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana menyatakan hingga kini asal-muasal duit di rekening Gayus yang jumlahnya miliaran rupiah itu masih simpang-siur. Pengusutan tuntas kasus Gayus, kata Denny, mendesak dilakukan. "Agar tak terjadi fitnah," ujarnya.

Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah mengatakan pihaknya siap membantu rencana KPK mengusut atasan Gayus. "Iya, dong (kami siap). Selama ini kami juga sudah transparan," katanya tadi malam.

Dalam kasus ini, selain Gayus, dua pegawai pajak yang sudah menjadi tersangka adalah Humala Napitupulu (kolega Gayus) dan Maruli Pandapotan Manulung (atasan Gayus). Mereka menjadi tersangka kasus pajak PT Surya Alam Tunggal. Namun, menurut Indonesia Corruption Watch, masih ada lagi dua atasan Gayus yang layak dijerat. ● MUNAWWAROH |

ANTON SEPTIAN | FEBRIANA FIRDAUS | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 2 DESEMBER 2010

Polisi Tak Ajak Satgas Gelar Kasus Gayus

KPK mengirim utusan untuk menagih janji polisi.

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia tidak akan mengajak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat menggelar perkara Gayus H. Tambunan. Kepolisian juga tak bakal mengundang pengacara Gayus, yang berjanji memberikan keterlibatan sejumlah pengusaha dalam kasus mafia pajak tersebut.

"Pihak yang tidak menyangkut materi dan substansi perkara belum perlu diundang," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di Jakarta kemarin.

Menurut Iskandar, Badan Reserse Kriminal Polri hanya akan mengundang Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tujuannya, menyamakan persepsi di antara lembaga penegak hukum itu.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, sebelumnya mengatakan menunggu inisiatif Polri untuk melibatkan mereka dalam gelar perkara kasus Gayus. Adapun pengacara Gayus, Sadly Hasibuan, kemarin kembali meminta dilibatkan dalam gelar perkara.

Semula, gelar perkara kasus Gayus dijadwalkan berlangsung Selasa lalu. Tapi Kepolisian menundanya tanpa batas waktu yang jelas. Alasan polisi, mereka perlu melakukan gelar perkara internal kasus itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menagih Polri untuk segera menggelar perkara Gayus. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan sudah mengutus Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

"Tapi kami belum dengar kabar kapan akan dijadwalkan," kata Jasin di sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Menurut Iskandar, polisi kesulitan melacak asal-usul harta Gayus, pegawai pajak golongan III-A, yang bernilai lebih dari Rp 100 miliar. Meski sudah bekerja sama dengan bank, kata Iskandar, "Kami tak bisa menemukan asal-usul uang itu."

Padahal, dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada polisi, Gayus telah membeberkan muasal kekayaannya. Di persidangan, misalnya, Gayus mengaku menerima uang sekitar Rp 30 miliar dari tiga perusahaan Grup Bakrie. Pihak Bakrie memang telah membantah pengakuan Gayus. Namun pengacara Gayus mengatakan memiliki dokumen yang bisa menjadi bukti penyuapan oleh sejumlah perusahaan kepada Gayus.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin membuat penetapan yang mengizinkan Polri bila ingin meminjam Gayus untuk reka ulang perkara. Saat ini memang terdakwa Gayus berstatus tahanan pengadilan yang dititipkan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.

Reka ulang kasus Gayus akan berlangsung di beberapa tempat, yaitu di Hotel Menara Peninsula dan Four Seasons, Apartemen Cempaka Mas, serta Restoran Dapur Sunda Pacific Place. "Terkait asal-usul uang yang Rp 25 miliar," kata pengacara Gayus, Sadli Hasibuan, soal rencana reka ulang perkara itu.

● DIANING SARI | FEBRIYAN | ANTON SEPTIAN

KORAN TEMPO
SABTU, 4 DESEMBER 2010

PENYUAP GAYUS BISA LOLOS

"Dalam pasal gratifikasi, pemberi dana tidak harus dijerat."

JAKARTA — Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan tersangka mafia pajak Gayus H. Tambunan hanya akan dijerat dengan pasal gratifikasi. Alasannya, penyidik kesulitan melacak asal-usul harta kekayaan milik mantan petugas pajak itu. "Sementara ini: gratifikasi," ujar Ito di Jakarta kemarin.

Menurut Ito, polisi tak menambahkan jerat untuk Gayus dengan pasal-pasal suap karena, "Kan (gratifikasi) termasuk penyuapan. Ada yang menyuap, ada yang disuap."

Gayus adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A dengan penghasilan Rp 9-12 juta sebulan. Namun ia memiliki rekening hingga Rp 100 miliar, yang diduga berasal dari setoran perusahaan wajib pajak yang ditanganinya. Tiga di antaranya, menurut pengakuan Gayus, perusahaan milik Grup Bakrie. Namun Nirwan Bakrie, yang mewakili keluarga Bakrie, telah membantah omongan Gayus tersebut.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, penyidik sudah menanyakan asal-usul harta itu kepada Gayus. "Namun, dia tak mengaku sumbernya dari mana," kata Iskandar.

Pengacara Gayus, Pia Akbar Nasution, heran dengan alasan polisi tersebut. Sebab, kliennya telah menyerahkan data dan dokumen mengenai perusahaan-perusahaan yang menyetor kepadanya. "Kepolisian mestinya bisa melacak siapa pihak-pihak yang memberikan dana tersebut," kata Pia.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Rudy Satryo, menilai sangkaan gratifikasi terhadap Gayus tidak tepat. Sebab, sangkaan itu hanya akan menjerat Gayus, sedangkan perusahaan-perusahaan yang menyetor duit kepada Gayus bisa lepas dari jerat hukum.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah sependapat dengan Rudy. "Dalam pasal gratifikasi, pemberi dana tidak harus dijerat," ujarnya.

● FEBRIYAN | DIANING SARI | RIKY FERDIANTO | AMIRULLAH | DWI WIYANA

"Saya kira, tugas kita adalah menyelesaikan masalah Gayus dengan tuntas."

KAPOLRI JENDERAL TIMUR PRADOPO
Saat menjalani *fit and proper test* di DPR, 14 Oktober 2010.

"Kalau cuma gratifikasi, berarti tidak sesuai target awal penyidikan dong?"

PIA AKBAR NASUTION,
Pengacara Gayus Tambunan

KORAN TEMPO
SABTU, 4 DESEMBER 2010

Unsur Penyuapan Kasus Gayus Dinilai Cukup

"Penggunaan hanya pasal gratifikasi, berarti polisi membatasi kasus dari awal."

JAKARTA — Praktisi dan pengamat hukum menilai unsur penyuapan dalam kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus H. Tambunan sudah cukup, yakni adanya pihak yang disuap dan pihak yang menyuap. Karena itu, mereka mempertanyakan sikap kepolisian yang hanya menjerat mantan petugas pajak tersebut dengan pasal gratifikasi.

"Itu tidak tepat. Seharusnya pasal yang digunakan adalah penyuapan," kata pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Rudy Satryo, saat dihubungi tadi malam. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan ke publik, kata dia, "Seharusnya kasus Gayus menggunakan pasal 5, 12, dan 13 undang-undang tindak pidana korupsi."

Tambahan pengenaan pasal penyuapan terhadap Gayus juga disampaikan oleh Taufik Basari, juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil, yang beranggotakan sejumlah lembaga pegiat antikorupsi. Dengan demikian, kata dia, ada alternatif tuduhan primer dan sekunder dalam kasus ini. "Penggunaan hanya pasal gratifikasi, berarti polisi telah membatasi kasus ini dari awal," katanya. "Ini menimbulkan pertanyaan karena di luar strategi penyidikan."

Menurut Taufik, dengan melihat pengakuan Gayus di persidangan, maka penyetoran dana dari sejumlah perusahaan kepada Gayus bisa dikonstruksikan ke dalam pasal penyuapan. Namun ia menyayangkan polisi tidak melakukan hal itu.

Taufik curiga kepolisian sengaja ingin membonsai pengusutan kasus ini. Kecurigaan adanya pembonsaian semakin besar karena ada konflik kepentingan polisi dalam kasus Gayus tersebut. "Sebab, dugaan adanya keterlibatan sejumlah petinggi Polri dalam kasus Gayus sangat besar," katanya.

Adanya penerimaan uang suap juga ditunjukkan Gayus saat melakukan rekonstruksi bersama penyidik pada Kamis lalu. Dalam kegiatan itu, Gayus menerima penyerahan uang dari Alif Kuncoro di dua tempat, yakni di tempat parkir Apartemen Cempaka Mas milik Gayus dan di tempat parkir Hotel Menara Peninsula, Jakarta, yang berada di *basement* hotel. "Ini terkait dengan uang milik Gayus sebesar Rp 25 miliar," ujar Indra Kusnadi, pengacara Gayus, di sela rekonstruksi.

Alif adalah kakak Imam Cahyo Maliki, konsultan pajak yang menghubungkan Gayus dengan tiga perusahaan Grup Bakrie. Gayus mengaku bahwa Alif memberikan uang sebesar US$ 500 ribu kepadanya untuk mengurus perkara pajak PT Kaltim Prima Coal. Sebab, surat ketetapan pajak periode 2001-2005 perusahaan batu bara ini tertahan di Kantor Pajak Besar Gambir karena masalah kurs dolar. Pengakuan Gayus berkaitan dengan uang suap dari Grup Bakrie, termasuk dari Kaltim Prima Coal, telah dibantah oleh Nirwan Bakrie, yang mewakili keluarga Bakrie.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengakui polisi masih memiliki celah untuk menjerat pihak yang memberikan duit kepada Gayus lewat sangkaan gratifikasi. Namun hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pasal penyuapan. Sementara dalam pasal gratifikasi, seseorang hanya dapat dihukum maksimal 3 tahun penjara, dalam pasal suap, maksimal hukuman yang dapat diberikan bisa mencapai seumur hidup. Karena itulah Febri juga sepakat agar pasal penyuapan dikenakan dalam kasus Gayus.

● FEBRIYAN | AMIRULLAH | RIKY FERDIANTO | DWI WIYANA

KORAN TEMPO

SABTU, 4 DESEMBER 2010

KPK Usut Sendiri Kasus Gayus

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tetap akan menyelidiki perkara Gayus H. Tambunan, meski kepolisian akhirnya tak mengundang mereka dalam gelar kasus mafia pajak itu.

"Yang penting ada *clue*, termasuk keterangan, bukti, dan informasi," kata Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin saat dihubungi kemarin.

Namun KPK masih menunggu penjelasan resmi polisi soal mengapa lembaganya tak jadi diajak gelar perkara. "Informasinya kan baru dari Anda (wartawan). Kami tetap menunggu, sebab belum diberi tahu," ujar Jasin.

Pekan lalu, Markas Besar Kepolisian RI menyatakan akan mengundang KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam gelar perkara bersama kasus Gayus. Semula gelar perkara dijadwalkan pada Selasa lalu. Namun Polri menunda rencana itu hingga waktu yang belum ditentukan dan mencoret Satgas dari daftar undangan.

Kemarin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan Polri tak akan melibatkan KPK dalam gelar perkara Gayus. "Pak Kapolri sudah berikan arahan bahwa gelar perkara adalah masalah teknis di penyidik," kata Ito. "Itu sifatnya internal."

Menurut Jasin, koordinasi antarlembaga penegak hukum lewat gelar perkara penting untuk mengetahui seluk-beluk kasus Gayus. "Nanti akan ketahuan apa yang KPK miliki, apa yang polisi miliki," katanya. Lewat gelar perkara, unsur pidana selain yang ditangani polisi pun akan terungkap.

Sembari menunggu gelar perkara bersama yang akhirnya batal, menurut Jasin, KPK terus menelusuri setiap informasi yang masuk soal Gayus. "Kami juga berinisiatif sendiri," kata dia.

Namun Jasin tak menyebutkan perkara Gayus mana yang akan ditangani KPK. Dia hanya mengisyaratkan kasus tersebut di luar perkara yang ditangani polisi. "Antara sesama penegak hukum tidak harus bersinggungan. Enggak bagus," kata Jasin.

Dalam kasus mafia pajak, Gayus baru menjadi terdakwa penyuapan terhadap aparat penegak hukum. Adapun Gayus sebagai penerima suap dari sejumlah perusahaan belum masuk ke pengadilan. Belakangan Gayus kembali jadi tersangka karena keluyuran di luar penjara dengan menyuap aparat.

● ANTON SEPTIAN | FEBRIYAN

minggu 5 DESEMBER 2010

Polisi Dinilai Tak Serius Tangani Gayus

JAKARTA — Para politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menilai kepolisian tidak serius dalam membongkar mafia pajak dengan tersangka Gayus H. Tambunan. Hal itu terlihat dari pilihan polisi yang hanya membidik Gayus dengan pasal gratifikasi tanpa menyertakan pasal penyuapan. Mereka khawatir pasal itu hanya akan menjerat Gayus, sedangkan perusahaan yang setor kepadanya lolos.

"Saat semua orang ingin agar kasus ini dibuka secara telanjang, kepolisian malah seolah-olah menjadi pelindung Gayus," kata Martin Hutabarat, politikus dari Fraksi Gerindra, kemarin. "Seharusnya tidak berhenti di Gayus saja," ia menambahkan.

Kepastian bahwa Gayus hanya dijerat pasal gratifikasi disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Alasannya, penyidik kesulitan melacak asal-usul harta kekayaan milik mantan petugas pajak itu. "Sementara ini, gratifikasi," ujar Ito di Jakarta, Jumat lalu.

Menurut Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat, penanganan kasus ini memang sudah tidak jelas dari awal. Hal itu terlihat, antara lain, polisi baru menangani kasus setoran PT Surya Alam Tunggal kepada Gayus senilai Rp 570,95 juta. Sedangkan kasus aliran dana Rp 28 miliar dan *safe deposit* Rp 75 miliar milik Gayus belum disentuh. "Komisi Hukum akan tanyakan hal ini dalam rapat dengan Kapolri," ujarnya.

Jika kepolisian tidak serius membongkar mafia pajak Gayus, kata Martin, Dewan akan merekomendasikan agar kasus itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, bahkan meminta KPK proaktif mengambil alih kasus tersebut. "Saya heran, kenapa KPK terkesan tidak ada inisiatif mengambil kasus penyuapannya?" ujar Sudding.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyatakan pasal yang dikenakan terhadap Gayus bisa saja bertambah, termasuk penyuapan. Syaratnya, polisi memiliki alat bukti baru. "Masih terus diselidiki, kami masih cari alat bukti baru," katanya. ● SANDY INDRA | PINGIT ARIA | OWI WIYANA

KORAN TEMPO
SENIN, 6 DESEMBER 2010

Gratifikasi Beri KPK Celah Tangani Gayus

KPK terus mengumpulkan data.

JAKARTA — Pasal gratifikasi yang disangkakan kepolisian terhadap Gayus Halomoan Tambunan bisa menjadi celah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih kasus penyuapan pajak itu. "Ini menandakan ketidakmampuan polisi dan ketidakmauan polisi," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, ketika dihubungi kemarin.

"Berarti unsur pengambilalihan kasus oleh KPK sudah terpenuhi," ujar Zainal lagi.

Polisi, yang pekan lalu mengadakan gelar perkara kasus Gayus, tidak berhasil mengungkap sumber uang sekitar Rp 100 miliar milik pegawai pajak bergaji beberapa belas juta rupiah itu. "Indikasi penyuapan sulit dibuktikan karena tidak ada bukti hitam di atas putih," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Sabtu lalu.

Sebelumnya, Juni lalu, kepolisian menyatakan Gayus mengaku mendapatkan uang dari 40 perusahaan wajib pajak yang ia tangani.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan penyidik di kantornya masih terus mengumpulkan informasi seputar perkara Gayus. "Beri kami waktu agar penyidik-penyidik kami bekerja dengan baik," ujarnya.

Wakil Ketua KPK lainnya, M. Jasin, mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK baru berada pada tahap awal dalam mengerjakan kasus ini. "Kami baru mengumpulkan info-info terkait, karena katanya kasusnya kan banyak," tuturnya.

Tapi, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK tak perlu memilah-milah kasus yang akan diambil. "Kasus suap Rp 28 miliar dan Rp 75 miliar harus diambil semua," ujar Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho.

Ia mengatakan, ICW sejak awal tidak percaya kepolisian akan mampu menuntaskan kasus ini. Menurut dia, tindakan Polri yang hanya menjerat Gayus dengan pasal gratifikasi merupakan upaya membatasi gerak KPK dalam skandal pajak ini.

Menurut Emerson, gratifikasi juga dilakukan kepolisian untuk melokalisasi kasus ini hanya pada Gayus. Hal ini karena, dalam gratifikasi, "Pemberian sesuatu dianggap sebagai tindakan yang biasa," ujarnya.

Emerson menambahkan, untuk menjerat para pengemplang pajak itu, KPK bisa memulai dengan menjerat para atasan Gayus. Gayus mengaku pernah mengajak dua atasannya, Maruli Pandapotan Manurung dan Humala Napitupulu, mengerjakan perkara pajak perusahaan Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal.

Dukungan terhadap KPK untuk terlibat dalam kasus Gayus juga ditunjukkan oleh pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Menurut Bambang, kompleksnya masalah Gayus membuat kepolisian kewalahan. "KPK cukup profesional untuk tangani kasus korupsi, dan kepolisian pidananya. Itu kalau ingin menegakkan hukum," ujarnya. ● FEBRIYAN | RIRIN AGUSTIA | YUDONO

KORAN TEMPO

RABU, 8 DESEMBER 2010

Gayus: Tak Ada Duit dari 149 Perusahaan

JAKARTA — Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan, mengatakan duit seratusan miliar rupiah di rekeningnya bukan berasal dari 149 perusahaan. "Selama ini salah tafsir," kata Gayus setelah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin lalu.

Menurut Gayus, sebagai petugas penelaah di Pengadilan Pajak, dirinya mendapat surat tugas untuk menangani 149 perusahaan yang mengajukan banding kasus pajak. Dari sini, ia mengaku tak mendapat duit. Gayus akhirnya hanya benar-benar menangani 44 perusahaan. Tapi, dari perusahaan-perusahaan ini, dia juga menyangkal terima setoran. "Ada tiga lagi. Yang 44 perusahaan itu enggak ada. *Clean*," ujar Gayus tanpa memperjelas tiga perusahaan yang ia maksudkan.

Pengacara Gayus Tambunan, Sadly Hasibuan, mengatakan kliennya itu pernah mengaku duit miliaran rupiah di rekeningnya berasal dari pekerjaan sampingan. Namun Sadly tak menjelaskan apa pekerjaan sampingan Gayus itu. "Ini kan masih proses. Kami enggak mau mendahului polisi," ujar Sadly.

Pada persidangan sebelumnya, dua anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa dan Denny Indrayana, pernah mengungkapkan pengakuan Gayus. Kepada Satgas, Gayus pernah mengatakan bahwa sebagian uang di rekeningnya ia terima dari perusahaan Grup Bakrie.

Kepada penyidik polisi dan hakim, Gayus pun pernah mengaku menerima uang sekitar Rp 30 miliar dari PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia.

Menurut dokumen pemeriksaan polisi, ketiga perusahaan Grup Bakrie itu memang tak tercantum dalam 149 perusahaan maupun daftar 44 perusahaan yang langsung ditangani Gayus. Tapi, kepada penyidik, Gayus mengaku pernah menerima proyek untuk menyelesaikan kasus pajak Grup Bakrie melalui Alif Kuncoro dan Imam Cahyo Maliki. Dalam berbagai kesempatan, perwakilan keluarga Bakrie pun telah membantah pengakuan Gayus ini.

● ISMA SAVITRI | JUJANG

KORAN TEMPO
RABU, 8 DESEMBER 2010

BOLONG-BOLONG KASUS GAYUS

KOMITMEN PRESIDEN DIPERTANYAKAN

"Tak ada yang berubah. Presiden berulang kali menegaskan hal itu."

JAKARTA — Berlarut-larutnya penanganan kasus mafia pajak Gayus H. Tambunan oleh kepolisian disesali banyak kalangan. Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan Yudhoyono seharusnya bisa berperan lebih banyak dalam pengungkapan kasus Gayus. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk berkoordinasi dengan kepolisian.

"Mengherankan, kenapa tidak mendorong Satgas, itu kan di bawah kendali Presiden," katanya.

Pendapat senada disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga ini mempertanyakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Untuk kasus Gayus, mereka berpendapat, "Presiden membiarkan kasus ini menjadi tak terarah," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho ketika dihubungi tadi malam. Sebagai atasan langsung Kapolri, menurut dia, mestinya Yudhoyono bisa meminta Timur menuntaskan kasus itu.

Ketidakseriusan polisi mengusut kasus Gayus, menurut Emerson, sudah "terang-benderang". Contohnya, Gayus hanya dijerat dengan pasal gratifikasi dan bukan penyuapan. Akibatnya, perusahaan penyuap bisa lolos dari jerat hukum.

Emerson dan Zainal setuju kasus Gayus segera ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. "Presiden bisa minta Kapolri menyerahkan kasus ini ke KPK, tapi ini juga tidak dilakukan," kata Emerson.

Menanggapi hal itu, juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden tetap berkomitmen agar kasus Gayus dituntaskan. "Siapa pun yang bersalah harus dihukum," katanya, "Tak ada yang berubah. Presiden berulang kali menegaskan hal itu."

● DWI RIYANTO | ANTON SEPTIAN | DIANING SARI | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
RABU, 8 DESEMBER 2010

PASAL HADIAH BAGI GAYUS TAK TEPAT

"Gayus mendapat anugerah karena dakwaannya dibuat terpisah."

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar menilai penerapan pasal gratifikasi terhadap Gayus H. Tambunan tidak tepat. Sebab, hal itu akan memperkecil peluang pengusutan terhadap penyuap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.

"Gratifikasi itu kan hadiah. Sanksinya, ya, terkait itu saja," kata Haryono saat dihubungi Senin lalu. Meski demikian, kata dia, gratifikasi masih dapat diusut menjadi penyuapan. Sebab, hadiah yang diterima Gayus diduga terkait dengan jabatannya.

Pekan lalu, Kepolisian menyatakan akan menjerat Gayus dengan pasal gratifikasi. Alasannya, mereka sulit melacak asal-muasal harta kekayaan Gayus yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap, jaksa peneliti bisa saja memberikan petunjuk kepada polisi untuk mengubah sangkaan pasal dari gratifikasi menjadi pasal penyuapan. Hal itu bisa dilakukan setelah jaksa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

"Nanti kami akan beri petunjuk, pasal apa yang kompeten disangkakan untuk perkara itu. Bisa saja ternyata itu perkara suap," kata Babul, "Kalau begitu, kan harus diubah pasalnya."

Sementara itu, berkaitan dengan persidangan kasus suap PT Surya Alam Tunggal, terdakwa Gayus dinilai mendapat anugerah lantaran dakwaannya dibuat terpisah. Dengan begitu, menurut mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mustahil Gayus dijerat hukuman maksimal untuk keempat dakwaan yang membelitnya.

"Putusan pemidanaan penjara sementara berdasar KUHP mempunyai batas maksimum, yaitu penggunaan pidana sementara tidak boleh melebihi toleransi pidana maksimal," kata Bagir, sebagai saksi ahli dalam persidangan Gayus, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin lalu.

Kondisinya memang berbeda dengan di beberapa negara lain. Di luar negeri, kata Bagir, seorang terdakwa memungkinkan dijatuhi vonis tidak terbatas oleh hakim. "Di Amerika Serikat dimungkinkan seseorang dipidana dua ratus tahun," ujarnya.

Dalam kasus mafia pajak yang menjerat Gayus, menurut Bagir, Direktur Jenderal Pajak seharusnya ikut bertanggung jawab. Sebab, jika berbicara struktur, semakin tinggi tingkatannya, orang tersebut makin besar tanggung jawabnya.

Bagir menambahkan, penyidik harus menemukan motif di balik sikap Gayus dan para atasannya yang mengabulkan keberatan pajak sejumlah perusahaan. "Ya, harus dibuktikan. Itulah pekerjaan penyidik," katanya. "Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus dibuktikan. Kalau memang cukup alasan mereka (atasan Gayus) bertanggung jawab, ya, mesti diproses secara hukum."

● ANTON SEPTIAN | ISMA SAVITRI | EVI RIYANTO | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 9 DESEMBER 2010

GAYUS TEGASKAN TERIMA DUIT GRUP BAKRIE

"Pengakuan itu dibantah seluruhnya oleh Alif Kuncoro."

JAKARTA — Gayus Halomoan Tambunan kembali menegaskan bahwa uang senilai Rp 35 miliar miliknya berasal dari tiga perusahaan Grup Bakrie. Uang itu merupakan imbalan atas bantuannya dalam menuntaskan kasus pajak yang melilit PT Kaltim Prima Coal, Bumi Resources, dan Arutmin.

Gayus menjelaskan kembali soal uang Rp 35 miliar itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, atas permintaan hakim Albertina Ho.

Menurut Gayus, ia tidak mendapat uang langsung dari ketiga perusahaan itu, meskipun sempat bertemu dengan wakil ketiganya. "Orang perusahaan bertemu, membahas, tapi tidak pernah kasih uang. Yang memberi uang, Alif Kuncoro," katanya.

"Alif Kuncoro dan Imam Cahyo Maliki yang meminta pertolongan kepada saya," kata terdakwa kasus mafia hukum itu.

Alif, pemilik bengkel mobil di Jakarta Selatan dan kenalan Gayus, adalah adik Imam, yang menjadi konsultan pajak. Imam saat ini menghilang, sedangkan Alif menjadi terdakwa kasus penyuapan Komisaris Mohammad Arafat Enanie.

Menurut Gayus, ia menerima US$ 500 ribu untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak PT Kaltim untuk tahun pajak 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Pekerjaan "sampingan" kedua, yang membuahkan imbalan US$ 1 juta, adalah melakukan persiapan sidang banding PT Bumi untuk tahun pajak 2005.

Uang terbesar, US$ 2 juta, ia dapatkan dalam kaitan dengan program Sunset Policy sesuai dengan UU Nomor 28/2007 untuk PT Arutmin. "Saya diminta Alif Kuncoro me-*review* apakah Sunset Policy yang dibuat wajib pajak sudah sesuai dengan aturan," kata Gayus, yang saat itu menjadi petugas penelaah di Pengadilan Pajak.

Gayus mengaku uang dari kerja sampingan itu disimpan di bank Rp 28 miliar. "Yang Rp 7 miliar saya simpan di rumah," kata Gayus.

Penasihat Kapolri, Kastorius Sinaga, mengatakan semua pengakuan Gayus tentang asal-usul rekening senilai Rp 28 miliar tak dapat dibuktikan. Ia mengatakan, pengakuan itu dibantah seluruhnya oleh Alif Kuncoro. "Pengakuan Gayus disangkal Alif. Dia enggak merasa memberikan uang kepada Gayus," katanya.

Pengakuan Gayus juga telah dibantah oleh perwakilan Bakrie dalam berbagai kesempatan.

Juru bicara Bumi Resources, Dileep Srivastava, sebelumnya pernah mengatakan pernyataan Gayus itu tidak ada yang baru. "Ia tidak pernah mampu untuk menunjukkan barang bukti. Barang siapa yang menuduh harus membuktikannya, dan bukan sebaliknya," katanya kepada *Tempo* beberapa waktu lalu.

● WDA | ISMA SAVITRI

KORAN TEMPO
JUMAT, 10 DESEMBER 2010

Kejaksaan, Polri, dan KPK Telusuri Bukti Suap Gayus

Direktorat Jenderal Pajak siap memasok data.

JAKARTA — Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat memburu bukti-bukti suap yang diduga diterima oleh Gayus Halomoan P. Tambunan. Bukti-bukti dugaan suap yang akan ditelisik itu berasal dari tiga perusahaan dengan nilai Rp 28 miliar.

"Kami akan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak sehingga (kasus ini) bisa terungkap secara tuntas," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari di kantornya kemarin. "Alat bukti yang paling banyak justru (bisa didapatkan) di Ditjen Pajak."

Amari menjelaskan bahwa kesepakatan antarlembaga penegak hukum dalam mencari bukti ini muncul dalam gelar perkara dugaan suap Gayus di Markas Besar Polri, Jakarta, dua hari lalu. Langkah ini, kata dia, merupakan solusi sementara atas kesulitan mencari alat bukti penyuapan. Minimnya alat bukti tersebut menyebabkan polisi menjerat Gayus dengan pasal menerima hadiah alias gratifikasi seperti diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pengakuan Gayus bahwa dia mendapat uang dari pekerjaan sampingan di sejumlah perusahaan wajib pajak, kata bekas Jaksa Agung Muda Intelijen ini, tak cukup dijadikan bukti untuk menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A itu. Tapi, Amari memastikan, Kejaksaan Agung berusaha agar Gayus, yang juga terdakwa perkara mafia pajak, dikenai pasal penyuapan.

Gelar perkara yang diikuti oleh KPK, PPATK, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pada Rabu lalu itu berkaitan dengan uang Rp 28 miliar dalam beberapa rekening milik Gayus di dua bank: Bank BCA dan Panin. Uang ini diakuinya diterima sebagai imbalan atas pengurusan masalah pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

Menurut Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana, kesulitan pembuktian itu menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memaksimalkan penyidikan. Itu sebabnya, keterlibatan lembaga-lembaga lain mutlak diperlukan. "Penanganannya akan lebih efektif jika melibatkan lembaga lain, semacam KPK dan PPATK," ujarnya seusai gelar perkara.

Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, menyatakan semua instansi yang menghadiri gelar perkara berkomitmen membantu Polri menuntaskan kasus tersebut. Bahkan masukan dari instansi lain pun diperoleh. "Ada beberapa teknik dari KPK yang tak bisa saya sebutkan, ada juga usulan penambahan pasal pencucian uang," ujarnya.

Polri pun bakal mengajak Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama. "Kepala Bareskrim akan mengundang Ditjen Pajak dan jajarannya (untuk membantu) supaya kasus ini terbuka," ucapnya.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Iqbal Alamsyah, menyatakan instansinya siap membantu penegak hukum, termasuk memasok data untuk keperluan mencari alat bukti kasus Gayus. Ia mengaku pernah dihubungi oleh juru bicara Mabes Polri sebelumnya, yakni Inspektur Jenderal Edward Aritonang, yang juga mengajak kerja sama, meski kerja sama itu belum terealisasi. "Juru bicara Polri yang sekarang belum menghubungi," ujarnya.

● ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | FERIN AGUSTIA | FEBRIANA FIRDAUS | JOBPIE S

KORAN TEMPO
SABTU, 11 DESEMBER 2010

Basrief Harus Tuntaskan Dugaan Suap Gayus ke Jaksa

"Pengakuan Gayus menyentak Kejaksaan."

JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil meminta Jaksa Agung Basrief Arief menuntaskan dugaan suap yang diterima oleh dua Jaksa Agung Muda Pidana Umum dari tersangka mafia pajak, Gayus H. Tambunan. Menurut Koalisi, Basrief sebagai Jaksa Agung baru mesti bersikap tegas agar kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung kembali pulih.

"Ini tantangan Basrief untuk menyelesaikannya," kata anggota Koalisi, Taufik Basari, saat dihubungi tadi malam. Koalisi Masyarakat Sipil merupakan wadah sejumlah lembaga pegiat antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Transparency International Indonesia. "Jika Basrief tidak berani tegas, ya, mending dipecat saja."

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu lalu, Gayus mengaku pernah memberikan uang kepada pengacaranya, Haposan Hutagalung, sebesar US$ 500 ribu untuk diserahkan ke jaksa, termasuk Jaksa Agung Muda Pidana Umum lama, yang saat itu dijabat oleh Abdul Hakim Ritonga. Gayus berharap duit itu bisa meloloskan dirinya dari kurungan penjara. Kasusnya saat itu disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tak berselang lama, Haposan kembali meminta US$ 50 ribu kepada Gayus dan mengaku duit itu untuk Jaksa Agung Muda Pidana Umum baru, yakni Kamal Sofyan.

Terhadap kasus ini, Koalisi sebenarnya berharap agar pengusutan tidak dilakukan oleh tim internal kejaksaan, melainkan oleh lembaga lain yang lebih independen. Sebab, mereka khawatir jaksa yang menelusuri dugaan suap dari Gayus tersebut tak akan tega mengorbankan koleganya sendiri.

Namun, karena kejaksaan ingin memeriksa sendiri dugaan suap itu, Taufik meminta agar Jaksa Agung menonaktifkan terlebih dulu para pejabatnya yang diduga terlibat. "Hal itu penting untuk memudahkan pemeriksaan," katanya.

Menanggapi pengakuan Gayus, Jaksa Agung Basrief Arief mengaku kaget. Ia langsung meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan menelusuri pengakuan Gayus . "Saya tidak tunggu lagi. Saya mendisposisi Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan) untuk mengklarifikasi," ujar Basrief di kantornya kemarin.

Sementara itu, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga membantah jika disebut terlibat dalam penuntutan Gayus saat disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang awal tahun ini. Ia juga menyanggah bila dikatakan pernah diberi duit US$ 500 ribu oleh pengacara Gayus, Haposan Hutagalung, agar Gayus hanya dikenai tuntutan percobaan.

Dalam keterangan persnya di Kejaksaan Agung kemarin, Ritonga menegaskan bahwa ia melepaskan jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung pada 12 Agustus 2009. Adapun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Gayus Tambunan diterima Kejaksaan sebulan kemudian. "Jadi pekerjaan selanjutnya mengenai Jampidum itu beralih pada pengganti saya, Pak Kamal Sofyan," katanya.

Adapun Kamal Sofyan, mantan Jaksa Agung Pidana umum yang kini menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, juga mengaku tidak mengenal Gayus dan Haposan. "Saya tidak pernah kenal beliau (Haposan), termasuk Gayus. Demi Allah, saya bersumpah tidak kenal beliau," katanya. ● ISMA SAVITRI | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 16 DESEMBER 2010 | A5

Polri Ragu Lie Detector Ungkap Kasus Gayus

JAKARTA — Kepolisian RI menyatakan alat deteksi kebohongan (*lie detector*) tak menjamin munculnya pengakuan jujur dari seseorang. Jadi, kepolisian belum tentu menggunakan metode ini untuk mengungkap kejahatan terdakwa mafia pajak Gayus Haposan P. Tambunan.

"Hanya malaikat yang bisa pastikan bohong atau tidak," kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Dikdik Maulana Arif kepada *Tempo* kemarin. Menurut dia, instrumen ini adalah masalah teknis yang ditangani oleh direktur penyidikan.

Dikdik menjelaskan, metode penggunaan *lie detector* hanya dengan melihat grafik yang menunjukkan seseorang berbohong dan tidak. Hasil pemeriksaan akan bergantung pada penilaian hakim yang menangani perkara. "Kalau hakimnya percaya *lie detector*, hasilnya dipakai. Kalau tidak, ya, tak dipakai."

Ia menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung yang akan menggunakan *lie detector* untuk memeriksa tersangka Haposan Hutagalung dan jaksa Cirus Sinaga dalam dugaan aliran dana dari Gayus. Haposan adalah pengacara Gayus dalam perkara korupsi dan pencucian uang pada 2009. Sedangkan Cirus kala itu jaksa peneliti berkas perkara ini. Keduanya diduga main mata untuk memandulkan perkara ini di pengadilan.

Gayus mengaku menebar uang total Rp 20 miliar kepada para penegak hukum, yakni masing-masing Rp 5 miliar, untuk pengacaranya, jaksa, polisi, dan hakim, demi meloloskannya dari jerat hukum. Uang dialirkan lewat Haposan. Tapi Haposan dan Cirus mengelak tudingan soal aliran dana itu.

Polri masih menangani rekening berisi Rp 28 miliar dan uang tunai Rp 74 miliar milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dalam sebuah *safe deposit box*. Harta itu diduga hasil suap yang diterima dari beberapa perusahaan besar. Gayus mengaku menerima uang Rp 35 miliar dari PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin sebagai imbalan membantu menyelesaikan perkara pajak.

Adnan Buyung Nasution, pengacara Gayus dalam perkara penyuapan terhadap penegak hukum, menyatakan kliennya itu telah memberikan semua informasi soal suap dan asal-usul uang Rp 28 miliar. "Siapa yang kasih duit sudah dijelaskan. Tapi itu ditutupi terus," ucapnya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Menurut dia, polisi tak pernah memeriksa asal uang itu, dan justru mengaitkannya dengan kasus pajak PT Surya Alam Tunggal yang tak berkaitan. ● FEBRIYAN | ANTON SEPTIAN

KORAN TEMPO
JUMAT, 17 DESEMBER 2010

Komisi Hukum DPR Akan Panggil Gayus Tambunan

JAKARTA — Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil terdakwa kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan. Menurut Ketua Komisi Hukum Benny K. Harman, pemanggilan Gayus penting bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan. "Kami akan klarifikasi dari mana uang Gayus dan mengalir ke mana saja," kata Benny di gedung DPR kemarin.

Benny membantah anggapan publik bahwa pemanggilan Gayus merupakan campur tangan politik dari Komisi Hukum. "Justru ini harus dilihat sebagai dorongan politik untuk memberantas mafia pajak," ujarnya.

Benny menambahkan, Komisi Hukum DPR bisa menjadikan kasus Gayus sebagai jalan masuk untuk menelusuri kasus-kasus mafia pajak lainnya. Dia juga meminta lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi proaktif membongkar mafia pajak.

Gayus Tambunan, bekas pegawai Pajak golongan III-A pemilik harta lebih dari Rp 100 miliar, kini menjadi terdakwa kasus pemberian uang ke aparat hukum dalam kasus mafia pajak. Gayus juga menjadi tersangka karena kembali menyuap aparat untuk bisa keluar dari penjara, keluyuran di Bali. Polisi belum menjerat lelaki yang memiliki rumah mewah di Kelapa Gading itu dengan tuduhan menerima suap. Padahal, dalam persidangan, Gayus sudah terang-terangan mengaku menerima uang sekitar Rp 30 miliar dari tiga perusahaan Grup Bakrie. Adapun Grup Bakrie membantah hal ini.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir, menyatakan setuju dengan pemanggilan Gayus. Namun, menurut dia, hingga kini belum ada kesepakatan internal di Komisi Hukum DPR. Masih ada beberapa anggota Komisi yang tidak menyetujui langkah itu karena khawatir pemanggilan bisa dianggap mengintervensi proses hukum.

Penasihat ahli Kepala Kepolisian RI, Kastorius Sinaga, menyatakan pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan data perusahaan yang beperkara di pengadilan pajak kepada polisi. Data tersebut, kata Kastorius, penting untuk membongkar aliran dana dari sejumlah perusahaan ke rekening Gayus Tambunan.

● SANDY INDRA PRATAMA | EKO ARI WIBOWO

KORAN TEMPO
SABTU, 18 DESEMBER 2010

Gayus Serahkan Bukti Pembagian Uang ke Jaksa

JAKARTA — Terdakwa mafia pajak Gayus Halomoan P. Tambunan telah menyerahkan bukti catatan pembagian uang oleh Haposan Hutagalung, bekas pengacaranya, kepada beberapa oknum jaksa. Bukti itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Menurut pengakuan Gayus, catatan itu tercecer dari berkas Haposan dan ditemukannya," ujar Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata, dan Tata Usaha Negara, pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Abdul Taufiq, di kantornya kemarin. Dugaan adanya uang dari Gayus melalui Haposan kepada jaksa diungkapkan oleh Gayus di persidangan pekan lalu.

Menurut Taufiq, di bagian atas catatan tersebut tercantum logo Bank Central Asia dan di bagian bawah sebelah kanan terdapat paraf Haposan. "Setelah kami teliti saat pemeriksaan Haposan, kami simpulkan paraf itu identik," katanya.

Dalam catatan itu terdapat dua lokasi penyerahan uang, yaitu Kelapa Gading dan Hotel Ambhara. Di bawah tulisan Kelapa Gading disebutkan uang mengalir kepada direktur dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum sebesar masing-masing tertulis 150.000 dan 200.000. Sedangkan di bawah tulisan Hotel Ambhara tertulis uang mengalir kepada Kajati sebesar 150 ribu, Wakajati 50 ribu, Aspidum 100 ribu, seseorang bernama Pakpahan 15 ribu, dan kurir 2000.

"Itu dibacanya dikali seribu, jadi dalam juta rupiah," kata Taufiq. Terhadap catatan ini, kejaksaan akan menyerahkannya kepada kepolisian. "Catatan ini dapat dijadikan bukti adanya pidana pemerasan yang dilakukan oleh Haposan terhadap Gayus," kata Taufiq.

Saat dimintai konfirmasi, pengacara Haposan, Hendrik Jehanam, mempertanyakan pernyataan Taufiq bahwa kliennya memberikan paraf pada dokumen pembagian uang kepada jaksa tersebut. Saat di Kejaksaan, kata dia, "Haposan diperiksa, tapi tidak diminta tanda tangan pembanding. Bagaimana bisa dibilang identik?" ● FEBRIYAN

KORAN TEMPO
KAMIS, 23 DESEMBER 2010

Gayus Tambunan Dituntut 20 Tahun Penjara

Dianggap terbukti melakukan empat dakwaan jaksa.

JAKARTA — Jaksa menuntut terdakwa kasus mafia hukum Gayus Tambunan 20 tahun penjara. Jaksa juga mewajibkan Gayus membayar denda Rp 500 juta atau menjalani hukuman tambahan enam bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana penjara 20 tahun, dikurangi masa tahanan, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan di rutan," kata jaksa Rhein E. Singal saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Hal yang memberatkan, menurut jaksa, sebagai pegawai negeri sipil Gayus memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Padahal pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu bergaji lebih tinggi dibanding pegawai negeri lain. Jadi, "Seharusnya tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji," kata Rhein.

Gayus juga dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal lain yang memberatkan, Gayus memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan. "Terdakwa juga tidak menyesali perbuatannya dan justru mengulangi perbuatannya dengan menyuap aparat hukum untuk kepentingan pribadi," ujar jaksa Rhein.

Gayus menjadi terdakwa dalam kasus penyuapan terhadap aparat penegak hukum saat dia disidik dan diadili dalam kasus rekening mencurigakan sekitar Rp 28 miliar pada 2009. Saat itu Gayus hanya dijerat dengan pasal penggelapan uang. Di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus pun divonis satu tahun percobaan tanpa menjalani hukuman penjara.

Menurut jaksa, kali ini Gayus terbukti melakukan empat hal yang didakwakan jaksa.

Pada dakwaan kesatu primer, jaksa menyatakan Gayus melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut jaksa, dakwaan ini tidak terbukti.

Lalu, pada dakwaan kesatu subsider, jaksa menyatakan Gayus menyalahgunakan wewenang dalam penanganan kasus pajak PT Surya Alam Tunggal. Akibat perbuatan Gayus, negara dirugikan Rp 570 juta.

Jaksa menyatakan Gayus terbukti memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam hal ini penyidik polisi. Sesuai dengan dakwaan kedua primer, menurut jaksa, Gayus melakukan hal itu agar rumahnya tidak disita, ia tidak ditahan, dan rekeningnya tak diblokir.

Gayus juga terbukti memberikan uang US$ 40 ribu kepada hakim Muhtadi Asnun, seperti dakwaan ketiga jaksa. Menurut jaksa, Gayus menyuap Asnun dan hakim Pengadilan Negeri Tangerang lain agar memvonis dia bebas.

Terakhir, jaksa menganggap Gayus sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam penyidikan, seperti tercantum pada dakwaan keempat. Menurut jaksa, Gayus terbukti bersekongkol dengan Andi Kosasih, rekan usahanya, dalam membuat surat perjanjian bisnis palsu demi kepentingan pembukaan blokir Rp 28 miliarnya.

Setelah sidang, Gayus mengatakan sudah memperkirakan bahwa jaksa akan menuntutnya dengan hukuman maksimal. Dia pun menyatakan kecewa terhadap jaksa. "Rupanya, jaksa itu menuntut bukan berdasarkan fakta persidangan, melainkan berdasarkan diurus atau tidaknya suatu perkara," kata Gayus.

Meski begitu, Gayus optimistis majelis hakim akan obyektif dan memutuskan perkara berdasarkan fakta. "Bukan seperti tuntutan jaksa," kata Gayus.

● ISMA SAVITRI

KORAN TEMPO
SELASA, 4 JANUARI 2011

Gayus Beberkan Lima Modus Permainan Pajak

ADITIA NOVIANSYAH (TEMPO)

Terdakwa kasus penyuapan pajak, Gayus Halomoan Tambunan, membeberkan lima modus permainan pajak dalam pleidoinya yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

JAKARTA — Terdakwa kasus penyuapan terhadap aparat penegak hukum, Gayus Halomoan P. Tambunan, mengungkapkan ada lima modus permainan di Direktorat Jenderal Pajak. Modus itu diungkapkan Gayus dalam pleidoi berjudul *Indonesia Bersih... Polisi dan Jaksa Risih... Saya Tersisih*:. di pengadilan Jakarta Selatan kemarin.

Menurut mantan pegawai pajak ini, modus pertama adalah melakukan negosiasi surat ketetapan pajak (SKP). Negosiasi terjadi di tingkat tim pemeriksa pajak. Tujuannya untuk menaikkan atau menurunkan nilai pajak. "SKP tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, baik itu SKP kurang bayar maupun SKP lebih bayar dalam rangka restitusi pajak."

Kedua, kata Gayus, terjadi di tingkat penyidikan pajak, seperti kasus faktur pajak fiktif. Dalam kasus ini, wajib pajak, selain diperintahkan membetulkan SPT masa PPN, akan ditakut-takuti untuk dijadikan tersangka. "Ujung-ujungnya adalah uang, sehingga status wajib pajak tetap sebagai saksi."

Ketiga, penghilangan berkas surat permohonan keberatan wajib pajak. Permohonan ini seharusnya diproses paling lama 12 bulan. "Sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000, jika permohonan tersebut tak selesai atau belum diproses, Pajak harus menerima keberatan yang diajukan berapa rupiah pun nilai keberatan yang dimintakan."

Keempat, menurut Gayus, adalah dengan penggunaan perusahaan luar negeri, khususnya di Belanda, untuk menggelapkan pajak. Terdapat celah hukum pembayaran bunga kepada perusahaan Belanda, jika lebih dari dua tahun pengenaan pajak penghasilan bisa dikenai nol persen. "Potensi penggelapan mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan, rupiah."

Kelima adalah modus yang sering terjadi, yakni dengan jual-beli saham antarperusahaan satu grup. Caranya, pembelian saham diklaim sebagai kerugian investasi. Kerugian ini, kata Gayus, dibebankan sebagai biaya yang menggerus keuntungan perusahaan dari usaha riilnya. "Padahal tidak pernah ada transaksi tersebut secara riil dan nilai jual-beli saham tak mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya."

Semua modus ini, menurut Gayus, sudah dibeberkan kepada penyidik tim independen kepolisian. Namun, menurut dia, tidak ada satu pun cerita ini yang ditindaklanjuti. "Timbul tanda tanya besar di pikiran saya, apakah Direktorat Pajak memang bersih?" ujarnya.

Gayus menduga, "Ada *setting* untuk melokalisir kasus hanya kepada saya. Atau Polri tak mampu bekerja secara profesional untuk menjerat mafia pajak sebenarnya."

● ALI NY | FEBRIYAN

KORAN TEMPO
SELASA, 4 JANUARI 2011

GAYUS MERASA DITIPU POLISI

"Ini kan belum selesai, masih panjang."

JAKARTA— Terdakwa kasus Gayus H. Tambunan mengatakan menyesal telah mengikuti skenario tim khusus Kepolisian Republik Indonesia, yang memeriksa dirinya secara maraton pada April 2010. "Saya banyak menceritakan modus permainan pajak, tapi yang diproses malah kasus yang tak berkaitan dengan mafia pajak," kata Gayus saat membacakan pleidoi setebal 18 halaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Dalam pembelaannya, Gayus mengaku ditipu oleh tim khusus Polri yang dipimpin Inspektur Jenderal Mathius Salempang itu. Menurut Gayus, tim khusus Polri berjanji memberikan keringanan asalkan dia mau buka-bukaan. Namun yang terjadi, "Justru berbalik 180 derajat," kata Gayus.

Gayus mencontohkan janji polisi menjerat Bambang Heru Ismiarto, Direktur Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak. Atas permintaan polisi, Gayus membeberkan kasus pajak PT Surya Alam Tunggal yang, menurut dia, tidak berkaitan dengan permainan mafia pajak. "Nyatanya, itu malah menjerat saya," ujar Gayus.

Pada bagian lain, Gayus, yang dituntut 20 tahun penjara, mengaku ditipu polisi ketika ia membeberkan peran Muhtadi Asnun, hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang menangani kasus rekening Gayus pada 2009. Menurut Gayus, tim khusus Polri berjanji menjerat Asnun dengan pasal pemerasan dan membebaskan Gayus dari pasal penyuapan. Ternyata polisi malah menuduh Gayus menyuap hakim.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar tak mau berkomentar panjang soal pleidoi Gayus itu. Boy hanya meminta semua pihak berpatokan pada proses hukum yang tengah berjalan. "Ini kan belum selesai, masih panjang," kata Boy saat dihubungi kemarin.

● FEBRIYAN | CORNILA DESYANA

Gayus pun Bisa Kecewa

Gayus H. Tambunan kecewa atas kinerja tim khusus Polri. Banyak kesaksian yang oleh tim khusus dijanjikan bakal meringankan dirinya atau bakal ditindaklanjuti ternyata malah memberatkan. Inilah daftar kekecewaan versi Gayus.

1. **Tim khusus berjanji mengusut tuntas kasus mafia pajak. Gayus membeberkan semua modus permainan mafia pajak, namun cerita itu tak ditindaklanjuti.**
2. **Tim berjanji menjerat atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak. Gayus membeberkan kasus PT Surya Alam Tunggal, eh, cerita itu malah dipakai menjerat dirinya.**
3. **Tim berjanji menjerat hakim Muhtadi Asnun dengan pasal pemerasan dan membebaskan Gayus. Gayus buka mulut, namun dia malah dituntut menyuap Asnun.**
4. **Tim berjanji mengusut tuntas aliran dana ke aparat. Gayus memberikan rekaman percakapan tentang skenario bagi-bagi duit. Kini para perwira polisi dan pejabat kejaksaan masih bebas.**

SUMBER: NASKAH PLEIDOI GAYUS

KORAN TEMPO
KAMIS, 6 JANUARI 2011

Jaksa Abaikan Info Mafia Pajak Gayus

JAKARTA — Jaksa penuntut umum kasus penyuapan dengan terdakwa Gayus H. Tambunan menilai, informasi tentang praktek mafia yang disampaikan Gayus kepada penyidik bukanlah prestasi yang patut diperhitungkan.

"Itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, terlebih terdakwa merupakan abdi negara," kata jaksa Rhein Singal saat membacakan replik di Pengadilan Negeri Jakarta kemarin.

Jaksa menanggapi nota pembelaan (pleidoi) yang disampaikan Gayus, Senin lalu. Saat itu Gayus kembali mengungkapkan berbagai modus permainan mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak yang pernah ia sampaikan kepada penyidik polisi.

Dalam berbagai kesempatan, tim penasihat hukum Gayus juga menyebut kliennya telah berjasa dalam membongkar mafia hukum dan mafia pajak yang diketahuinya.

Pada bagian lain, jaksa meminta penasihat hukum Gayus tidak membawa-bawa urusan aliran dana dari perusahaan ke rekening Gayus dan dugaan praktek mafia pajak dalam pembelaannya. Alasannya, semua itu berada di luar materi dakwaan jaksa dalam kasus yang tengah disidangkan. "Sampaikan itu di forum berbeda," kata jaksa Kuntadi.

Gayus dituntut hukuman penjara 20 tahun. Jaksa mendakwa Gayus menyuap polisi dan hakim dalam kasus penggelapan uang pada 2009. Jaksa pun mendakwa Gayus memberi keterangan palsu karena menyebut uang Rp 28 miliar di rekeningnya milik rekan usahanya, Andi Kosasih.

Penasihat hukum Gayus menyatakan tidak ada hal baru dalam replik jaksa atas pleidoi kliennya. "Argumentasinya itu-itu saja," kata Saldi Hasibuan, anggota tim penasihat hukum Gayus. Saldi pun berharap majelis hakim tetap obyektif dalam persidangan. ● RIRIN AGUSTIA

KORAN TEMPO
SENIN, 10 JANUARI 2011

Tanpa Ambil Alih, KPK Mulai Usut Kasus Gayus

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tetap mengusut kasus dugaan penggelapan pajak oleh Gayus H. Tambunan tanpa harus mengambil alih kewenangan penegak hukum lainnya. "Kami bekerja, tidak harus ambil alih kasusnya," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Saat ini KPK masih mendalami dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu. Namun Bibit mengaku tidak diizinkan mengungkapkan prosesnya kepada publik karena khawatir mengganggu penyelidikan. "Komisi sudah bergerak," kata dia.

Pergerakan itu, antara lain, berupa pertemuan pemimpin KPK dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Bibit berharap kerja sama KPK dengan Polri dan Kejaksaan kini lebih baik. "Dulu komunikasi saja setengah mati sulitnya," kata Bibit. Membasmi mafia pajak, Bibit menambahkan, tak cukup dengan menangkap para pelakunya. Sistem perpajakan di Indonesia pun perlu diperbaiki.

Kasus Gayus Tambunan, pegawai pajak golongan III-A, yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 100 miliar, merupakan pintu untuk membuka mafia pajak. "Kenapa Gayus bisa? Berarti sistemnya masih bolong dan memberi peluang," kata Bibit.

Sistem pajak Indonesia yang rumit, menurut Bibit, membuka pintu penyelewengan. Banyak perusahaan yang tak bisa menghitung pajak sendiri menyewa konsultan pajak. Apalagi banyak konsultan yang mampu membuat nilai pajak jadi mengecil.

Prinsip kerahasiaan pajak perusahaan dan individu, menurut Bibit, secara tak langsung bertabrakan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. "Sampai Menteri Keuangan mengeluh tak bisa melihat data pajak menteri," kata Bibit.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho juga menantang Direktorat Jenderal Pajak lebih terbuka untuk mencegah berulangnya kasus mafia pajak. "Serius enggak membersihkan korupsi di internal perpajakan?" ujar Emerson Yuntho via telepon. "Kalau serius, buka aksesnya."

Menurut ICW, lembaga pengumpul pajak harus menyiarkan data mereka secara rutin dan terbuka. Misalnya data tentang siapa pembayar pajak terbesar, berapa kewajiban mereka, berapa yang mereka bayarkan. "Kalau bersih, kenapa risi?" ujar Emerson.

● DIANING SARI | BUNGA MANGGIASIH

KORAN TEMPO
SELASA, 11 JANUARI 2011

GAYUS TAMBUNAN:

PRESIDEN TAHU PEMAIN KAKAP

"Saya cuma ikan teri."

JAKARTA—Terdakwa Gayus H. Tambunan terus mengumbar tudingan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengantongi nama-nama pemain kelas kakap dalam jaringan mafia pajak dan mafia peradilan.

"Presiden sudah tahu siapa yang *big fish*. Kalau saya, cuma ikan teri," kata Gayus kemarin. Selain Presiden, menurut Gayus, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pun sudah tahu para pemain kakap itu.

Di depan hakim, Gayus menyebutkan, masih banyak *big fish* yang belum terkail. Gayus pun menyebut nama-nama pejabat papan atas di Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya menjadi terdakwa seperti dirinya. Selain itu, menurut Gayus, masih ada petinggi polisi dan jaksa yang belum tersentuh hukum. "Klaim jaksa bahwa penegakan hukum tanpa pandang bulu hanya omong kosong," ujar Gayus.

Kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, memperkuat pernyataan kliennya itu. Menurut dia, Presiden dan Satgas pasti mengetahui aktor besar yang menjadi otak rentetan kejadian yang melibatkan Gayus.

Karena itu, Buyung meminta Presiden berani bersikap tegas. Misalnya Presiden bisa memerintahkan Kepala Kepolisian RI menyerahkan bawahannya yang terlibat kasus Gayus ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kok, susah amat, sih, *ngomong* begitu *aja*."

Juru bicara Istana Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menolak berkomentar. "Saya akan menanggapi kalau ada arahan dari Presiden," kata Julian melalui telepon. Dia pun mengaku tidak tahu siapa *big fish* yang dimaksudkan Gayus. "Saya baru dengar kesaksian itu." ● ISNA SAVITRI | DIANING SARI

KORAN TEMPO
RABU, 12 JANUARI 2011

MENTERI SIAP BANTU UNGKAP PENYUAP GAYUS

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo siap membantu Kepolisian Republik Indonesia menyelesaikan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan dan wajib pajak besar. "(Untuk) keperluan dokumen, jika diminta aparat, akan kami berikan. Saya akan *follow up* apa yang spesifik dimintakan," kata Agus di Jakarta kemarin.

Data wajib pajak bersifat rahasia sehingga tak bisa diungkap serampangan. Menteri Keuangan diberi wewenang membuka data tersebut jika diminta pengadilan, guna mengungkap kasus yang berhubungan dengan kepentingan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengaku telah mengirim surat permintaan data wajib pajak dalam kaitan dengan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Surat telah diserahkan satu bulan yang lalu, namun tak kunjung mendapat tanggapan Kementerian Keuangan.

Boy mengatakan surat yang ditandatangani Kepala Badan Reserse Kriminal itu terkait dengan pembayaran pajak tiga perusahaan milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Gayus mengakui tiga perusahaan inilah yang memberikan Rp 35 miliar untuk membereskan perkara pajak yang ia tangani.

Agus Martowardojo menjelaskan, kesibukan menuntaskan anggaran dan perbendaharaan selama akhir tahun membuat dia terlambat memproses permintaan Polri tersebut. Tapi dia berjanji menyerahkan data wajib pajak dalam 1-2 hari ke depan.

Direktorat Jenderal Pajak siap menyerahkan data wajib pajak bermasalah, menyusul persetujuan Menteri Keuangan. "Kami akan siapkan datanya," ujar juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Iqbal Alamsjah. Data yang akan diserahkan spesifik menyebutkan nama wajib pajak, jenis data pajak, berikut tahunnya.

Iqbal menegaskan, Gayus Tambunan mestinya menyebutkan nama-nama orang yang dia maksudkan terlibat mafia pajak di Ditjen Pajak. Sebab, kantornya wajib memakai asas praduga tak bersalah terhadap tudingan tersebut. "Sebaiknya Gayus sebut nama saja," kata Iqbal.

Sampai saat ini Polri belum mampu menyelesaikan kasus mafia pajak Gayus. Berkas terakhir dikembalikan Kejaksaan Agung karena dinyatakan tak lengkap. Polri mengaku telah berusaha melengkapi berkas dengan melakukan rekonstruksi perkara, termasuk memeriksa dua orang dari perusahaan Grup Bakrie.

● ANTON WILLIAM | IQBAL MUHTAROM | FEBRIYAN | BOBBY CANDRA

KORAN TEMPO
JUMAT, 14 JANUARI 2011

BUSYRO PASTIKAN KPK PANGGIL GAYUS

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Adnan Buyung Nasution (kiri) dan Busyro Muqoddas di kantor KPK kemarin

Menteri Keuangan siap menyerahkan data wajib pajak perusahaan Grup Bakrie.

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan kasus Gayus Tambunan sudah dalam proses penyelidikan di lembaganya. Untuk itu, komisi antikorupsi pasti akan memanggil Gayus. Namun, ihwal waktunya, Busyro belum bisa memastikan. "Oh, jelas itu (Gayus dipanggil)," kata Busyro. "Itu sudah keputusan rapat pimpinan."

Busyro mengungkapkan hal itu setelah bertemu dengan kuasa hukum Gayus H. Tambunan, Adnan Buyung Nasution, di kantor KPK kemarin. Komisi antikorupsi mengundang Buyung untuk berdiskusi tentang Gayus, mantan pegawai golongan III-A Direktorat Jenderal Pajak yang resminya hanya berpenghasilan Rp 9-12 juta per bulan tapi memiliki kekayaan hingga puluhan miliar rupiah. "Yang paling pokok yang harus dibongkar ialah mafia pajak dan mafia hukum," ujar Buyung.

Kedatangan Adnan, menurut Busyro, digunakan komisi antikorupsi untuk memperkaya bahan kasus Gayus. Namun lembaga ini belum memutuskan sisi mana yang akan diambil dalam kasus Gayus, termasuk apakah akan mengusut aliran dana temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta pengakuan Gayus ihwal perusahaan-perusahaan yang mengemplang pajak. "Itu nanti dalam perkembangan, akan kami komparasikan dengan informasi yang lain," kata Busyro.

Adnan bersyukur karena KPK mau mengambil alih kasus kliennya. "Penyidikan terhadap kasus Gayus ini banyak celah yang belum terbuka selama ini. Komisi bisa melanjutkan," katanya. Dengan masuknya komisi antikorupsi dalam kasus Gayus, Buyung melanjutkan, harapan masyarakat akan pengungkapan mafia pajak bisa terpenuhi. "KPK harus didukung, jangan ada anggota Dewan yang mau menghambat dengan macam-macam," katanya.

Berkaitan dengan pengungkapan mafia pajak yang melibatkan Gayus, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan lembaganya sudah menjalin kerja sama dengan KPK. Selain itu, kerja sama serupa dijalin dengan kepolisian.

Untuk itu, Agus mengaku telah mengingatkan Direktur Jenderal Pajak agar segera menyiapkan data perusahaan pajak yang diminta kepolisian dalam waktu satu-dua hari ini. Surat dari polisi sudah diterima kementerian pada 20 Desember tahun lalu. "Sudah saya ingatkan untuk betul-betul bisa merespons dan kita harus serahkan karena kita ingin proses ini selesai," kata Agus. "Kita siap buka data."

Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya menyatakan pihaknya sudah selesai menyiapkan data-data wajib pajak seperti diminta polisi. Namun ia enggan menjelaskan kapan data itu akan diserahkan ke Mabes Polri. "Pak Menteri kan sudah janji satu-dua hari lagi, ya, berarti besoklah," katanya.

Menurut Indra, data wajib pajak yang akan diserahkan ke kepolisian tidak hanya mencakup tiga perusahaan milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. "Banyak yang diminta, enggak hanya itu," katanya.

"Ya, kooperatif," kata Kapolri Timur Pradopo setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menanggapi kesediaan Kementerian Keuangan memasok data-data wajib pajak yang berkaitan dengan Gayus, kemarin.

● DIANING SARI | EKO ARI | IQBAL MUHTAROM | ANTON WILLIAM | DWI WYANA

KORAN TEMPO
SABTU, 15 JANUARI 2011

Polisi Selidiki 'Klien' Gayus

Dakwaan terhadap Gayus hampir rampung.

WIDODO S. JUSUF (ANTARA)

Menko Polhukam Djoko Suyanto (kiri) didampingi Jaksa Agung Basrief Arief (tengah) dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo memberikan keterangan seusai rapat kabinet terbatas membahas kasus Gayus dan Bank Century di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

JAKARTA — Polisi tengah menelisik data perusahaan yang diduga memakai jasa Gayus Halomoan Tambunan, bekas staf Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, agar menang di pengadilan pajak. "Rencananya hari ini, jam 15.00, penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim akan ke Direktorat Jenderal Pajak," kata juru bicara kepolisian, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, dalam jumpa pers kemarin.

Kunjungan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Boy mengimbuhkan, dalam mengungkap kasus mafia pajak ini, kepolisian diperkuat penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Penyidik KPK sudah bergabung dengan kami," ujar Boy.

Hasil penyelidikan lintas lembaga tersebut selanjutnya digunakan untuk memanggil 149 perusahaan yang pernah dilawan Gayus selaku wakil pemerintah di pengadilan pajak. Namun Boy belum bisa memastikan perusahaan mana saja yang akan diperiksa. "Prioritas pemanggilan bergantung pada hasil temuan itu," ujar dia.

Meski kepolisian mencatat Gayus telah menangani keberatan pajak 149 perusahaan, Gayus mengaku hanya menangani 44 perusahaan. Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo membenarkan jika disebut sudah menyerahkan sebagian besar data wajib pajak yang berkaitan dengan Gayus kepada polisi.

Sayangnya, ia enggan membuka nama-nama wajib pajak tersebut. "Datanya kan banyak," kata dia berkilah saat dijumpai di gedung Kementerian Keuangan. Tjiptardjo hanya sudi memastikan jumlah data yang diminta polisi setidaknya 140 perusahaan.

Ditemui di Markas Besar Polri, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan kejaksaan memberi petunjuk bahwa Gayus mengakui menerima suap dari sejumlah perusahaan.

Berbekal pengakuan itu, polisi dan Direktorat Jenderal Pajak diam-diam menyelidiki wajib pajak yang pernah ditangani Gayus untuk melengkapi rencana dakwaan jaksa. "Kasus ini sudah mendekati P-21 (lengkap)," tutur Ito.

Gayus Tambunan, bekas pegawai Pajak golongan III-A yang diduga memiliki harta senilai Rp 109 miliar, kini tengah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dua kasus.

Kasus pertama adalah dakwaan menerima suap Rp 370 juta dari PT Surya Alam Tunggal. Sedangkan kasus kedua adalah dakwaan memberi suap Rp 20 miliar terhadap polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

Dalam persidangan, Gayus mengakui menerima uang Rp 28 miliar dan Rp 7 miliar dari "jasanya" mengurus pajak tiga perusahaan kelompok Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Tbk.

Uang senilai Rp 28 miliar disimpannya di Bank BCA dan Bank Panin, sedangkan Rp 7 miliar dalam bentuk tunai di rumahnya. Namun Gayus belum mengakui asal-usul hartanya yang lain, sejumlah Rp 74 miliar, yang berwujud uang tunai dan emas.

● DIANING SARI | ANTON SEPTIAN | ANTON WILLIAM | EFRI RITONGA

KORAN TEMPO
minGGu 16 JANUARI 2011

Polisi Teliti Berkas 151 Perusahaan Terkait Gayus

Tiga di antaranya perusahaan dari Grup Bakrie.

JAKARTA — Kepolisian RI mulai menyelisik dugaan suap sejumlah perusahaan terhadap Gayus Halomoan P. Tambunan, bekas pegawai pajak. Kemarin siang, penyidik menerima berkas 151 perusahaan yang pernah berhubungan dengan Gayus.

Direktur III Bidang Tindak Pidana Korupsi Brigadir Jenderal Ike Edwin menjelaskan, polisi kini meneliti data itu untuk menelusuri perusahaan yang pernah ditangani oleh Gayus. "Kami pelajari," ujarnya kepada *Tempo* tadi malam.

Tapi ia enggan menjawab apakah hal ini terkait dengan dugaan suap dari tiga perusahaan Grup Bakrie. "Sesuai pengakuan Gayus saja," kata Ike.

Kementerian Keuangan menyerahkan berkas 151 wajib pajak yang dibutuhkan oleh Kepolisian RI untuk mengusut kasus mafia pajak, termasuk berkas tiga perusahaan anak usaha Grup Bakrie yang diduga menyuap Gayus.

"Iya, termasuk (tiga perusahaan) itu," kata Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Hadi Rudjito setelah menyerahkan berkas di kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. "Saya tak bisa menyebutkan satu per satu perusahaannya. Tapi semua kurang-lebih ada 151 wajib pajak."

Hadi menolak membeberkan detail dokumen yang ia serahkan kepada Ike Edwin itu. Ia beralasan perkara sudah ditangani kepolisian, tapi semua berkas itu sesuai dengan permintaan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ito Sumardi.

Hadi datang bersama juru bicara Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi, dan Kepala Biro Hukum Indra Surya. Indra menyatakan kementeriannya akan kooperatif dalam pengusutan kasus pajak.

Lewat surat tertanggal 23 Desember 2010, Polri meminta data 151 perusahaan yang diduga terkait dengan Gayus kepada Kementerian Keuangan. Hadi Rudjito mengatakan, penyerahan data terhalang cuti bersama Natal dan tahun baru.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Desember, Gayus mengaku menerima uang Rp 35 miliar dari tiga perusahaan anak usaha Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Tapi Grup Bakrie selalu menyangkal dugaan keterlibatan tiga perusahaan itu. Juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, meminta agar masalah hukum perusahaan Grup Bakrie tak serta-merta dikaitkan dengan Aburizal. "Pak Ical sekarang politikus, bukan pengusaha."

Penyidikan dugaan suap untuk Gayus mandek sejak April 2010. Akhirnya, 3 Desember 2010, polisi menyatakan Gayus menjadi tersangka dugaan gratifikasi. Jerat yang ringan ini menuai protes dari publik. Polri lantas meminta berkas sejumlah perusahaan yang dicurigai kepada Kementerian Keuangan. ● EVANA DEWI | ISMA SAVITRI | MUNAWWAROH | GUSTIDHA B | JOBPIE S

KORAN TEMPO
SENIN, 17 JANUARI 2011

Polisi Gandeng KPK Usut 151 Perusahaan Terkait Gayus

Satgas senang kedua lembaga itu kompak.

JAKARTA — Kepolisian bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menganalisis berkas 151 wajib pajak yang menjadi klien terdakwa mafia pajak Gayus Halomoan P. Tambunan. Dari jumlah itu, tiga perusahaan di antaranya anak usaha Grup Bakrie, yang diduga menyuap Gayus.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Divisi Humas Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar, penelisikan bersama itu bertujuan melihat apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam hubungan perusahaan-perusahaan itu dengan Gayus. "Apakah ada kejanggalan, terutama masalah pengurusan pajak, apakah ada tindak pidana korupsi," ujar Boy saat dihubungi kemarin.

Sabtu lalu, Kementerian Keuangan telah menyerahkan berkas 151 wajib pajak perusahaan yang berkaitan dengan Gayus. Setelah menerima berkas, polisi pun menelaah berkas tersebut. Dalam menganalisis berkas inilah, polisi menggandeng komisi antikorupsi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Desember 2010, Gayus mengaku menerima uang Rp 35 miliar dari tiga perusahaan anak usaha Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Namun Grup Bakrie selalu menyangkal dugaan keterlibatan tiga perusahaan itu dengan kasus Gayus.

Selain menggandeng KPK, Boy melanjutkan, polisi akan mengajak Direktorat Jenderal Pajak untuk menelisik bersama berkas tersebut. Rencananya, awak ketiga lembaga ini akan memulai analisis pada pekan depan. Dari analisis itulah bisa ditentukan apa langkah berikutnya. Misalnya menentukan siapa saja pemimpin perusahaan klien Gayus yang perlu dipanggil.

Boy belum bisa menyebutkan kapan polisi, KPK, dan Ditjen Pajak merampungkan penelisikan itu. Ia juga tak tahu kapan perusahaan-perusahaan klien Gayus bakal diperiksa. "Perlu proses pembuktian, apakah benar Gayus menerima dari perusahaan itu," kata Boy, "Jangan *grusa-grusu*, nanti kita sampaikan."

Menurut juru bicara Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi, tak tertutup kemungkinan polisi akan meminta data tambahan untuk mengungkap kasus yang berkaitan dengan Gayus. "Selama itu untuk penegakan hukum, kami akan siap membantu memberikan data," kata Yudi kemarin.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengapresiasi sikap kepolisian dan KPK, yang kini lebih kompak dalam menangani kasus Gayus. "Hal ini merupakan kemajuan yang berarti," kata dia, "Sudah muncul pertanda dan keinginan untuk bersinergi antarpenegak hukum."

Menurut Mas Achmad, ada tiga hal dalam penanganan kasus Gayus yang perlu difokuskan saat ini. Pertama, penuntasan mafia peradilannya, yakni semua oknum aparat yang menerima uang dari Gayus. Kedua, penuntasan mafia pajak yang terkait dengan sejumlah wajib pajak. Dan, ketiga, korupsi yang terjadi di lingkup Pengadilan Pajak.

Dihubungi terpisah, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengaku heran kenapa polisi baru sekarang meminta data perusahaan wajib pajak yang berkaitan dengan Gayus ke Ditjen Pajak. "Sikap polisi ini aneh," katanya. "Saya curiga, ini hanya akal-akalan untuk menciptakan kesan mereka serius menangani kasus Gayus."

● BUNGA MANGGIASIH | ISMA SAVITRI | IQBAL MUHTAROM | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
SELASA, 18 JANUARI 2011

KASUS 151 PERUSAHAAN WAJIB PAJAK TERKAIT GAYUS

Kuntoro Desak Polisi Segera Verifikasi

JAKARTA — Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto meminta kepolisian mengusut, meneliti, dan melakukan verifikasi terhadap 151 perusahaan wajib pajak yang diduga berkaitan dengan terdakwa mafia pajak Gayus H. Tambunan. Hal itu penting dilakukan agar publik tidak menyamaratakan bahwa semua perusahaan tersebut bermasalah dengan urusan pajak.

"Nomor satu diteliti, apakah ada tanda-tanda penyalahgunaan. Itu penting, tidak bisa digeneralisir semuanya," kata Kuntoro di Kantor Presiden kemarin. "Begitu ada perusahaan yang terindikasi dengan ini (masalah pajak), maka segera diteliti lagi."

Sabtu lalu, Kementerian Keuangan telah menyerahkan berkas 151 wajib pajak perusahaan yang berkaitan dengan Gayus. Saat ini polisi masih menelaah berkas tersebut.

Jumlah tersebut berbeda dengan yang diungkap Gayus seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan awal Desember tahun lalu. Menurut dia, ada 149 perusahaan yang mencantumkan namanya dalam surat tugas, tapi hanya 44 perusahaan yang banding keberatan pajaknya ditangani Gayus.

Kemarin dua perusahaan yang namanya masuk daftar 151 perusahaan memberikan bantahan. "Kami tak pernah berurusan dengan Gayus," ujar juru bicara XL Axiata, Febrianti Nadira. "Chevron menghormati hukum dan menjalankan bisnis sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," ujar juru bicara Chevron, Santi Manuhutu, dalam pesan singkatnya.

Untuk menelaah dokumen pajak 151 perusahaan itu, Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Boy Rafli Amar menyatakan polisi akan mengundang beberapa pihak terkait. Mereka antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta konsultan pajak independen.

Dua hari lalu, polisi juga menyatakan akan menggandeng KPK. Saat dimintai konfirmasi, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan lembaganya akan mengirim perwakilan untuk bekerja sama dengan kepolisian. Namun, di luar itu, tim komisi antikorupsi tetap akan meneruskan penyelidikan terhadap kasus pajak yang melibatkan Gayus. "Keduanya berjalan simultan," kata Busyro saat bertandang ke kantor majalah *Tempo* kemarin.

● EKO ARI | SORTA TOBING | RIRIN AGUSTIA | FEBRIYAN | EVAN | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
RABU, 19 JANUARI 2011

Soal Gayus, Presiden Dituding Mencoba Cuci Tangan

"12 instruksi Presiden bukan hal baru."

JAKARTA — Beberapa politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menilai keluarnya 12 instruksi Presiden soal penanganan kasus Gayus H. Tambunan merupakan upaya cuci tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terlihat pada penunjukan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap pelaksanaan instruksi tersebut dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

"Kalau gagal, nanti Presiden bisa lepas tangan," ujar Sarifuddin Suding, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Hanura, di gedung DPR kemarin. Menurut dia, isi instruksi Presiden itu tak mencerminkan sikap yang tegas serta tak mencantumkan sanksi untuk para pembantu Presiden yang tak berhasil dalam mengungkap kasus. "Isinya normatif," katanya.

Dua hari lalu, Yudhoyono mengeluarkan 12 instruksi berkaitan dengan penuntasan kasus terdakwa mafia hukum dan mafia pajak Gayus, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kekayaannya mencapai hampir Rp 100 miliar. Kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah menangani masalah ini, tapi pengusutan polisi tak mengungkap jaringan penyuap Gayus.

Menurut politikus dari Fraksi Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa, beban pengungkapan kasus Gayus kini berada di tangan Boediono. Kalau pengungkapan tak jalan, dia yang akan disalahkan. "Seharusnya Yudhoyono ambil sendiri tanggung jawab itu," katanya.

"Rapat pemerintah soal kasus Gayus itu membuktikan kalau pemerintah masih kalah oleh Gayus," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Anis Matta. Ihwal isi 12 instruksi, menurut Anis, tidak ada yang baru. Pemerintah hanya ingin membuktikan bahwa mereka bekerja.

Tidak adanya kebaruan juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung. Ia menilai kasus Gayus membuat malu pemerintah Yudhoyono. Untuk itu, perlu ada sanksi tegas bagi pembantu Presiden yang tidak bisa menyelesaikan kasus mafia pajak dan pelesirannya Gayus. "*Warning* perlu diberikan ke Kapolri dan Jaksa Agung," katanya.

Kejaksaan Agung mengklaim sudah menindak oknum yang diduga terlibat dalam kasus itu. "Sudah kami tindak, seperti Cirus (Cirus Sinaga, jaksa peneliti kasus Gayus)," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar menyatakan lembaganya langsung membentuk tim khusus penanganan kasus Gayus. "Bareskrim tengah mempersiapkan tim yang akan membantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku kecewa karena Yudhoyono tak menyerahkan sepenuhnya penanganan Gayus ke KPK. "Terus terang, atas jawaban ini, saya kecewa," kata Din kemarin.

● SANDY INDRA | FEBRIYAN | ISMA SAVITRI | MAHARDIKA SATRIA | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
KAMIS, 20 JANUARI 2011

Satgas Anggap Tudingan Gayus Serangan Balik

"Itu mengaburkan masalah mafia pajak dan peradilan yang dia lakukan."

JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan berbagai tuduhan yang disampaikan terpidana Gayus H. Tambunan merupakan serangan balik terhadap lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Tapi kami tidak akan gentar. Akan kami lawan," kata anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, di kantornya kemarin.

Seusai sidang vonis atas dirinya kemarin, Gayus melontarkan kekecewaannya terhadap Satgas. Dia menuduh Satgas merekayasa kasusnya. Selain Achmad, yang menjadi sasaran tembak Gayus adalah Sekretaris Satgas, Denny Indrayana, dan anggota Satgas, Yunus Husein.

Gayus mengatakan, awalnya terpidana kasus pajak ini berkomitmen membantu Satgas membongkar mafia hukum dan mafia pajak. Tapi, menurut dia, pernyataan dan perilaku anggota Satgas belakangan malah memperkeruh suasana.

Ada delapan tuduhan yang dibacakan Gayus di depan wartawan. Denny paling banyak ia sebut. "Mereka justru menyudutkan seolah-olah saya ini penjahat nomor satu," kata Gayus, bekas pegawai pajak golongan III-A dengan harta lebih dari Rp 100 miliar itu.

Satgas kemarin sore menggelar jumpa pers untuk merespons tuduhan Gayus. "Kami membantah keras tuduhan yang tidak berdasarkan fakta," kata Achmad. "Itu mengaburkan masalah mafia pajak dan peradilan yang dia lakukan."

Achmad menyatakan Satgas tak menyuruh Gayus pergi Singapura seperti yang dituduhkan terpidana. "Satgas tidak tahu-menahu Gayus akan melarikan diri ke Singapura," kata Achmad.

Bukti Satgas tidak menyuruh Gayus ke Singapura, ujar Achmad, ada dalam rekaman percakapan BlackBerry Messenger antara Denny dan Gayus. Dalam salinan percakapan pada 29 Maret tahun lalu itu, Denny beberapa kali menanyakan tempat keberadaan Gayus dan siap menjemputnya di mana pun. "Bagaimana mungkin saya katakan akan jemput dia di mana pun kalau saya tahu dia di mana," ujar Denny menguatkan.

Achmad pun menepis tuduhan Gayus bahwa Satgaslah yang menyatakan uang Rp 50 miliar di kotak depositnya berasal dari Grup Bakrie. Menurut Achmad, justru Gayus dan kuasa hukumnyalah yang dalam berbagai kesempatan menyebutkan asal uang itu dari ketiga perusahaan tersebut, termasuk di pengadilan.

Satgas juga membantah tuduhan Gayus soal keterlibatan agen Central Intelligence Agency (CIA) dalam pemalsuan paspor yang ia pakai keluyuran ke luar negeri. Menurut Gayus, peran agen Amerika bernama John Grice itu direstui seorang anggota Satgas. "Satgas sama sekali tidak tahu-menahu informasi tersebut," kata Achmad. "Gayus harus buktikan kebenaran informasi itu."

● RIRIN AGUSTIA | ISMA SAVITRI

KORAN TEMPO
KAMIS, 20 JANUARI 2011

Tujuh Tahun Penjara buat Gayus dan Haposan

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gayus H. Tambunan dan Haposan Hutagalung masing-masing tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta di pengadilan terpisah kemarin. Vonis itu jauh di bawah tuntutan jaksa, yang meminta agar Gayus dihukum 20 tahun penjara dan Haposan dipenjara 15 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 500 juta.

Ada keterkaitan antara Gayus dan Haposan. Gayus adalah klien Haposan saat ia menghadapi dugaan penggelapan pajak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Maret tahun lalu. Saat itu Gayus divonis bebas sehingga memunculkan kecurigaan telah terjadi "permainan" Gayus dan Haposan dengan penyidik kepolisian, kejaksaan, serta majelis hakim. Belakangan, semua itu terbukti di persidangan.

Menurut ketua majelis hakim Albertina Ho, yang menyidangkan kasus Gayus, terdakwa divonis tujuh tahun karena terbukti memenuhi empat dakwaan jaksa. Masing-masing adalah menyalahgunakan wewenang, menyuap penyidik Polri, menyuap hakim Muhtadi Asnun dari Pengadilan Negeri Tangerang, dan memberi kesaksian palsu.

Menanggapi vonis itu, jaksa mengatakan akan melakukan banding. "Sebab, vonis belum sampai dua pertiga dari jumlah tuntutan," kata ketua tim jaksa Uung Abdul Syakur.

Sementara itu, Gayus menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dipimpin Albertina Ho. Menurut pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, vonis yang dijatuhkan hakim tak membuat Gayus berhenti untuk membongkar mafia pajak dan mafia peradilan yang menjerat dirinya. "Gayus akan terus melawan," ujarnya.

Namun, Buyung mengaku, saat ini sudah tak ada aparat penegak hukum yang bisa dipercaya untuk bekerja sama menuntaskan mafia pajak yang melibatkan Gayus. "Perlu dibentuk institusi baru untuk menangani kasus ini, yang diisi orang-orang yang bersih, berani, dan punya nyali untuk melawan korupsi," katanya.

Haposan diganjar hukuman tujuh tahun oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Tahsin karena ia terbukti menghalang-halangi penyidikan kasus Gayus dan menyuap penyidik Polri. Haposan langsung menyatakan banding, sedangkan jaksa Sugeng Sumarno menyatakan masih pikir-pikir.

● ISMA SAVITRI | JAYADI SUPRIADIN | EKO ARI | DWI WIYANA

KORAN TEMPO
JUMAT, 21 JANUARI 2011

Satgas Tetap Berfokus Tangani Mafia Pajak

Polisi mempercepat sidang kode etik.

JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tetap berfokus pada upaya mengungkap mafia pajak dan mafia hukum kasus Gayus H. Tambunan. "Kami fokus ke sana, tidak berubah konsentrasi dengan hal-hal lain yang mengganggu," kata Sekretaris Satuan Tugas, Denny Indrayana, di Jakarta kemarin. "Instruksi presiden akan menjadi pegangan untuk mengungkap tuntas kasus Gayus."

Satuan Tugas dikecam politikus Dewan Perwakilan Rakyat menyusul tudingan terpidana kasus suap Gayus, yang mengaku kasusnya direkayasa Satgas untuk kepentingan politik.

Bambang Soesatyo dari Partai Golkar menilai Satuan Tugas lebih memprioritaskan agenda politik daripada memerangi mafia hukum dan pajak sesuai dengan tugasnya. "Maka sudah cukup alasan untuk membubarkan Satgas," ujarnya. Menurut dia, pengakuan Gayus itu menjadi pembenaran atas tudingan bahwa Satgas merekayasa kasus untuk membidik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pemilik Grup Bakrie.

Tapi tudingan itu tak membuat Satuan Tugas surut. "Kami pastikan semua yang berkaitan dengan kasus Gayus Tambunan akan bisa dibongkar," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Santosa.

Menurut Mas Achmad, Satuan Tugas akan memastikan bahwa mafia peradilan, mafia pajak, dan mafia yang terkait dengan keluarnya Gayus dari tahanan akan dibongkar.

Khusus soal mafia pajak, semua kasus pajak yang terkait dengan Gayus bakal diproses, termasuk kasus 152 wajib pajak yang pernah ditangani bekas pegawai pajak itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu mengeluarkan 12 instruksi percepatan penuntasan kasus Gayus. Dewan Perwakilan Rakyat juga membentuk Panitia Kerja, yang akan segera memanggil 12 pihak yang terkait dengan kasus Gayus, mulai Kepala Polri sampai Satuan Tugas.

Menurut Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman, Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak dan Hukum dibentuk untuk mendorong aparat hukum mengungkap kasus Gayus. "Gayus bukan tunggal. Kasus Gayus adalah kolektif, jadi ada yang lain. Ini tantangan," kata dia. "Kasus Gayus bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia pajak."

Kepolisian Republik Indonesia berjanji akan segera menggelar sidang kode etik untuk para anggotanya yang terlibat dalam kasus Gayus. "Mungkin minggu ini atau bulan ini," ujar Kepala Pusat Pengamanan Internal Brigadir Jenderal Budi Waseso.

Budi mengatakan percepatan sidang kode etik ini dilakukan berdasarkan instruksi presiden. "Pokoknya yang berkaitan dengan itu semua akan diselesaikan sesuai dengan perintah Presiden," ujarnya.

Di tubuh Polri, dua penyidik Badan Reserse Kriminal telah divonis bersalah karena terlibat dalam praktek mafia hukum. Mereka adalah Komisaris M. Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Sri Sumartini.

Sedangkan dua perwira tinggi Polri, yaitu Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman, dinyatakan polisi tak terbukti menerima aliran dana dari Gayus. "Sudah kami lakukan pemeriksaan. Mereka tak merasa (menerima)," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi kemarin.

● SANDY INDRA PRATAMA | EKO ARI WIBOWO | AMIRULLAH | FEBRIYAN

KORAN TEMPO

minggu 23 JANUARI 2011

Kasus Gayus Bisa Jadi Alat Transaksi Politik

"Semua pihak punya kartunya."

JAKARTA — Sejumlah pengamat politik khawatir kasus mafia pajak dan peradilan yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan bisa dijadikan alat transaksi oleh para politikus. "Kasus ini bisa menjadi alat jegal-menjegal dalam pertarungan partai yang berkuasa," kata Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam diskusi "Setelah Kasus Gayus" di Jakarta kemarin.

Menurut Ikrar, kasus Gayus berpotensi menyulut kekisruhan politik dalam pertarungan politikus partai besar yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Karena itu, ia mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diusut tuntas.

"Enggak akan sampai jatuh negeri ini kalau ada politikus partai, seperti Golkar dan Demokrat, yang kena. Apa itu sampai menghancurkan sistem politik? Saya kira tidak," kata Ikrar.

Menurut pengamat dan peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, semua partai berkepentingan menjadikan kasus Gayus sebagai alat transaksi politik. "Ini bisa dijadikan sandera karena semua pihak mengatakan punya kartunya," kata Burhanuddin.

Sebagai oposan, PDI Perjuangan, misalnya, kata Burhanuddin, berkepentingan untuk memakai kasus Gayus sebagai amunisi buat menyebut pemberantasan korupsi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tak berjalan baik.

Adapun Partai Golkar bisa memakai kasus Gayus sebagai amunisi untuk menyerang balik. "Jadi kasus Gayus ini ibarat satu buku yang bisa dipakai siapa pun untuk memuluskan kepentingannya," kata dia.

Burhanuddin merujuk pada sikap Partai Golkar yang mendesak Presiden mengevaluasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. "Keberadaan Satgas terbukti banyak mudaratnya," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus menuding Satgas mempolitisasi proses hukum. Politikus Golkar ini merujuk pada testimoni Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu lalu. "Ada skenario menyudutkan ketua umum kami secara sistematis," kata Idrus.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa membantah jika partainya disebut memakai kasus Gayus sebagai amunisi untuk menekan partai lain dalam Sekretariat Gabungan. "Tidak pernah terpikir oleh kami untuk menjadikan perkara Gayus sebagai amunisi ke partai lain," ujarnya.

Menurut Saan, kasus mafia pajak Gayus sepenuhnya murni masalah hukum. Partai Demokrat tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan meminta penuntasan kasus itu tetap murni di ranah hukum. Soal evaluasi Satgas, Partai Demokrat mengaku setuju hal itu dievaluasi. "Syaratnya hanya untuk perbaikan, bukan pembubaran," ujarnya.

● ISMA SAVITRI | RIRIN AGUSTIA | CORNILA DESYANA | WIDIARSI AGUSTINA

KORAN TEMPO
SELASA, 25 JANUARI 2011

Gayus-Haposan Ajukan Banding

JAKARTA — Gayus Halomoan Tambunan, terdakwa penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap, mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah serupa diajukan olah Haposan Hutagalung, mantan pengacara Gayus. Keduanya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

"Haposan dan penasihat hukum tidak sependapat dengan hakim," ujar pengacara Haposan, John S.E. Panggabean, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menilai putusan hakim yang menyatakan kliennya bersalah sangat kontradiktif. Alasannya, hakim tak menggunakan fakta persidangan sebagai dasar pertimbangannya. "Saya tak tahu teori hukum apa yang digunakan hakim," ujarnya.

Sementara itu, untuk pengajuan banding ini, Gayus menunjuk Junder Tambunan sebagai kuasa hukumnya, bukan Adnan Buyung Nasution. "Kantor kami tidak akan menanganinya," ujar Adnan Nasution, kuasa hukum Gayus yang lain, setelah menemui Gayus di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, kemarin.

Rabu pekan lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis yang sama, yakni tujuh tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta, terhadap Gayus dan Haposan. Vonis itu jauh di bawah tuntutan jaksa karena sebelumnya Gayus dituntut 20 tahun penjara, sedangkan Haposan 15 tahun penjara. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 500 juta.

Gayus dan Haposan pernah memiliki hubungan khusus. Gayus adalah klien Haposan saat ia menghadapi dugaan penggelapan pajak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Maret tahun lalu.

Adnan Buyung menyatakan akan tetap menangani kasus Gayus berkaitan dengan dugaan praktek mafia hukum dan perpajakan yang telah ia kawal sejak awal. "Sesuai dengan komitmennya kepada kami untuk membongkar, baik yang menyangkut uang sejumlah Rp 28 miliar, Rp 74 miliar, maupun *big fish* lainnya," katanya. ● RIRIN AGUSTIA | FEBRIYAN

KORAN TEMPO
RABU, 26 JANUARI 2011

Polisi Didesak Publikasikan Aset Gayus Tambunan

Petinggi Polri yang diduga terlibat harus diperiksa.

EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Pimpinan KPK dan sejumlah tokoh mendeklarasikan "Tiga Tuntutan Rakyat" untuk melawan kebohongan pemberantasan korupsi dan mafia hukum di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

JAKARTA — Kepolisian RI dinilai lamban dalam mengungkap sumber berbagai aset terdakwa kasus mafia hukum Gayus Tambunan.

Menurut peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah beberapa kali menyita aset milik Gayus sejak Mei 2010, tetapi penyidik hingga kini belum mengungkapkan asal-muasalnya.

Padahal, kata Donal, pengungkapan dan publikasi asal aset Gayus merupakan satu di antara 12 instruksi Presiden kepada lembaga penegak hukum beberapa waktu yang lalu. "Jadi, jangan ada informasi yang ditutupi lagi," ujar Donal saat dihubungi kemarin.

Jumlah aset Gayus yang telah disita sekitar Rp 109 miliar, di antaranya rekening senilai Rp 28 miliar serta aset berupa uang US$ 659.800, Sin$ 9.680.000, dan 31 batang emas (@100 gram) senilai total Rp 74 miliar.

Donal mengatakan ada sejumlah aset yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh penyidik. Dari aset senilai Rp 28 miliar, misalnya, hanya Rp 395 juta yang dijadikan bukti di persidangan. "Ini yang patut diduga diberikan Gayus ke penegak hukum," ujar Donal.

Dengan tidak terbukanya penyidik ihwal aset Rp 28 miliar itu, kata Donal, masyarakat akan semakin khawatir atas keberadaan aset Rp 74 miliar lainnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan Polri belum menemukan bukti kekayaan Gayus yang diperoleh dengan memainkan pajak sejumlah perusahaan.

Boy mengatakan, sejumlah perusahaan yang menggunakan jasa Gayus diduga memberikan uang tunai sebagai imbalan permainan pajak mereka. Kepolisian, kata dia, masih mencari bukti kekayaan tunai Gayus yang diperoleh karena jasanya tersebut. "Itu yang jadi tantangan penyidik untuk menemukannya," ujarnya.

Kepolisian, kata dia, kini masih mempersiapkan pemanggilan Gayus sebagai saksi untuk mengurai hubungan pajak 44 perusahaan dengan kekayaan Gayus. "Kalau ketemu (bukti permulaan), bisa menjadi salah satu kasus baru," kata dia.

Mengenai pembukaan blokir rekening Rp 28 miliar milik Gayus, pengacara terdakwa kasus gratifikasi Komisaris Jenderal Susno Duadji, Maqdir Ismail, mendesak Polri memeriksa dua bekas Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman.

"Pembukaan blokir itu beberapa hari setelah Pak Susno berhenti dari jabatannya (sebagai Kepala Bareskrim Polri)," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Jika Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo berniat menuntaskan kasus Gayus, kata dia, para petinggi Polri yang diduga terlibat juga harus diperiksa. "Ibaratnya, ikan itu kan busuk dari kepala, bukan dari ekor," tuturnya.

● CORNILA DESYANA | DIANING SARI | ISMA SAVITRI | SAPTO Y

KORAN TEMPO
RABU, 26 JANUARI 2011

KPK BIDIK PENYUAP GAYUS

Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Raja Erizman akan diperiksa.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi menyelidiki kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu.

"Kami fokusnya pada hubungan Gayus dan wajib pajaknya," kata Busyro di kantornya kemarin.

Menurut Busyro, KPK tak akan berhenti hanya pada Gayus, karena Gayus tak mungkin bermain sendirian. "Pasti ada pihak-pihak lain yang terkait," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menambahkan, kasus Gayus terbagi menjadi dua, yakni Gayus dan kolleganya yang menerima suap dari wajib pajak serta Gayus yang berusaha membebaskan diri dari jerat hukum. "KPK mengambil celah yang tak ditangani polisi," kata dia.

Dalam kaitan dengan penyelidikan itu, Busyro menyatakan KPK akan memanggil Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman. Kedua mantan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu diduga mengetahui pembukaan blokir rekening Gayus. Hingga kini Polri berkeras Edmon dan Raja tak menerima duit dalam penyidikan kasus kepemilikan rekening Rp 28 miliar dan pembukaan blokir rekening milik Gayus itu.

Kemarin kuasa hukum Gayus, Pia Akbar Nasution, meminta kepolisian segera menyerahkan perkara kliennya ke KPK karena penyidikan Polri berjalan terlalu lambat. Menurut Pia, hingga sembilan bulan sejak penyitaan aset Gayus, polisi belum juga mengusut asal-muasal uang Rp 28 miliar milik Gayus tersebut.

"Karena kalau minta ke Presiden susah. Jadi, lebih baik ke Kapolri, yang bisa langsung memerintahkan anak buahnya," kata dia.

● ANTON SEPTIAN | DIANING SARI | CORNILA DESYANA | SAPTO Y

KORAN TEMPO
KAMIS, 27 JANUARI 2011

Boediono Libatkan KPK Pantau Kasus Pajak Gayus

JAKARTA — Wakil Presiden Boediono akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memantau dan mengawasi penanganan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan KPK akan diundang dalam rapat koordinasi yang digelar dua minggu sekali. "Yang diharapkan adalah penanganan yang simultan dan tuntas," kata Yopie di kantor Wakil Presiden kemarin.

Sebelumnya, Presiden mengeluarkan 12 instruksi kepada lembaga-lembaga penegak hukum berkaitan dengan penanganan kasus Gayus. Dalam butir kedua, Presiden menginstruksikan agar sinergi di antara penegak hukum yang melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ditingkatkan. KPK akan dilibatkan untuk memeriksa kasus yang belum ditangani kepolisian.

Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menyambut baik langkah Wakil Presiden tersebut. "Itu bagus sebagai bentuk perkembangan," kata Denny. Menurut dia, langkah Boediono itu sesuai dengan 12 instruksi Presiden.

KPK bertekad mengusut perusahaan-perusahaan beraset besar yang pernah ditangani Gayus. "Tentu ada penetapan prioritas oleh tim penyelidik. Kalau enggak, kerja tim jadi lama dan membuang waktu," kata Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin kemarin.

Namun Jasin belum mau mengungkapkan nama-nama perusahaan beraset besar tersebut. Begitu pula waktu pemanggilan terhadap mereka. "Ini rahasia dulu."

Investigasi 151 berkas wajib pajak yang pernah ditangani Gayus akan dilakukan secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, KPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan investigasi akan dipusatkan di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tujuannya agar dokumen-dokumen wajib pajak tetap dilindungi.

"Data-data dokumen yang penting mestinya tidak bisa keluar dari Ditjen Pajak dan tetap di sini," kata Fuad dalam konferensi pers bersama Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi di kantor Ditjen Pajak kemarin.

Ito Sumardi mengatakan penanganan 151 berkas wajib pajak tersebut akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, "Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah."

Ito menegaskan, sesuai dengan undang-undang, penyidik tak akan mungkin menyampaikan nama wajib pajak, kecuali ada indikasi pelanggaran.

● EKO ARI WIBOWO | ANTON SEPTIAN | RIRIN AGUSTIA | IQBAL MUHTAROM

TONY HARTAWAN (TEMPO)

Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi (kiri) saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany.

KORAN TEMPO
JUMAT, 28 JANUARI 2011

Police Watch Ungkap Polisi Penerima Suap Gayus

Berkas penyidikan paspor palsu dilimpahkan ke kejaksaan.

JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) menduga enam polisi dari Markas Besar Kepolisian RI terlibat dalam manipulasi penyidikan dan penuntutan Gayus Halomoan Tambunan dalam perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 394 juta.

Namun hanya lima di antaranya yang menerima uang suap dari Gayus melalui pengacaranya kala itu, Haposan Hutagalung. "Sedikitnya enam oknum polisi harus bertanggung jawab dalam kasus Gayus dan Cirus," kata Ketua Presidium IPM, Netta S. Pane, di ruang pers gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin.

Netta menyebutkan inisial nama keenam orang itu, yakni P, E, R, I, A, dan S. Mereka terdiri atas lima perwira tinggi dan seorang petugas Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Ia pun membeberkan temuan empat aliran dana besar dari Gayus kepada para polisi tersebut, masing-masing Rp 750 juta, Rp 1,5 miliar, Rp 2 miliar, serta Rp 3,5 miliar.

Netta menduga keterlibatan para pejabat itulah yang membuat Polri tak maksimal mengusut keterlibatan jaksa Cirus Sinaga. Ia pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi berfokus pada pembukaan blokir rekening berisi uang sekitar Rp 27,6 miliar milik Gayus. "IPW akan memberi petunjuk dan masukan soal perwira tinggi polisi yang terlibat," ujarnya.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Inspektur Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana menyatakan tak tahu perihal data yang disampaikan oleh Police Watch. Ia juga menjawab tak tahu ketika ditanya apakah dalam penyelidikan ditemukan indikasi keterlibatan enam polisi itu. "Saya tak tahu. Tanyakan saja ke IPW," ucapnya singkat.

Rabu lalu, penyidik Direktur I Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melimpahkan dua berkas perkara paspor palsu atas nama Sony Laksono dengan tersangka Gayus dan Ari Nur Irwan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum Komisaris Besar Boy Rafli Amar kemarin, adalah Ari yang memotret Gayus untuk paspor itu. Sedangkan Joko, yang mengenalkan Ari kepada John Jerome Grice, belum dijadikan tersangka. Adapun Jerome, pembuat paspor palsu, masih buron.

Boy menuturkan, penyidik masih memeriksa beberapa petugas imigrasi terkait dengan kepergian Gayus. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan 35 petugas Direktorat Jenderal Imigrasi telah dinonaktifkan.

Adapun Komite Kode Etik dan Profesi Mabes Polri dijadwalkan membacakan putusan untuk Ajun Komisaris Sri Sumartini pada Senin pekan depan. Pada Mei 2010, Komite telah merekomendasikan agar Komisaris Arafat Enanie diberhentikan.

Boy juga menjelaskan, pada Februari akan digelar sidang untuk empat perwira: Mardiyani, Komisaris Besar Pambudi Pamungkas, Brigadir Jenderal Edmon Ilyas, Komisaris Besar Eko Budi Sampurna, dan Brigadir Jenderal Raja Erizman.

● AMIRULLAH | CORNILA | RENNY FITRIA| JOBPIE S

KORAN TEMPO
JUMAT, 28 JANUARI 2011

KPK MULAI PERIKSA GAYUS

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Gayus Tambunan dalam perkara dugaan mafia pajak. Juru bicara komisi antikorupsi ini, Johan Budi S.P., mengatakan pemeriksaan itu juga akan difokuskan pada kolega Gayus di Direktorat Jenderal Pajak dan 151 perusahaan wajib pajak yang pernah jadi klien Gayus.

Menurut Johan, lembaganya akan menyelidiki apakah dalam kasus Gayus terjadi tindak pidana yang melibatkan penyelenggara negara. Untuk keperluan itu, KPK telah mengirim surat permohonan izin memeriksa kepada pengadilan, Senin lalu. Rencananya, pemeriksaan akan dilakukan awal pekan depan. "Kami berkoordinasi dengan pengadilan untuk 'pinjam' Gayus," ujarnya.

Terjunnya KPK dalam kasus Gayus itu sudah lama ditunggu-tunggu publik. Para aktivis antikorupsi menilai upaya polisi mengusut pejabat yang terlibat dalam kasus Gayus belum maksimal. Johan menuturkan, KPK akhirnya memutuskan ikut memeriksa Gayus setelah mereka bertemu dengan Polri dan sepakat membentuk tim gabungan. Selama ini sebenarnya KPK juga telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah data tentang Gayus. "Domain perpajakan bukan wilayah KPK. Kami hanya berwenang terhadap korupsi penyelenggara negara," ia menjelaskan.

Johan berjanji, lembaganya akan serius memeriksa sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kasus itu, termasuk para wajib pajak yang selama ini ditangani Gayus. Gayus telah mengaku menangani 152 perusahaan, termasuk menyebutkan tiga nama perusahaan Grup Bakrie di sidang.

Kemarin Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan KPK akan memprioritaskan pemeriksaan wajib pajak yang nilai penurunan pajaknya besar. Siapa mereka? Jasin tutup mulut saat ditanya.

Soal aliran dana Gayus ke dua perwira polisi dan jaksa, Johan mengatakan perkara itu sudah ditangani Polri. "Yang sudah ditangani polisi tak akan diambil alih," kata dia.

Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana gembira dengan langkah baru KPK ini. Tindakan itu, kata Denny, bisa menghindari timbulnya konflik kepentingan di lingkungan pejabat polisi dan Kejaksaan Agung. "Soalnya, kasus itu banyak melibatkan oknum Polri dan Jaksa. Sedangkan KPK tak terlibat," ujarnya.

Dukungan juga datang dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho berharap KPK tak hanya memeriksa Gayus, tapi juga kasus mafia pajak yang lebih besar yang menjerat bekas Direktorat Jenderal Pajak Bahasyim Assifie. "Ada dugaan, polisi dan Kejaksaan melokalisir kasus Bahasyim. Aktor dan aliran dana jumbo di rekeningnya tidak tersentuh," dia menambahkan. "Saya pesimistis kalau polisi dan jaksa yang melakukan."

Gayus dan Bahasyim adalah dua bekas pegawai pajak dengan rekening menggunung. Bahasyim diseret ke pengadilan karena memiliki rekening dengan transaksi mencurigakan bernilai sekitar Rp 885 miliar. Bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak itu didakwa melakukan pemerasan dan pencucian uang. Di rekeningnya, juga istri dan anaknya, saat ini cuma ada uang Rp 64 miliar.

● RIRIN AGUSTIA | ANTON SEPTIAN | SANDY INDRA | WIDIARSI AGUSTINA

KORAN TEMPO
JUMAT, 28 JANUARI 2011

TERKAIT KASUS GAYUS

Tim Kementerian Periksa Pegawai Pajak

JAKARTA — Kementerian Keuangan memfokuskan pemeriksaan pada penyidik pajak yang telah memeriksa 151 berkas wajib pajak yang terkait dengan kasus Gayus H. Tambunan. "Semua sedang kami teliti," kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho kemarin.

Pemeriksaan akan dilakukan terhadap semua pegawai yang disebut Gayus ikut memeriksa 151 berkas wajib pajak. "Semua yang disebut, salah atau tidak, akan diperiksa," ujar Sonny.

Jika ditemukan unsur pidana, pegawai pajak yang terlibat akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum. Saat ini, kata Sonny, proses pemeriksaan sedang berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber *Tempo* di Kementerian Keuangan mengungkapkan, pemeriksaan difokuskan pada pegawai bagian penelaah keberatan sampai eselon III. Proses pemeriksaan didahului dengan meneliti proses-proses pemeriksaan 151 berkas wajib pajak. Dari sini, pemeriksaan akan dilanjutkan ke materi substantif.

Bila ditemukan kejanggalan, tim akan memanggil pegawai pajak terkait. Mengenai hasil pemeriksaan, kata sumber ini, masih berkisar pada ketua tim sampai supervisor.

Sejak kasus Gayus terungkap pada Maret tahun lalu, Kementerian telah mencopot sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Mereka adalah Bambang Heru Ismiarso (Direktur Keberatan dan Banding), Johny Tobing (Kepala Sub-Direktorat Pengurangan dan Keberatan), Maruli Pandapotan Manurung (ditahan), serta Humala S.L. Napitupulu (ditahan).

Sedangkan pejabat yang dimutasi karena kasus ini adalah Kepala Sub-Direktorat Gugatan dan Banding I Wilayah Jakarta Marudur Sitanggang, Kepala Seksi Banding dan Gugatan I-B Bambang Setiono, Kepala Seksi Peninjauan Kembali dan Evaluasi Yurnalis, serta Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Pajak Agus Budiono.

Pejabat yang terkait dengan kasus Gayus bertambah setelah Menteri Keuangan Agus Martowardojo mencopot lima pejabat eselon II dari jabatannya pada bulan ini.

● ALI NY | IQBAL MUHTAROM

LAMPIRAN 3

LEMBAR PENILAIAN *CODING SHEET*